



Prolog
Prof Dr. Dede Rosyada, MA

Epilog
Prof. Dr. Husni Rahim, MA

MADRASAH PEMBANGUNAN (MP)

dalam Lintasan Sejarah
Pedidikan Islam Indonesia:

50 tahun menebar ilmu dan ahklak mulia

Team Editor:

Murodi

Wahdi Sayuti

Bahrissalim

Tantan Hermansya

Prolog

Prof Dr. Dede Rosyada, MA

Epilog

Prof. Dr. Husni Rahim, MA

**Madrasah Pembangunan (MP)
dalam Lintasan Sejarah
Pedidikan Islam Indonesia
50 tahun menebar ilmu dan ahklak mulia**

Team Editor:

Murodi

Wahdi Sayuti

Bahrissalim

Tantan Hermansya

**Madrasah Pembangunan (MP)
dalam Lintasan sejarah Pendidikan Islam Indonesia
50 tahun menebar ilmu dan ahklak mulia**

Penulis

Team Penulis

Editor

Murodi, Wahdi Sayuti, Bahrissalim, Tantan Hermansya,

Tata Letak

M. Agung Sya'ban

Desain Sampul

Tubagus Muttaqien

14.8 x 21 cm; xviii + 140 hlm

Cetakan 1 2024

ISBN:

Diterbitkan Oleh:

Pustaka MP

Hak Cipta Dilindungi oleh Undang undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak
sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa ijin
tertulis dari penerbit

Kata Pengantar

Tim Penulis Buku Sejarah MP

Alhamdulillah Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah yang Maha Esa. Hanya atas berkah dan rahmat-Nya penulisan Buku *Madrasah Pembangunan (MP) dalam Lintasan Sejarah Pendidikan Islam Indonesia* ini dapat terselesaikan sesuai dengan rencana.

Penulisan buku ini sesungguhnya merupakan kelanjutan dari upaya penulisan buku serupa yang pernah dilakukan pada periode sebelumnya. Disebut kelanjutan karena buku ini bisa ditulis lebih komprehensif justru karena memanfaatkan sumber-sumber yang telah ditulis dalam bentuk dokumen dan buku yang telah dituliskan sebelumnya. Penulisan buku ini dilakukan oleh tim yang terdiri dari peneliti dan sejarawan kompeten, melalui proses observasi, wawancara dan kajian dokumen, dalam rentang waktu hampir satu tahun.

Dengan selesainya seluruh proses penulisan, potret MP, sebagai salah satu madrasah favorit yang berdiri pada 1974, jauh sebelum kemunculan madrasah atau sekolah Islam favorit lain di Jakarta dan sekitarnya, akan terlihat dengan jelas dan komprehensif. Meskipun demikian, seluruh anggota tim menyadari bahwa, sebagaimana dikatakan E.H. Carr, *What is History?* (1961), "*the fact do not speak for themselves*", penulisan buku ini merupakan hasil rekonstruksi sejarah atas sebuah madrasah diletakkan dalam konteks wacana tentang

pendidikan Islam di Indonesia. Lebih dari itu, penting dicatat, penulisan ini juga bertujuan menunjukkan kontribusi MP, yang secara langsung di bawah pengelolaan Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta, dalam konteks pemberdayaan dan pengembangan masyarakat Muslim di bidang-bidang pendidikan selama setengah abad.

Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memungkinkan seluruh proses penelitian, penulisan, dan publikasi buku berjalan sesuai rencana. Pertama, ucapan terima kasih tentu saja harus ditujukan kepada Ketua Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta yang memberikan kepercayaan kepada tim penulis. SK Ketua Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi kunci untuk membuka pintu dalam membuka komunikasi dengan sumber-sumber yang dibutuhkan dalam penulisan. Kedua, ucapan terima kasih dan apresiasi kami sampaikan kepada Prof. Dr. Dede Rosyada, MA dan Prof. Dr. Husni Rahim, MA yang berkenan menulis Prolog dan Epilog yang memberikan kekuatan argumen yang dibangun dalam penulisan buku ini. Ketiga, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada nara sumber yang memberikan informasi dan data yang dibutuhkan dalam rekonstruksi sejarah MP. Tanpa mengurangi rasa hormat dan terima kasih kepada nama-nama yang tidak disebutkan, mereka antara lain KH. Drs Kafrawi Ridwan, Drs. H. Elman Sadri, H. Poernomo, BA, Drs. H. Tarmizi Tanjung, Drs. H Sukiman AR, Dra. Hj. Wilda Rahma, Dra. Hj. Siti Muttaqinati, Drs. H. Abdul Wadud, Drs. H. Madrawan Subadri, M. Pd, Drs. Hj. Raswati Romli, Dr. Hj. Farida Hamid, M. Pd, Dr. H. Ahmad Sofyan, M. Pd, Eny Supriyati Rasyidatun, S.Si., MA, Jalaludin, M. Pd, Drs. H. Tamani dan Yayah Robiah, S. Pd.

Buku ini pasti tidak sempurna, masih terdapat ruang-ruang sejarah yang tidak terisi. Karena itu, masukan, koreksi dan saran untuk perbaikan untuk kesempurnaan buku ini sangat diharapkan dari pembaca.

Semoga buku bermanfaat bagi masyarakat pembaca dan dapat menjadi inspirasi bagi praktisi pendidikan dalam mengembangkan lembaga pendidikan Islam yang unggul.

Jakarta, Agustus 2023
Tim penulis

Kata Pengantar

Ketua Yayasan Syarif Hidayatullah

Madrasah dalam Lintasan Sejarah Pendidikan Islam Indonesia

Nomenklatur Madrasah dalam tataran historis, memiliki makna dan fungsi berbeda dalam sejarah institusi kelembagaan di Indonesia. Jika Madrasah dalam tataran sejarah kemunculan lembaga pendidikan Islam, menurut Michel Stanton, bermakna Lembaga Pendidikan Tinggi, Institut bahkan universitas, seperti Madrasah Nidhamiyah di Baghdad dan Persia, maka di Indonesia terjadi perubahan makna dan fungsi menjadi lembaga pendidikan Dasar dan Menengah, seperti Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah, bahkan Madrasah Diniyah.

Perubahan makna dan fungsi ini berimplikasi besar dalam sistem pendidikan di Indonesia. Terlebih setelah pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan kebijakan, Ordonansi Pendidikan pada 1925. Kebijakan ini membuat sistem pendidikan menjadi dua atau dualisme sistem Pendidikan di Indonesia, satu sistem pendidikan yang berorientasi pada pendidikan umum, dan satu lagi sistem pendidikan Agama. Dualisme sistem pendidikan, sebagai akibat kebijakan ordonansi tersebut, terjadi hingga saat ini yang melahirkan dua kementerian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama. Masing-masing Kementerian membawahi pendidikan sekolah, dan

satu lagi pendidikan Madrasah.

Dalam perkembangan berikutnya, saat Kementerian Pendidikan semakin kuat dan lebih fokus pada pendidikan umum, maka Kementerian Agama, mulai menata ulang perhatiannya dalam pengembangan pendidikan agama. Madrasah mulai diberdayakan bahkan diperkuat, terutama pada saat Mukti Ali menjadi Menteri Agama. Ia mulai membuat kebijakan dengan banyak mendirikan madrasah, salah satunya mendorong pendirian madrasah yang kemudian dikenal Madrasah Pembangunan (MP). Meskipun memiliki ikatan kultural dengan IAIN Jakarta sejak pertama kali dirikan pada 1974, secara struktural MP merupakan lembaga yang berdiri sendiri dengan bentuk relasi yang dinamis dengan kampus. Sekarang ini, MP, yang berada di tanah negara, memiliki relasi dalam bentuk sewa lahan dengan UIN Jakarta. Lepas dari soal administratif itu, MP terus berkembang sebagai madrasah mandiri di dinaungi Yayasan—yang terdiri dari dosen UIN Jakarta.

Buku *Madrasah Pembangunan (MP) Dalam Lintasan Sejarah Pendidikan Islam Indonesia 50 Tahun* menerbar ilmu dan akhlak mulia ini, merupakan satu upaya akademik, untuk melacak sejarah MP yang ditulis oleh para pengelola MP Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penulisan ini dianggap penting dilakukan untuk memberikan sejumlah informasi penting kepada publik, baik pihak UIN Jakarta maupun masyarakat umum, terutama yang menjadi *stakeholders* MP Syarif Hidayatullah Jakarta. Semoga informasi yang disampaikan dalam buku ini bermanfaat buat para pembaca budiman dan para akademisi yang melakukan riset tentang MP.

Terakhir, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada tim penulis yang sudah berusaha maksimal dalam menarasikan informasi terkait sejarah Madrasah Pembangunan (MP) Jakarta.

Semoga usaha tim penulis menjadi jariah buat mereka, Amin.

Jakarta, Agustus 2023
Wassalam,

Daftar Isi

Kata Pengantar Tim Penulis—**i**

Kata Pengantar Ketua Yayasan—**iii**

Daftar Isi —**v**

Prolog :

Kontribusi Perguruan Tinggi Agama Islam pada
Peningkatan Kualitas Pendidikan Madrasah
Prof. Dr. Dede Rosyada, MA—**vii**

Pendahuluan—**1**

Bagian I: Konteks Sosial Pembangunan

BAB 1

Periode Awal Pembangunan: Menyalakan Api Perjuangan—**9**

BAB 2

Konsolidasi Kelembagaan—**27**

BAGIAN II : Eksistensi dan Kehadiran MP

BAB 3

Aktor di Balik Struktur: Mencatat Program dan Kinerja—**41**

BAB 4

Best Practices Pendidikan: Distingsi dan Keunggulan MP —**65**

BAGIAN III: Dinamika Pendidikan dan Sosial Kelembagaan

BAB 5

Menapaki Era Madrasah Digital —**91**

BAB 6

Kepak Sayap Terbuka: Menatap Peluang Masa Depan —**101**

EPILOG

Madrasah Pembangunan dalam Lintasan Sejarah Pendidikan
Islam Indonesia —**109**

Daftar Pustaka—**131**

Lampiran-lampiran—**135**

PROLOG

Kontribusi Perguruan Tinggi Agama Islam pada Peningkatan Kualitas Pendidikan Madrasah

Prof. Dr. Dede Rosyada, MA

Pengantar

Dengan keragaman latar belakang penduduk yang menjadi cikal bakal bangsa Indonesia, maka pendidikan di Indonesia memiliki perjalanan sejarah yang unik. Salah satunya adalah sistem pendidikan madrasah yang berkembang di kalangan masyarakat muslim saat ini.

Pada awalnya institusi madrasah berkembang di kalangan muslim pedesaan yang tidak terjangkau oleh sistem pendidikan “sekolah” yang dikembangkan pemerintahan Hindia Belanda. Madrasah merupakan bentuk akhir proses metamorfosis pendidikan pesantren yang diinisiasi dan dikembangkan para ulama tradisional. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan dakwah untuk masyarakat Nusantara, serta memberikan layanan pendidikan keagamaan di mesjid-mesjid, yang antara lain, dengan menyiapkan kamar-kamar di sekeliling mesjid untuk para pelajar beristirahat, menginap, dan bahkan menetap untuk jangka waktu tertentu. Pelajar tersebut, kemudian dinamai santri.¹

¹ Menurut Nurcholis Madjid, ada dua pendapat mengenai kata santri. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa kata santri berasal dari perkataan “sastri” yang merupakan sebuah kata dari Bahasa sansekerta yang mempunyai makna “melek huruf”. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan bahwa kata santri sebenarnya berasal dari kata “cantrik” yang merupakan Bahasa jawa yang berarti seseorang yang selalu mengikuti guru kemanapun pergi dan menetap. Sedangkan menurut Zamakhsyari Dhofier, kata santri dalam Bahasa India mempunyai arti orang yang mengetahui tentang buku-buku suci agama hindu atau ahli kitab suci agama hindu. Secara umum dapat mencakup buku-

Pendidikan Islam dan pendidikan umum berkembang bersamaan dengan berkembangnya dakwah para Wali Sembilan (dikenal sebagai “Wali Songo”) di tanah Jawa. Pada saat itu, satu-satunya lembaga pendidikan yang tersedia bagi masyarakat di Pulau Jawa adalah pesantren. Lalu setelah Belanda datang dan melakukan penguasaan sumber-sumber ekonomi melalui penguasa lokal, kemudian banyak dari elite kekuasaan tersebut terkoneksi pada peradaban Eropa dan mengakses pendidikan modern di negara-negara maju, khususnya Belanda. Proses itulah yang melahirkan kelompok sosial dengan kontribusi besar pada masyarakat Nusantara lewat ide-ide nasionalismenya. Bersamaan dengan itu, lahir pula kebijakan pelayanan pendidikan untuk masyarakat Bumi Putra di awal abad ke-20, sehingga sistem pendidikan sekolah, model Sekolah dan ala Belanda berkembang di Indonesia.

Kehadiran sistem sekolah dengan kurikulum modern dan relevan dengan kebutuhan pasar kerja yang tersedia di pabrik-pabrik pengolahan hasil hutan dan pertanian, serta di perkebunan-perkebunan besar, dan kantor-kantor pemerintahan serta berbagai institusi lain, membuat sistem sekolah ini sangat menarik masyarakat Pribumi. Untuk itulah sebagian masyarakat muslim yang punya akses pada pemerintahan, mengembangkan sistem pendidikan sekolah, sehingga para alumninya bisa masuk pasar kerja. Karena kepentingan itu pula sebenarnya, para ulama mencoba mentransformasikan pendidikan pesantren pada model pendidikan sekolah. Sistem yang ditransformasi tersebut yang kemudian populer menjadi pendidikan madrasah.

Hanya saja, pesantren tidak sepenuhnya mampu mentransformasikan sistem sekolah tersebut, khususnya dalam kurikulum, buku teks serta para pengajar, karena akses pada pemerintahan Hindia Belanda, sangat terbatas.

Maka dari itu, momentum sangat penting dalam konteks pendidikan madrasah adalah kemerdekaan. Presiden memenuhi

buku suci, buku-buku agama ataupun buku-buku tentang ilmu pengetahuan. Nurcholis Madjid, *Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan* (Jakarta: Paramadina, 1977), Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kiyai*, (Jakarta: LP3ES. Cet I, 1982)

permintaan para ulama untuk mendirikan Departemen Agama dengan salah satu tugasnya membina dan mengembangkan pendidikan pesantren dan madrasah ini, sehingga di awal paruh ke-2 abad ke-20 ini, sudah berdiri Pendidikan Tinggi Agama Islam, sebagai wujud pengembangan pendidikan kedinasan, yang mengemban dua mandat: menyiapkan guru Agama Islam di sekolah serta menyiapkan imam bagi tentara.²

Bersamaan dengan itu, madrasah yang berkembang di pesantren terus bertransformasi, dan memperoleh momentum terpentingnya di tahun 1975, dengan lahirnya Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri: Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri, tentang peningkatan mutu pendidikan madrasah. Sejak itu, madrasah diakui sama dan sejajar dengan sekolah oleh pemerintah. Bersamaan dengan itu pula, Departemen Agama, memiliki pendidikan tinggi, sebagai perubahan pendidikan kedinasan menjadi pendidikan umum. Karena lembaga ini tidak saja merekrut calon pegawai Kementerian Agama, juga dimaksudkan untuk berkontribusi pada berbagai kepentingan lain di bangsa ini, termasuk penyiapan guru pada madrasah, serta melakukan pembinaan kualitas madrasah secara umum.

Peran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam Pembinaan Madrasah

Terdapat tiga prioritas agenda pembinaan madrasah hari ini, yakni: akses, kualitas dan relevansi. Ketika kebijakan ini kemudian dijalankan sudah terasa hasilnya. Hal ini bisa dilihat baik pada infrastruktur, SDM pendidik dan tenaga kependidikan, dan bahkan kurikulum serta bahan ajar. Hanya satu tentang pembinaan dan peningkatan kualitas yang masih terus menjadi perhatian pemerintah. Hal ini dikarenakan tantangannya selalu berkembang, baik dalam konteks lokal, regional maupun global.

Oleh sebab itu, dengan mengacu pada standar pendidikan, titik krusial di madrasah yang harus terus dikembangkan, dievaluasi dan

2 Suwito, Perubahan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta Menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, bahan yang disampaikan pada acara Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI tanggal 19 Juni 2002.

dilakukan reformulasi adalah pada standar isi, standar kompetensi lulusan, dan juga standar proses. Selain itu, guru sendiri sebagai pendidik, yang harus terus dikembangkan *skill* serta keahliannya dalam pengembangan strategi pembelajaran serta alat dan teknologi pendidikan. Ketiga standar di atas harus menjadi fokus bersama.

Pemerintah sudah menyiapkan anggaran yang cukup rasional dan juga proporsional untuk pengembangan *skill* dan ketrampilan tersebut, yang kemudian difasilitasi oleh Direktorat KSKK (Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan) serta Direktorat GTK (Guru dan Tenaga Kependidikan). Akan tetapi tugas dan fungsi pemerintah terbatas pada fasilitasi, karena keahlian profesi, tidak selalu tersedia pada lingkungan birokrasi.

Demikian pula dengan BRIN (Badan Riset Nasional) sebagai institusi penelitian dan pengembangan yang dimiliki pemerintah, tidak selalu dapat memenuhi kebutuhan keahlian yang dibutuhkan madrasah, terutama dalam pengembangan mutu proses dan hasil pendidikan dan pengajaran. Oleh sebab itu, jejaring tiga institusi madrasah, perguruan tinggi keagamaan Islam, dan Direktorat KSKK serta GTK dari Kementerian Agama, seharusnya bisa bersinergi dalam proses pembinaan madrasah, baik dalam penemuan model kurikulum, strategi pembelajaran, alat dan bahkan pemberdayaan budaya madrasah. Hal ini untuk memastikan adanya jaminan tercapainya target kualitas yang sudah disepakati antara sekolah dengan seluruh stakeholder di sekelilingnya, baik *owner*, pengguna maupun pelanggan madrasah.

Sebagaimana diketahui bahwa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) memiliki banyak sumber daya dosen dan mahasiswa, yang secara regulatif memiliki kewajiban tugas dan fungsi melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian pada masyarakat. Sehingga kegiatan penelitian yang merupakan tugas dan kewajiban dosen bersinergi dengan madrasah, akibatnya akan menghasilkan dua keuntungan besar: temuan baru berupa teori, teknologi atau model pendidikan dan pembelajaran, serta perbaikan dan peningkatan kualitas madrasah berbasis data empiris capaian kemajuan. Sehingga perubahan akan bereskalasi secara dialektis terhadap capaian dan kemajuan yang telah dicapai madrasah.

Para dosen sendiri memang memiliki kewajiban pelaksanaan Tridharma PT. Salah satunya adalah pengabdian pada masyarakat, yang idealnya dilakukan dan dikembangkan berbasis keahlian program studinya. Jika paradigma ini dikembangkan dan dilaksanakan dengan baik serta konsisten, maka kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan dosen bisa dikolaborasikan dengan dinamika pada madrasah.

Tantangan madrasah yang patut didampingi para dosen saat ini adalah digitalisasi proses pembelajaran. Bagaimana para guru menyiapkan bahan ajarnya secara digital, dan diunggah di *website* madrasah, sehingga para siswa bisa mengakses dan bahkan mengunduh bahan-bahan tersebut kapan saja.

Melihat berbagai signifikansi di atas, maka para dosen PTKIN bisa melakukan program pengabdian di madrasah, dengan mengembangkan berbagai agenda sebagai berikut:

1. Melakukan pelatihan para guru untuk menyiapkan bahan ajar bagi para siswa dan mengunggahnya di *website* madrasah, dan ada baiknya masing-masing guru dibekali domainnya masing-masing.
2. Melakukan pelatihan para guru untuk meningkatkan ketrampilan dalam mengembangkan proses pembelajaran, khususnya pembelajaran yang berpusat pada siswa, serta pembelajaran yang juga bisa mengembangkan imajinasi dan kreatifitas siswa.
3. Melakukan pelatihan para guru tentang mengembangkan instrumen evaluasi yang akuntabel, dan dapat memberikan penjelasan obyektif pada orang tua siswa dengan capaian-capaian yang telah dapat dilalui para siswanya.

Akan sangat baik, jika pelatihan-pelatihan tersebut didasarkan pada hasil penelitian para dosen, sehingga mereka juga bisa memperkaya pokok bahasan di kampusnya dengan menambahkan hasil penelitian yang sudah diujicobakan dalam kelas-kelas empirik, dan membawa berbagai perbaikan yang signifikan. Selain itu, sudah wajar kalau kemudian hal ini diajarkan pada para mahasiswa di program studi di PTKIN.

Kolaborasi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Madrasah

Pendidikan termasuk salah satu sektor yang diotonomisasikan dalam regulasi tentang pemerintahan daerah. Dengan perspektif kemandiriannya ini justru berada di satuan pendidikan, bukan pada pemerintah daerah lewat dinas-dinasnya. Dengan demikian, maju atau mundurnya sebuah sekolah atau madrasah tergantung pada kehandalan manajemennya masing-masing. Maka dari itu setiap satuan pendidikan memerlukan mitra kerjasama untuk membina dan mengembangkan kualitas layanan pendidikan dan pengajarannya pada seluruh siswa.

Posisi kantor dinas atau kantor wilayah dari pemerintah pusat, hanya melaksanakan tiga fungsi pemerintah dalam sektor pendidikan, yakni: (1) penyediaan sarana dan prasarana, (2) infrastruktur dan (3) Sumber Daya Manusia (SDM), baik pendidik maupun tenaga kependidikan. Hal-hal lain tentang kurikulum, pengembangan proses pembelajaran, penilaian, penetapan waktu belajar, serta pengembangan alat pembelajaran, semua diserahkan pada satuan pendidikan.

Salah satu mitra strategis yang dimiliki madrasah adalah perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI/N) yang berada di daerah, di mana satuan pendidikan madrasah itu berada. Untuk kepentingan peningkatan, perbaikan dan terus memajukan institusi, madrasah perlu mitra kolaborasi dari PTKI/N, khususnya berbagai program studi yang berada dalam naungan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, baik dengan berbagai program studi keguruan, maupun ilmu pendidikan. Sementara PTKI/N sendiri memerlukan madrasah untuk kegiatan penelitian dan pengabdian, yang merupakan tugas utama seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Oleh sebab itu, keduanya harus aktif berkomunikasi, sehingga keduanya akan saling memperoleh manfaat.

Dosen-dosen fakultas tarbiyah dan keguruan PTKIN/S, sebaiknya mengembangkan penelitian dan pengabdian pada masyarakat, di madrasah-madrasah di mana PTKI itu berada. Dengan fokus pada pengembangan model kurikulum, pembelajaran, pengembangan alat pembelajaran, pemberdayaan budaya sekolah untuk penguatan pembinaan keagamaan dan karakter, serta mengimplementasikan

hasil penelitiannya itu juga di madrasah, agar kemudian madrasah memperoleh manfaat dengan berbagai perubahan dan kemajuan dalam rangka peningkatan mutu proses dan hasil pendidikan. Itulah bentuk kolaborasi yang simbiotik yang sekaligus program studi juga memperoleh kontribusi yang signifikan dengan pembaharuan dan penguatan bahan ajar, hasil penelitian dosen, yang sudah diujicobakan terbukti bahwa model, teknologi atau alat yang mereka temukan itu. Karena itu, Akan terdapat banyak manfaat untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas proses dan hasil belajar.

Begitu juga dalam aspek-aspek lainnya tentang madrasah, apakah manajemen, budaya sekolah, bahkan pola dan model pembinaan kualitas dan integritas guru, yang menjadi bagian paling krusial dalam peningkatan mutu madrasah, semua menarik untuk dijadikan ruang riset dan pengabdian para dosen.

Keuntungan lain kolaborasi PTKIN/S dengan madrasah, adalah hasil penelitian yang diujicobakan di madrasah tersebut bisa dipublikasikan dalam dua konteks berbeda. *Pertama* sebagai hasil penelitian dalam jurnal-jurnal penelitian, dan *kedua* sebagai hasil pengabdian pada masyarakat dalam jurnal pengabdian pada masyarakat. Di mana kedua-duanya selalu menjadi tagihan dalam evaluasi Lembaga Akreditasi Mandiri bidang Pendidikan (Lamdik), dalam rangka akreditasi.

Demikian pula bagi dosen yang melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat, di samping bisa menjadi bahan laporan kinerja dosen, juga bisa menjadi portofolio untuk kenaikan pangkat akademik. Kolaborasi PTKI dan Madrasah merupakan kerja sama simbiotik yang kedua-duanya memperoleh manfaat. Oleh sebab itu, pembiayaan kegiatan tersebut, bisa menjadi pembiayaan bersama, karena kedua-duanya memperoleh manfaat dari aktivitas tersebut.

Di luar itu, madrasah juga bisa mengembangkan kolaborasi dalam bentuk kegiatan *upgrading*, pelatihan, tutorial atau apa pun bentuknya, yang dapat meningkatkan kompetensi guru, baik dalam penguasaan bahan ajar, inovasi kurikulum dan pembelajaran, serta pengembangan media dan alat bantu belajar. Begitu juga pengembangan instrumen evaluasi, baik tes maupun non tes, atau digitalisasi bahan ajar baik

berbentuk modul atau bahan bacaan tambahan bagi para siswa yang bisa diunggah di internet, sehingga siswa bisa mengunduhnya kapan saja dan di mana saja. Mereka bisa belajar kapan saja dalam waktu senggang mereka.

Hal ini dimungkinkan karena muncul dan berkembangnya semua ide inspiratif, skil dan kemampuan tersebut, memerlukan proses interaksi. Salah satunya dalam bentuk kolaborasi antar dosen-dosen PTKI dengan guru-guru madrasah, sehingga kemajuan madrasah tidak harus menunggu kehadiran pemerintah, tapi justru datang dari inisiatif sendiri, dengan kekuatan sendiri, dan bahkan dengan pembiayaan mandiri.

Dampak Kolaborasi PTKI-Madrasah

Kolaborasi PTKI-Madrasah akan menjadi substitusi ideal setelah pengurangan tanggungjawab pemerintah dalam pembinaan pendidikan. Untuk praktiknya, kolaborasi ini hanya dibatasi pada tiga aspek, sarana dan prasarana, pembiayaan dan penyiapan sumber daya manusia guru dan tenaga kependidikan. Hal ini sesuai aturan yang menyertai kebijakan otonomi daerah. Dengan kolaborasi tersebut, madrasah menjadi tidak teralienasi, bahkan memiliki mitra untuk melakukan pembinaan ke dalam, dengan memaksimalkan peran dan fungsi perguruan tinggi yang memiliki *mindforce* untuk diberdayakan oleh madrasah.

Dengan demikian implikasi yang akan sangat cepat terasa adalah eskalasi kualitas madrasah, sesuai dengan tantangan perkembangan sosial sekarang dengan terbukanya pasar tenaga kerja dalam zona regional ASEAN, dan Asia Pasifik. Untuk bisa memasuki peluang-peluang tersebut, walaupun mungkin mereka akan masuk pasar tenaga kerja setelah menyelesaikan pendidikan jenjang S1 atau D3, D4, tapi setidaknya modal pengetahuan, dan kesiapan psikologis sudah tertanamkan sejak pendidikan jenjang sekolah menengah, atau setingkat Madrasah Aliyah (MA). Untuk itu, para dosen, harus bisa membantu para guru untuk mempersiapkan para siswa untuk memasuki pasar regional dengan setidaknya empat Kompetensi yang sangat urgen, yakni: (1) *Critical Thinking*, (2) *Creativity and Innovation*, (3) *Communication*, (4) *Collaboration*.

Bagaimana proses pembelajaran yang bisa menghasilkan empat (4) kompetensi tersebut, perlu dibahas, dikembangkan dan dirancang model pembelajarannya. Untuk itulah, guru madrasah perlu berdiskusi dan merancang desain bersama-sama dengan para dosen PTKI, sehingga madrasah *leading* dalam penyiapan SDM ke depan, dengan model kurikulum serta proses pembelajaran yang akan menghasilkan 4C tersebut.

Kalau model kolaborasi PTKI-Madrasah itu berhasil dilaksanakan, dan madrasah lebih unggul dari sekolah lain dalam penyiapan SDM untuk memasuki era globalisasi, maka ekspektasi masyarakat pada madrasah akan meningkat, dan *image* madrasah juga akan berubah secara eskalatif, seiring dengan produktifitasnya dalam melakukan perubahan dan inovasi kurikulum, yang dilakukan secara kolaboratif antara guru madrasah dan dosen PTKI. Itulah dampak yang akan langsung terasa oleh madrasah.

Demikian pula dengan PTKI, dosen-dosen program studi keguruan dan Ilmu Pendidikan, akan dipaksa oleh program kolaborasi tersebut, untuk bisa memahami pedagogi yang membebaskan dan membawa perubahan yang eskalatif dalam proses pembelajaran, untuk menghasilkan para alumni dengan skil dan ketrampilan global, dan bisa diterima di masyarakat global. Jika dosen-dosen PTKI adalah dosen-dosen yang cerdas, kreatif dan inovatif, maka espektasi masyarakat terhadap PTKI juga akan meningkat. Itulah dampak langsung dari kolaborasi PTKI-Madrasah, baik untuk institusi sekolah/madrasah maupun untuk PTKI sendiri.

Tantangan dan Peluang

Peluang untuk mengembangkan program kolaborasi antara PTKI dan Madrasah itu terbuka sangat lebar. Karena arah regulasi tentang pendidikan saat ini, justru memosisikan sekolah/ madrasah itu diberi kemandirian, walaupun masih sangat terbatas. Dengan demikian, madrasah dituntut untuk memiliki mitra strategis dalam pengembangan kolaborasinya itu, sehingga madrasah terus dalam dinamika inovasi, dan akan terus meningkatkan kualitas proses dan hasil belajarnya. Sehingga madrasah akan memperoleh *trust* dari

masyarakat. Madrasah dengan kolaborasi yang aktif dan dinamis, pasti akan banyak memperoleh manfaat untuk melakukan perubahan dalam mewujudkan cita dan citra madrasah berkualitas kini dan esok.

Demikian pula dengan PTKI, peluang pengembangan kolaborasi PTKI-madrasah sangat besar dan terbuka sangat lebar. Hal ini dikarenakan di perguruan tinggi, ada kewajiban dosen untuk melakukan pengabdian pada masyarakat. Khusus untuk berbagai program studi pendidikan dan keguruan, mitra kerja sama untuk pelaksanaan tugas pengabdian pada masyarakat adalah madrasah, dalam aspek pendidikan dan pengajaran, bukan di mesjid, posyandu atau di kantor-kantor pemerintahan. Oleh sebab itu, ketua program studi, harus mencari dan memiliki linkage dengan madrasah untuk para dosennya melakukan tugas pengabdian pada masyarakat, dengan berbagai program yang dapat meningkatkan kualitas madrasah, baik dalam proses pembelajarannya maupun hasil belajar para siswanya.

Akan tetapi, tantangannya adalah datang dari dalam diri sendiri. Para dosen dan bahkan juga ketua program studi, sering mendefinisikan pengabdian pada masyarakat itu adalah membantu ibu-ibu menimbang bayi di Posyandu, padahal tidak relevan dengan bidang ilmu dan keahlian.

Terkadang juga pengabdian pada masyarakat didefinisikan dengan Khutbah Jum'at atau mengajar *ngaji* di majelis taklim, padahal itu bukan *core* keilmuan dosen keguruan dan ilmu pendidikan. Anehnya lagi, berbagai kegiatan tersebut, ketika diajukan dalam Laporan Kinerja Dosen (LKD), diakui sebagai kegiatan pengabdian pada masyarakat. Jadi sudah terjadi kesalahan pendefinisian pengabdian pada masyarakat secara massif, dari mulai pimpinan fakultas dan program studi, para dosen, dan juga asesor LKD, yang sudah dilatih oleh kementerian. Pada akhirnya kesalahan tersebut kemudian menjadi sebuah kebenaran, yang menghalangi lahirnya pemahaman baru yang jauh lebih bermanfaat dan sesuai dengan filosofi pengabdian pada masyarakat. Demikian pula dengan guru dan pimpinan madrasah, mereka tidak pernah berpikir untuk memberdayakan para dosen dalam meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan juga ketrampilan para guru, dengan memanfaatkan dosen PTKI yang ada di wilayahnya.

Solusi terbaik adalah, mari semua terbuka dengan pemahaman baru yang lebih konstruktif tentang kolaborasi PTKI-Madrasah, dengan mengeksplorasi peluang pada kewajiban dosen untuk melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat agar dilakukan di madrasah, bersama guru madrasah. Adapun isunya bisa tentang persoalan-persoalan madrasah, untuk peningkatan mutu madrasah. Sedangkan metodenya bisa dengan melakukan berbagai inovasi perbaikan, pada kurikulum, pembelajaran, *tool of learning*, digitalisasi madrasah, manajemen pembelajaran, dan bahkan pemberdayaan budaya sekolah untuk penguatan hasil belajar PAI dan pendidikan karakter. Jika PTKI terbuka, dan madrasah juga terbuka, dan keduanya melakukan kolaborasi dalam berbagai aspek pendidikan dan pengajaran, maka perbaikan mutu madrasah secara berangsur akan bereskalasi dan produktifitas ilmiah para dosen PTKI secara berangsur juga akan meningkat.

Penutup

Skema kolaborasi PTKI-Madrasah untuk Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sudah dikembangkan dengan menjadikan posisi Madrasah Pembangunan (MP) sebagai "lab school" FITK dan bahkan sudah dimasukkan dalam statuta MP. Akan tetapi, ekspektasi FITK terhadap posisi MP sebagai "lab school" berfluktuasi, sehingga program penelitian dan pengabdian pada masyarakat, yang dilakukan dosen FITK, berjalan kurang produktif.

Sebagai "lab-school", sejatinya FITK harus menjadikan MP sebagai tempat untuk mengujicobakan teori atau kebijakan yang sudah ditetapkan pemerintah, dan digunakan di madrasah, sampai ketemu format implementasinya. Bahkan FITK sebaiknya juga menggunakan MP sebagai tempat mengujicobakan temuan-temuan teori yang belum tervalidasi secara empirik, sehingga teorinya itu kemudian akan tervalidasi secara empirik, dan dapat digunakan di MP, DKI Jakarta, kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten atau bahkan di Indonesia. Kolaborasi ini, belum terlihat antara FITK dengan MP sebagai "lab-school"nya.

Sebagai "lab school", MP berhak meminta bantuan pada FITK

untuk memberikan pelatihan bagi pada guru, baik dalam konteks peningkatan penguasaan bahan ajar, ketrampilan pengembangan strategi dan teknik pembelajaran, pengembangan *tool of learning*, dan bahkan dalam program digitalisasi madrasah. Jika hari ini, masing-masing masih berjalan sendiri-sendiri, maka ke depan kolaborasi FITK-MP harus direvitalisasi, sehingga keduanya bisa saling mengambil manfaat.

Ciputat, Juni 2023

Pendahuluan

The muslim educational system is the master institution in the perpetuation of Islamic tradition and the creation of Islamic society, as well as the locus of the most serious present efforts to modernize that tradition and that society.

Clifford Geertz (1965)

Terletak di Kecamatan Ciputat, tepatnya Kelurahan Pisangan, lokasi MP (Madrasah Pembangunan) sebenarnya tidak istimewa. Akan tetapi, letak geografis MP yang dikelilingi kampus Islam termuka, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menjadikan MP sebagai satu di antara sedikit madrasah di Indonesia yang berada di lingkungan strategis kampus. Sekarang ini praktis MP di kelilingi FEB (Fakultas Ekonomi dan Bisnis), FK (Fakultas Kedokteran), FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Politik), Fakultas Adab dan Humaniora, Fakultas Psikologi, dan pusat-pusat penelitian di lingkungan kampus UIN Jakarta. Letak geografis ini paling sedikit membawa tiga keuntungan bagi MP. Pertama, menjadikan *atmosphere* akademik melingkupi kehidupan pembelajaran di MP setiap hari. Kedua, membuka cakrawala imajinasi siswa MP—apalagi ditambah dengan stimulasi dari guru—dalam membangun mimpi dan motivasi untuk tekun belajar agar dapat melanjutkan pendidikan pada level yang lebih tinggi. Ketiga, secara berkelanjutan mendapatkan inspirasi untuk berkreasi dan berinovasi dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Secara historis—dan terus berlanjut sampai periode kontemporer ini—MP memang memiliki *attachment* dengan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Disebut *attachment* karena memang keterikatan itu tidak

bersifat struktural, tetapi lebih pada ikatan kultural yang sangat kuat. MP digagas dan didirikan para sarjana Muslim yang berprofesi sebagai dosen di IAIN Jakarta dengan dukungan birokrasi Kementerian Agama pada waktu itu. Pada perkembangannya, SDM (Sumber Daya Manusia) MP—mulai dari tenaga kependidikan sampai dengan guru—mayoritas merupakan alumni UIN Jakarta. Dan *last but not least*, MP dikelola dan dikembangkan oleh sebuah yayasan yang terdiri dari para dosen UIN Jakarta—dan sebagian mereka adalah para profesor. Tidak berlebihan jika muncul persepsi di kalangan masyarakat yang melihat MP sebagai “madrasah laboratorium” (lab school) UIN Jakarta. Lab school merupakan konsep yang belakangan kembali populer yang menunjuk pada sekolah unggulan atau bermutu.

Sebagai lembaga pendidikan Islam, MP memiliki sejarah perkembangan menarik. Pertama, dari segi nama yang menyandang nomenklatur “madrasah”. Pilihan yang diambil *founding fathers* MP untuk menggunakan nomenklatur madrasah dapat dipastikan bukan tanpa alasan. Pertama, jika dikaitkan dengan eksperimen pendidikan Islam yang dilakukan para aktor pembaharu pendidikan Islam Indonesia sejak awal abad ke-20, kebanyakan mereka lebih cenderung menggunakan nama “sekolah” daripada “madrasah”. Terdapat nama-nama seperti Adabiyah School (1909) dan Diniyah School (1925) di abad lalu, bahkan nama “sekolah Islam” kemudian lebih populer untuk menunjuk pada lembaga pendidikan Islam modern yang unggul dan bermutu dibandingkan nama madrasah. Pilihan madrasah, untuk MP—bukan Sekolah Pembangunan—jelas menggambarkan sebuah idealisme yang tertanam kuat di kepala para pendiri MP, tentang cita-cita pengembangan madrasah sebagai lembaga pendidikan yang juga unggul dan bermutu yang berkontribusi pada pembangunan bangsa.

Kedua, madrasah merupakan nama lembaga pendidikan khas Islam—yang tertanam kuat dalam sejarah Islam sejak abad pertengahan Islam—di mana *tafaqquh fi al-din* (memahami ilmu-ilmu Islam) merupakan komponen terpenting di dalamnya. Memiliki akar kata *d-r-s* yang berarti “belajar”, madrasah secara bahasa berarti “tempat untuk belajar”. *D-r-s* juga memiliki pengertian “latihan” atau “pelajaran” dan “membaca atau mempelajari sesuatu secara berulang-ulang

sehingga hafal". Demikian variatifnya pengertian madrasah dalam bahasa Arab, kata madrasah dapat merujuk kepada "tempat di mana nasehat-nasehat keagamaan dan pembelajaran diselenggarakan". Dalam konteks modern, madrasah kemudian dipergunakan untuk menunjuk lembaga pendidikan mulai dari tingkat dasar dan menengah, termasuk lembaga pendidikan untuk mempelajari baca-tulis al-Qur'an dan menghafal ayat-ayat pendek yang populer dipergunakan dalam ibadah shalat yang biasanya beroperasi di sore hari (Moosa, 2015).

Dengan memilih nomenklatur madrasah, maka dapat diasumsikan bahwa MP, meskipun kemudian akan mengalami perkembangan pesat sebagai madrasah modern, unggul dan bermutu, tetap mempertahankan dan memelihara komponen *tafaqquh fi al-din* sebagai watak dasarnya. Hal ini antara lain dikonfirmasi Anshari, dalam tesis magisternya di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam tesis berjudul *Pendidikan Berorientasi Akhlak Mulia di Madrasah Pembangunan UIN Jakarta (2012)*, Anshari menemukan komitmen MP untuk menjadi madrasah unggul dengan mengembangkan akhlak mulia. Hal ini tercermin dalam kurikulum dan praktik pembelajaran dan keteladanan yang dilakukan para guru. Dengan demikian, watak dasar madrasah—sebagai lembaga pendidikan Islam yang memiliki akar sejarah panjang—tetap dipelihara MP dengan segala inovasi yang telah dilakukannya.

Dilihat dari konteks waktu didirikan, yaitu pada 1970-an, madrasah di Indonesia sebenarnya tidak dalam posisi yang sedang diuntungkan kebijakan pemerintah. Meskipun bukan berarti pemerintah tidak melakukan upaya meningkatkan mutu madrasah, harus diakui bahwa madrasah Indonesia sendiri sejak periode kolonial Belanda sampai awal Orde Baru boleh dikatakan mengalami marginalisasi. Kebijakan pemerintah sejak awal kemerdekaan diarahkan untuk *mainstreaming* sekolah umum, dan menempatkan madrasah sebagai lembaga pendidikan kelas dua—dengan perhatian yang secukupnya. Diskusi yang berlangsung di kalangan perumus sistem pendidikan nasional pada awal kemerdekaan, yang menghasilkan UU Sistem Pendidikan Nasional 1950, menunjukkan alotnya perdebatan ketika membahas posisi madrasah dalam konteks sistem pendidikan nasional (Kam

Hing, 1995). Meskipun pada akhirnya madrasah diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan yang memiliki akar kuat di Indonesia dan keberlangsungannya harus dijaga, pertanyaan tentang kualifikasi dan dorongan *mainstreaming* mata pelajaran umum di madrasah masih merupakan ganjalan pada waktu itu.

Meskipun demikian, penting juga ditegaskan situasi dunia Islam pada dekade 1970-an yang boleh dikatakan monumental. Dekade itu, yang dalam hitungan kalender Hijriyah memasuki abad ke-15, diharapkan akan menjadi “abad kebangkitan Islam” oleh seluruh umat Islam di dunia. Pada dekade itu, beberapa peristiwa di dunia Islam memang patut dicatat. Antara lain penerapan syari’ah Islam di Pakistan dan Libya, munculnya gerakan oposisi di Mesir dan Turki, dan menggeliatnya gerakan Islam di Filipina Selatan. Momentum paling berpengaruh adalah peristiwa revolusi Iran yang terjadi pada 1979, tepat di akhir akhir dekade. Di samping aktivitas yang bersifat politis, di kalangan kaum terpelajar Muslim juga tumbuh kesadaran yang bersifat intelektual dan sosial, bahkan kehidupan yang bersifat personal. Pada tataran intelektual, untuk menyebutkan contoh dari Indonesia, lebih spesifik lagi dari UIN Jakarta, dua tokoh pantas disebutkan. Pertama, Profesor Harun Nasution dengan pemikirannya yang inklusif tentang Islam yang antara lain tercermin dalam buku teks yang ditulisnya, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, yang pertama kali terbit pada 1974. Kedua, Nurcholish Madjid (Cak Nur) yang menyampaikan pidato “Keharusan Pembaharuan Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi Umat” yang disampaikan di TIM (Taman Ismail Marzuki) pada 3 Januari 1970. Karena kuatnya pengaruh kedua tokoh itulah UIN Jakarta kemudian dikenal sebagai “Kampus Pembaharuan Islam”. Meskipun tidak dapat dipungkiri adanya aspek-aspek kontroversial dari gagasan-gagasan kedua tokoh tersebut. Pada tataran sosial-keagamaan, juga berdiri lembaga-lembaga Islam seperti MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang didirikan pada 1975, juga mulai marak pengajian-pengajian di masjid-kampus kampus terkemuka di Indonesia seperti ITB (Institut Teknologi Bandung) dan UGM (Universitas Gajah Mada). Sedangkan pada tataran personal adalah mulai maraknya jilbab bagi Muslimah di kota-kota besar Indonesia. Pendeknya, gairah kebangkitan Islam mulai semarak

pada awal 1970-an dan seterusnya di Indonesia.

Diletakkan dalam konteks itu, perjalanan MP sebagai lembaga pendidikan Islam akan terlihat sebagai perjalanan yang tidak bisa dipisahkan dengan semangat kebangkitan Islam, dalam konteks pengumpulannya dengan ide-ide baru tentang madrasah dan kebijakan politik pemerintah. Dimulai dengan madrasah ibtidaiyah pada saat didirikan, MP kini telah menjelma menjadi madrasah integratif yang menawarkan pendidikan tingkat ibidaiyah (dasar), tsanawiyah (menengah), dan aliyah (atas). Bahkan sudah ekspansi dengan mendirikan SDIT (Sekolah Dasar Islam Terpadu) di Kota Pamulang, Tangerang Selatan, berdekatan dengan Universitas Pamulang. Tidak kalah penting untuk disebutkan di sini adalah perkembangan paling akhir yang dilakukan MP setelah pandemi Covid-19. Mengambil pelajaran pada masa pandemi Covid-19, di mana pembelajaran *online* menjadi satu-satunya pilihan yang tersedia sehingga penggunaan teknologi pembelajaran berbasis internet menjadi masif, MP melakukan inovasi pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran berbasis digital dengan merenovasi kelas tradisional menjadi kelas pintar (*smart class*) berbasis teknologi modern. Rekaman perjalanan panjang MP tersebut tidak hanya akan menarik, tetapi juga penting didokumentasikan. Apalagi jika dihitung, perjalanan MP sampai sekarang ini juga sudah mencapai setengah abad. Paling tidak, rekaman perjalanan MP akan membawa manfaat internal dalam pengertian sebagai *lesson learn* bagi *stakeholder* internal untuk merumuskan pengembangan MP di masa depan yang sejalan dengan kemajuan ilmu dan teknologi; di samping itu juga akan membawa manfaat eksternal dalam pengertian sebagai model pengembangan lembaga pendidikan Islam madrasah yang dapat dijadikan rujukan untuk pengembangan lembaga serupa di tempat lain.

Rekaman sejarah MP ini dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber yang relevan dan solid. Pertama, dilakukan wawancara dengan sebagian *founding fathers* yang masih hidup, para direktur pada periode sebelum sekarang, dan yang tidak kalah penting adalah para pengelola Yayasan Syarif Hidayatullah. Kedua, menggali dokumen-dokumen yang penting dan relevan bagi perkembangan

MP, terutama pada periode awal pendiriannya. Meskipun dokumen tersebut sebagian besar tidak diarsipkan dengan baik, sebagian di antaranya dapat ditemukan dan dijadikan sumber dalam rekonstruksi sejarah MP ini. Ketiga, observasi perkembangan MP dengan melihat secara langsung proses pembelajaran, dokumen kurikulum, dan dokumen lain yang relevan. Dengan pendekatan yang memanfaatkan berbagai sumber tersebut, diharapkan rekonstruksi sejarah MP ini dapat memberikan gambaran komprehensif tentang MP.

Rekonstruksi sejarah MP ini terbagi menjadi empat bagian besar. Bagian pertama, adalah pendahuluan yang menjelaskan tentang argumen pentingnya penulisan sejarah MP dan sumber-sumber yang dipergunakan dalam proses rekonstruksi. Di dalamnya juga disebutkan sedikit tentang konteks sosial dan historis madrasah, termasuk MP. Bagian kedua, menyajikan konteks sejarah dan sosial pembangunan dan perkembangan MP, termasuk di dalamnya adalah konteks sosial, idealisme, dan cita-cita yang ingin diwujudkan dengan pendirian MP. Bagian ini terbagi dalam dua bab: Bab I Periode Awal Pembangunan, Menyalakan Api Perjuangan, yang berisi deskripsi tentang pendirian MP dan aspek sosial keagamaan yang menjadi latar belakangnya. Bab II Konsolidasi Kelembagaan yang mendeskripsikan tentang pergulatan MP untuk memperkuat eksistensinya sebagai lembaga pendidikan yang unggul dan bermutu.

Bagian kedua, Eksistensi dan Kehadiran MP, juga terdiri dari dua bab. Bab III, Aktor Di Balik Struktur, Mencatat Program dan Kinerja mendeskripsikan tentang aktor-aktor yang secara langsung memberikan warna dan pengaruh terhadap perkembangan MP dari tingkat yayasan sampai tingkat manajemen pengelola. Bagian ini juga menyinggung konsep madrasah terintegrasi dengan pendekatan manajemen satu atap. Bab IV *Best Practice* Pendidikan, Distingui dan Keunggulan, memberikan gambaran tentang perjuangan MP untuk menjadi madrasah unggul dan bermutu dengan memiliki ciri khas dibandingkan dengan lembaga pendidikan Islam lain. Bagian ini sekaligus menunjukkan *best practices* MP yang sekaligus dapat dijadikan sebagai rujukan dalam pengembangan lembaga pendidikan serupa. Selanjutnya, bagian ketiga Dinamika Pendidikan

dan Sosial Keagamaan yang juga berisi dua bab. Bab V Menapaki Era Madrasah Digital, memberikan gambaran tentang upaya inovasi paling belakangan yang dilakukan MP dalam beradaptasi dengan perkembangan baru pembelajaran yang disebut dengan *digital learning*. Sedangkan Bab IV Kepak Sayap Terbuka: Menatap Peluang Masa Depan, bercerita tentang strategi yang dikembangkan MP dalam menghadapi tantangan eksternal dan internal dan sikap kreatif dan inovatif—dengan tetap berpegang teguh pada penanaman nilai dalam proses pembelajaran—dalam menyongsong masa dengan optimis.

Tidak kalah penting untuk disebutkan adalah Prolog yang ditulis Prof. Dr. Dede Rosyada, MA yang pernah menduduki posisi Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2005-2009; 2009-2011), Direktur Perguruan Tinggi Islam Kementerian Agama (2011-2014), dan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2015-2019). Prolog dengan judul “Kontribusi Perguruan Tinggi Agama Islam pada Peningkatan Kualitas Pendidikan Madrasah” secara tidak langsung merupakan refleksi atas pengalaman UIN Jakarta—melalui Yayasan Syarif Hidayatullah—dalam pengelolaan MP. Dari pengalaman tersebut, diperoleh sebuah pelajaran menarik. Madrasah di masa depan akan semakin unggul dan berkualitas jika terintegrasi—atau memiliki *network* kerja sama—dengan kampus Islam. Atau secara lebih spesifik, dari pihak madrasah: siap menjadikan dirinya terbuka dengan eksperimen baru bekerja sama dengan Fakultas Tarbiyah PTKI (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam) di Indonesia. Dari pihak PTKI: siap menjadikan setiap madrasah di sekitarnya sebagai laboratorium pembaharuan pendidikan Islam dalam konteks Tridharma Perguruan Tinggi. Dengan pola kerja seperti ini, madrasah di Indonesia akan mengalami kemajuan, unggul dan bermutu.

Selanjutnya adalah Epilog yang ditulis Prof. Dr. Husni Rahim, MA, yang pernah menjabat Direktur Madrasah dan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Islam—sekarang Dirjen Pendidikan Islam—Kementerian Agama. Prof. Husni Rahim menuliskan perjalanan panjang institusi madrasah dalam menjaga eksistensinya berhadapan dengan kebijakan pemerintah Indonesia, baik pada masa Kolonial Belanda maupun Setelah Kemerdekaan sampai dengan pertengahan Orde

Baru yang boleh dikatakan “kurang ramah” terhadap pesantren dan madrasah. Dalam konteks perjuangan madrasah itu, Prof. Husni Rahim memosisikan MP sebagai madrasah yang cukup jeli dalam memilih strategi pengembangannya. Aspek-aspek pengembangan strategis yang dicatat dan mendapat apresiasi dari Prof. Husni Rahim adalah: penguatan lembaga, pembinaan SDM guru dan tenaga kependidikan, dan pengembangan sarana dan prasarana. Ketiganya, menurut Prof. Husni Rahim, dilakukan dengan ritme dan keseimbangan yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu dan teknologi.

Bagian I:

Konteks Sosial Pembangunan

BAB 1

Periode Awal Pembangunan: Menyalakan Api Perjuangan

Pengantar

MP memiliki latar belakang menarik. Dia lahir tepat pada masa di mana sedang terjadi pergumulan antara kebijakan pemerintah tentang madrasah di satu sisi, dan kemunculan ide-ide baru tentang modernisasi madrasah Indonesia di sisi lain. Sebagaimana digambarkan dalam pendahuluan, dan secara lebih rinci akan dibahas di bagian ini, pendirian MP seolah-olah memanfaatkan momentum pergumulan itu sehingga mendapatkan kesempatan mengimplementasikan kebijakan pemerintah—dalam hal ini Kementerian Agama—pengembangan madrasah, khususnya berkaitan dengan SKB Tiga Menteri tentang kurikulum 70% untuk mata pelajaran umum dan 30% untuk mata pelajaran Agama. Statusnya sebagai madrasah swasta juga menjadikan MP memiliki kelenturan dalam manajemen dan finansial yang akhirnya mengantarkan MP menjadi salah satu madrasah favorit di selatan Jakarta.

Bagian ini akan menceritakan latar belakang kelahirannya diletakkan dalam konteks Ciputat dan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 1970-an. Selanjutnya, juga dibahas tentang posisinya dalam konteks politik kebijakan Kementerian Agama, dan pilihan nama yang dipergunakannya. Perkembangan yang lebih belakangan juga

akan mendapatkan porsi pembahasan pada bagian akhir. Dengan penggambaran seperti itu, bagian diharapkan berhasil menampilkan potret MP secara komprehensif.

Panggung di Pinggiran Jakarta

Ciputat pada 1970-an termasuk wilayah yang tergolong pinggiran. Berada tepat di perbatasan antara Jakarta-Kabupaten Tangerang, Kecamatan Ciputat, masuk wilayah Provinsi Jawa Barat. Meskipun terdapat kampus IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, akses jalan menuju Ciputat tidak dapat dikatakan baik. Tidak mudah mendapatkan gambaran Ciputat pada waktu itu. Akan tetapi, pengalaman mahasiswa IAIN Jakarta yang pada waktu itu dapat dijadikan rujukan untuk memberikan gambaran sepintas tentang Ciputat. Salah seorang mahasiswa menuliskan, “waktu itu Ciputat memang terasa jauh dari Jakarta. Bukan hanya administrasi pemerintahan Ciputat di luar Jakarta, tetapi jalan dari Jakarta menuju Ciputat juga tidak baik”.³ Mahasiswa yang lain menulis, “saya tinggal di Kampung Utan dan tempat yang saya tinggali dekat dengan kandang kerbau. Waktu itu Ciputat masih berlumpur, sehingga di musim hujan kami harus melepas sepatu dan menggulung celana ke gedung IAIN yang juga masih sangat sederhana”.⁴

Boleh dikatakan bahwa perkembangan Ciputat tidak terpisahkan dari keberadaan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Seperti diketahui, Kementerian Agama mendirikan ADIA (Akademi Dinas Ilmu Agama) pada akhir 1950-an yang dimaksudkan sebagai tempat mendidik tenaga birokrasi di Kementerian Agama. ADIA selanjutnya diperluas cakupan kajian akademiknya dan diubah statusnya menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) pada 1960 di Jakarta dan Yogyakarta. Inilah yang kelas dikenal sebagai dua IAIN tertua yang dapat dikatakan sebagai model kampus Islam yang tersebar di seantero Nusantara. Sampai pada dekade 1960-an, IAIN hanya memiliki ratusan mahasiswa

3 Muh. Salim Umar, “Kenangan Indah di Ciputat”, dalam Rusydi Zakaria dkk. (ed.), *Membangun Perkaderan Intelektual, Setengah Abad HMI Cabang Ciputat* (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2012), h. 29.

4 A.M. Fatwa, “Catatan Awal Berdirinya dan Dinamika aktivis HMI Cabang Ciputat” dalam Rusydi Zakaria dkk. (ed.), *Membangun*, h. 9.

dan umumnya masih mengandalkan dosen-dosen dari kalangan pesantren, sarjana Indonesia lulusan Timur Tengah, dan lulusan IAIN sendiri.⁵

Keberadaan dan perkembangan kampus IAIN Jakarta ini tidak terpisahkan dari pendirian MP. Hal ini karena sebagian mahasiswa ADIA/IAIN pada waktu itu merupakan mahasiswa ikatan dinas yang sudah berumur, dengan profesi awal sebagai guru, dan pada umumnya mereka juga tinggal di Komplek Perumahan yang berlokasi di seberang jalan depan kampus. Ini misalnya dengan jelas ditulis A.M. Fatwa, salah seorang mahasiswa IAIN waktu itu, katanya, “untuk diketahui bahwa sebagian besar mahasiswa IAIN masa itu rata-rata sudah berumur, karena mereka direkrut dari guru agama sekolah menengah yang berasal dari daerah-daerah”.⁶ Dapat dikatakan bahwa beberapa mahasiswa pada periode awal IAIN rata-rata adalah keluarga muda, yang sebelumnya berprofesi sebagai guru, dan sebagai implikasinya—di mata mereka—pendidikan pra-sekolah dan pendidikan dasar menjadi penting.

Anak-anak dosen pada waktu itu, pada umumnya menempuh tingkat pendidikan dasar di SDN (Sekolah Dasar Negeri). Seorang anak dosen—yang kelak menjadi dosen dan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta—yang antara 1965-1975 besar di lingkungan perumahan dosen bercerita bawah pada usia TK dia belajar di TK di dalam perumahan dosen, tetapi kemudian TK itu “pindah ke lokasi RS Syahida sekarang yang berhadapan dengan kampus”.⁷ Untuk pendidikan dasar, pilihannya adalah “SD Legoso... yang berlokasi di kawasan Asrama Putra UIN Jakarta sekarang. Tapi karena lokasi sekolah akan dimanfaatkan untuk fasilitas IAIN pada waktu itu, maka SD Legoso dipindahkan ke Jalan Legoso”. Sebagian murid, terutama anak-anak dosen, kemudian pindah ke SDN Situ Gintung II Pagi di Rempoa yang lebih favorit.⁸ Jelas tergambar bahwa pada 1970-an itu tidak terdapat lembaga pendidikan jenis madrasah di lingkungan IAIN Jakarta. Sementara,

5 Jabali dan Jamhari, *IAIN dan Modernisasi Islam*.

6 A.M. Fatwa, “Catatan Awal”, h. 5.

7 Amany Lubis, *Autobiografi Amany Lubis: Namaku Harapan* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2019), h. 13-15.

8 Amany Lubis, *Autobiografi Amany Lubis*, h. 15.

sebagaimana telah disinggung, sebagian dosen tersebut membangun karier akademiknya dari profesi sebagai guru madrasah.

Lahir di Tengah Pergumulan

Dengan latar seperti itu, inisiatif para dosen untuk mendirikan madrasah seperti tinggal menunggu waktu yang tepat saja. Apalagi secara institusional, pimpinan IAIN Jakarta juga memberikan dukungan, terutama karena dimotivasi keinginan memiliki madrasah yang dapat dijadikan sebagai tempat praktikum bagi mahasiswa fakultas tarbiyah. Indikasi dukungan itu nyata karena panitia pembangunan madrasah—yang kelak jadi MP—dibentuk Rektor IAIN Jakarta, Prof. Dr. Toha Yahya Omar (Rektor IAIN Jakarta 1970-1973). Dapat dikatakan terdapat dua dorongan sekaligus bagi pendirian MP. Pertama, kebutuhan akan pendidikan dasar madrasah bagi anak-anak dosen.⁹ Kedua, kebutuhan fakultas tarbiyah akan madrasah sebagai semacam “lab school”. Pada Juni 1972, bertepatan dengan Lustrum ke-3 IAIN Jakarta, dilakukan peletakan batu pertama pembangunan MP oleh Menteri Agama Prof. Dr. Mukti Ali, yang dilantik menjadi Menteri Agama setahun sebelumnya, 11 September 1971. Hadir pada waktu peletakan batu pertama adalah para dosen senior IAIN Jakarta, antara lain Prof. Drs. H. Soenardjo Abu Ngusman, Kafrawi Ridwan, Prof. Ardani, dan para dosen muda lain, serta tentu saja Prof. Dr. Toha Yahya Omar selaku rektor.¹⁰ Pembangunan gedung diselesaikan selama kurang lebih setahun. Pada 11 November 1973 gedung madrasah diserahkan dari Pimpinan Bagian Proyek Pembinaan Bantuan untuk Madrasah Swasta Pemda DKI Jakarta kepada pihak IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada Tahun Ajaran 1974, MP mulai menerima murid baru. Menurut sumber yang tersedia, jumlah siswa MP pada saat itu sebanyak 58 siswa, yang terbagi ke dalam Kelas 1 MI sebanyak 48 siswa, Kelas 1 MI sebanyak 8 siswa dan Kelas 3 MI sebanyak 7 siswa. Kegiatan belajar mengajar dimulai pada 7 Januari 1974 yang kemudian ditetapkan sebagai “hari kelahiran” MP.

Situasi lembaga pendidikan madrasah sendiri pada waktu

9 Wawancara Prof. Abudin Nata, MA, 27 November 2023, Pukul 13.00 di Jakarta.

10 Wawancara dengan Kafrawi Ridwan, 5 Oktober 2016.

itu, dalam konteks kebijakan pendidikan nasional, memang kurang menguntungkan, terutama dari aspek kesetaraannya dengan sekolah. Di dalam UU No. 12 Tahun 1954, ini merupakan undang-undang pendidikan pertama yang mejadi payung dan pedoman dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia,¹¹ dikatakan bahwa “beladjar di sekolah agama yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban beladjar”.¹² Meskipun demikian, pada pasal sebelumnya dinyatakan bahwa undang-undang yang ditetapkan itu, “tidak berlaku untuk pendidikan dan pengadjaran di sekolah-sekolah agama” yang “akan ditetapkan dalam undang-undang lain”.¹³ Menempatkan madrasah dalam bingkai regulasi yang berbeda, tetapi pada saat yang sama mengakuinya dalam konteks wajib belajar, pada perkembangannya kemudian seperti menanam benih dualisme sistem pendidikan nasional yang terus tumbuh dan dampaknya masih berlangsung belakangan ini. Meskipun demikian, kalangan Muslim pada umumnya merasa puas dengan regulasi ini karena mereka mempersepsi bahwa seandainya madrasah diletakkan di bawah Departemen Pendidikan, maka proses sekularisasi madrasah akan menemukan jalan, dan jelas jalan itu akan menggerogoti identitas madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam.

Regulasi berikutnya, yang mengejutkan kaum Muslim Indonesia, adalah Keputusan Presiden (Keppres) No. 34 Tahun 1972 dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 15 Tahun 1974. Jadi di tengah upaya Kementerian Agama memperkuat kelembagaan, manajemen, SDM dan mutu madrasah, keluarnya Keppres seperti itu mengejutkan dan mendapat respons negatif, baik kalangan Kementerian Agama sendiri dan kalangan tokoh-tokoh pendidikan Islam. Kementerian Agama sendiri, sejak awal berdirinya, mendiskusikan tentang tentang peningkatan mutu madrasah, termasuk porsi kurikulum antara ilmu

11 UU No. 12 Tahun 1954 secara substansial sama dengan UU No. 4 Tahun 1950; yang membedakan adalah yang mengesahkan. UU No. 12 Tahun 1954 disahkan Pemerintah RI dan disetujui DPR, sedangkan UU No. 4 Tahun 1950 diterima BPKNIP dan ditandatangani Mr. Asaat yang saat itu Presiden RIS Yogyakarta. Lihat Arief Subhan, *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad ke-20: Pergumulan antara Modernisasi dan Identitas* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012), h. 216.

12 Pasal 7, ayat 2, UU No. 12/1954.

13 Pasal 2, ayat 1 dan 2 UU. No. 12/1954.

pengetahuan keislaman dan ilmu pengetahuan dan isu kesetaraan antara madrasah dan sekolah umum. Oleh karena itu, keluarnya Keppres tersebut direspons secara negatif. Keppres pertama tentang “Tanggung-Djawab Fungsional Pendidikan dan Latihan”. Dalam Keppres itu disebutkan bahwa pendidikan dan pelatihan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sama sekali Keppres itu tidak menyebutkan Menteri Agama. Sedangkan Inpres No. 15/1975 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1972 berisi semacam petunjuk teknis pelaksanaan Keppres. Kedua regulasi tersebut semakin menambah dan memperkuat kesan negatif Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di mata kaum Muslim. Regulasi tersebut direspons kalangan Muslim dengan melakukan berbagai upaya agar dipertimbangkan lagi, dan jika mungkin tidak diberlakukan.

Sebagai solusi terhadap perkembangan tersebut sekaligus sebagai terobosan penting lembaga pendidikan Islam madrasah, pemerintah—dengan inisiatif dari Menteri Agama—menerbitkan SKB (Surat Keputusan Bersama) Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri, atau yang dikenal dengan SKB Tiga Menteri No. 6 Tahun 1975 dan No. 037/U/1975. Dalam SKB Tiga Menteri tersebut ditetapkan bahwa (1) agar madrasah dalam semua jenjang mempunyai ijazah yang sama nilainya dengan dengan ijazah sekolah setingkat, (2) agar lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat atau lebih tinggi, (3) agar siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat, maka kurikulum yang diselenggarakan madrasah harus terdiri dari 70% mata pelajaran umum dan 30% mata pelajaran agama.¹⁴ Kebijakan ini merupakan terobosan karena dengan demikian: pertama, madrasah akan semakin terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional karena memiliki kualitas setara sekolah—sekaligus merupakan pembuka jalan bagi terwujudnya integrasi sistem pendidikan nasional di kemudian hari. Kedua, madrasah akan mengalami transformasi menjadi lembaga pendidikan modern dan memberikan kontribusi SDM bermutu untuk

¹⁴ Ali Munhanif, “Prof. Dr. A. Mukti Ali: Modernisasi Politik-Keagamaan Orde Baru,” dalam Azyumardi Azra dan Saiful Umam (ed.), *Menteri-Menteri Agama RI: Biografi Sosial-Politik* (Jakarta: INIS, PPIM, Litbang Depag, 1998), h. 314.

mendukung proses pembangunan Indonesia.

Respons kaum Muslim terhadap SKB Tiga Menteri tersebut ternyata tidak sepenuhnya positif. Para ulama, ustadz dan pengelola pendidikan Islam, yang secara langsung mengelola madrasah dan pesantren, bahkan ada yang memberikan reaksi menolak SKB Tiga Menteri tersebut. Inti penolakan itu terletak pada kenyataan bahwa porsi mata pelajaran umum lebih besar dibandingkan dengan mata pelajaran agama. Menjawab itu, Menteri Agama mengatakan, “*Lha persoalan 70% dan 30% itu hanya ada dalam rumusan ide kita saja. Dalam praktiknya kan bagaimana kedua jenis mata pelajaran itu saling mengisi. Itu juga disetujui pak Syarif Thayib [Menteri Pendidikan dan Kebudayaan] dan Pak Amir Mahmud [Mendagri].*”¹⁵ Seperti diketahui, pada perkembangannya, SKB Tiga Menteri menjadi jalan lapang peningkatan kualitas madrasah Indonesia.

Dalam konteks diskusi dan perdebatan seperti itu, MP yang baru beroperasi selama setahun segera beradaptasi dengan menerapkan SKB Tiga Menteri. Posisi MP sebagai madrasah yang berada di lingkungan kampus Islam, dan inisiatornya yang sebagian merupakan kalangan birokrat di Kementerian Agama, menjadikan MP lebih memahami kebijakan SKB Tiga Menteri dan langsung berupaya menerapkannya. Kafrawi Ridwan, salah seorang inisiator, menjelaskan, karena cepat beradaptasi itu, MP kemudian berada dalam barisan terdepan yang menerapkan kebijakan tersebut dan menjadi semacam “madrasah percontohan” di lingkungan Kementerian Agama. Berkaitan dengan status MP yang swasta, Kafrawi Ridwan juga menegaskan bahwa sejak awal pendiriannya, MP memang diniatkan berstatus swasta agar memiliki kelenturan dalam mentransformasikan dirinya menjadi madrasah modern secara berkelanjutan.¹⁶

¹⁵ Ali Munhanif, “Prof. Dr. A. Mukti Ali”, h. 314.

¹⁶ Wawancara Kafrawi Ridwan, 5 Oktober 2016; wawancara Elman Sadri, Direktur MP tahun 1983-1990, pada 20 Mei 2022.



Gambar 1.1
Peletakan Batu Pertama Gedung Madrasah Pembangunan Tahun 1972

Pembangunan: Nama yang Sesuai Zaman

“Madrasah Pembangunan” (MP) merupakan penamaan yang tergolong unik. Perpaduan antara “madrasah” yang acapkali diasosiasikan dengan lembaga pendidikan berbasis-tradisi Islam dan “pembangunan” yang memiliki makna kemajuan (*progress*) dan modernitas (*modernity*). Muncul beberapa versi cerita—semuanya bersumber dari pendiri dan pelaku sejarah—berkenaan dengan pilihan nama “pembangunan”. Versi pertama menceritakan bahwa nama “pembangunan” dipakai karena pada 1971, setelah ditetapkan sebagai Presiden RI hasil Pemilu, Presiden Soeharto mencanangkan program pembangunan dalam tahapan-tahapan sistematis yang disebut dengan Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun). Sejak 1968, Presiden Soeharto sendiri menamakan kabinetnya dengan “Kabinet Pembangunan”, setelah sebelumnya, antara 1966-1968, menggunakan

sebutan “Kabinet Ampera”.

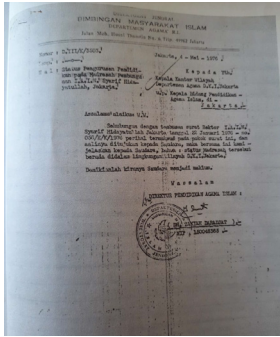
Versi kedua dikaitkan dengan program “pembangunan agama” yang dicanangkan Prof. A. Mukti Ali, dalam posisinya sebagai Menteri Agama sekaligus sebagai anggota “Kabinet Pembangunan”. Mukti Ali memang merumuskan konsep “pembangunan bidang agama” yang melingkupi sejumlah aspek kehidupan keagamaan di Indonesia. Salah satunya, yang tampak menonjol pada periode tersebut, adalah langkah-langkah mendekatkan antara Islam dan negara dengan mengeluarkan regulasi penting berkaitan dengan umat Islam. Dalam konteks inilah kemudian lahir UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Segera setelah disahkan undang-undang ini mendapatkan respons keras dari kaum Muslim. Baru setelah melalui pendekatan informal antara pemerintah dan tokoh-tokoh Islam, undang-undang tersebut dapat diterima. Selanjutnya adalah SKB Tiga Menteri yang telah disebutkan. SKB dengan Kemendagri No. 19 Tahun 1977 tentang Pengembangan Tilawatil Qur’an, fasilitasi forum-forum dialog antar umat beragama, dan sebagainya.¹⁷ Dapat disimpulkan bahwa regulasi pada periode Mukti Ali sebagai Menteri Agama telah membuka jalan bagi semakin terintegrasinya Islam dan negara Indonesia.

Versi ketiga diceritakan Elman Sadri, Direktur MP periode 1983-1990. Menurut Elman Sadri, nama “Pembangunan” dikaitkan dengan Program Pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada waktu itu, yaitu : Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP) berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0172/1971, salah satu program pemerintah—Menteri Pendidikan dan Kebudayaan—yang bertujuan meningkatkan mutu pendidikan dengan mengintegrasikan pendidikan tingkat menengah dengan pendidikan tinggi.¹⁸ Dalam surat keputusan tersebut disebutkan secara eksplisit tentang penunjukan Proyek Perintis Sekolah Pembangunan pada delapan IKIP (Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan) Negeri di seluruh Indonesia tertanggal 21 September 1971. Mempertimbangkan bahwa proyek tersebut terbatas pada sekolah, tampaknya latar belakang khusus mengapa kemudian sebuah madrasah ikut menggunakan nama “pembangunan”

17 Wawancara dengan Elman Sadri, 20 Mei 2022; lihat juga Ali Munhanif, “Prof. Dr. A. Mukti Ali”, h. 301.

18 Wawancara dengan Elman Sadri, pada 20 Mei 2022

masih harus dicari argumentasinya. Versi ini dikonfirmasi Abdul Chair, Kepala Kanwil Kementerian Agama DKI periode 2000-2002,¹⁹ meskipun dalam jejak langkah MP tidak ditemukan bentuk pembinaan langsung yang dilakukan IKIP Jakarta.



Lepas dari genealogi nama “pembangunan” yang melekat pada MP, pilihan nama tersebut, benar-benar sejalan dengan perkembangan zaman. Pada periode awal perkembangan MP itu, bangsa Indonesia—di bawah pemerintahan yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru—sedang bergairah melaksanakan program pembangunan sesuai dengan kerangka Repelita (Rencana Pembangunan Lima

Tahun) yang dicanangkan pemerintah. Seperti diketahui, periode sebelumnya Indonesia masih disibukkan aspek-aspek politik yang belum tuntas, konflik dengan negara jiran Malaysia, kudeta gagal, dan sebagainya. Sehingga masuk akal jika setelah Pemilu 1971, gairah pembangunan itu meningkat pesat. Apalagi secara konsep, program pembangunan (*developmentalism*) merupakan pilihan jalan paling rasional yang tersedia bagi negara-negara dunia ketiga setelah lepas dari kolonialisme.

Posisi Administratif

Sebagaimana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, MP juga dihadapkan pada masalah posisi administratif: karena letak geografisnya di Ciputat, Jawa Barat, apakah induk administrasi madrasah di bawah Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat, atau—sebagaimana IAIN Jakarta—ikut di bawah Kantor Wilayah Kementerian Agama Jakarta. Dihadapkan pada situasi tersebut, Rektor IAIN Jakarta kemudian bersurat kepada Kementerian Agama. Surat rektor bertanggal 22 Januari 1976, dan dijawab Dr. Zakiah Darajat, yang waktu itu menjabat sebagai Direktur Madrasah Kementerian Agama pada 4 Mei 1976.

¹⁹ Wawancara dengan Sukiman AR, Kepala MTs ke-2, Kamis 09 Februari 2023, jam 13.00-14.15 WIB

Dalam suratnya, Direktur Madrasah menetapkan bahwa MP berada di bawah administrasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Jakarta (Lihat Gambar). Surat tersebut ditindaklanjuti dan disosialisasikan melalui surat Drs. Mu'alimi, Direktur pertama MP, bertanggal 14 Juni 1976, perihal Pemberitahuan tentang Status Pembinaan Pendidikan. Posisi administratif tersebut masih berlanjut sampai sekarang. Implikasi posisi ini adalah MP dalam pembinaan sekaligus ijazah alumni dikeluarkan Kantor Kementerian Agama DKI Jakarta.

Dari surat dalam Gambar terlihat dengan jelas bahwa nama MP—Madrasah Pembangunan—sudah dipergunakan. Fakta ini sekaligus menegaskan bahwa sejak awal pendiriannya, kata “pembangunan” sudah melekat. Berdasarkan itu, dalam lampiran data madrasah pada Juni 1976 itu, terdapat nama sekolah Madrasah Pembangunan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan data sebagai berikut:

No.	Jenis	Keterangan
1.	Status Sekolah	Swasta
2.	Tahun Berdiri	1974
3.	Alamat	Kampus IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta
4.	Kedaaan Gedung	Permanen
5.	Jumlah Lokal	5
6.	Jumlah Kelas	5

(selengkapnya lihat lampiran)

Perluasan dan Perkembangan

Idealisme menjadikan MP sebagai semacam “madrasah laboratorium” bagi Fakultas Tarbiyah ditindaklanjuti dengan Keputusan Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada September 1974 yang berisi ketetapan pembinaan MP berada di tangan Dekan Dekan Fakultas Tarbiyah. Untuk memperkuat itu, pada 1978, atas upaya dari pengelola untuk meratakan jalan menuju kemajuan, MP mendapatkan kepercayaan dan mandat dari Kementerian Agama sebagai Madrasah Pilot Proyek Percontohan.²⁰ Dengan posisi ini, kemungkinan pengembangan SDM dan pengembangan materi pembelajaran menjadi terbuka lebar. Akan tetapi, sebagai madrasah

²⁰ Berdasarkan SK Dirjend Binbaga Islam No. Kep/D/03/1978.

percontohan, para pengelola MP juga memiliki tanggung jawab lebih dibandingkan sebelumnya.

Salah satu upaya pengembangan dalam konteks posisi baru itu adalah proyek pengembangan modul pembelajaran yang dapat diharapkan dijadikan rujukan madrasah lain. Berdasarkan itu, para pengelola—dengan melibatkan guru dan dosen IAIN Jakarta—menyelenggarakan pelatihan penulisan modul pembelajaran. Empat modul untuk bidang mata pelajaran berhasil diproduksi, yaitu mata pelajaran al-Qur'an, Hadits, Bahasa Arab, dan Bahasa Indonesia. Sebagai bentuk eksperimen, kemudian diterapkan pembelajaran sistem modul di MP dengan menggunakan modul-modul hasil karya para guru dan dosen tersebut. Belakangan juga dituliskan modul matematika dan penerapan modul tersebut—sekaligus bentuk eksperimen—dilakukan sampai dengan 1985.²¹

Pada 1977, mempertimbangkan kelanjutan pendidikan lulusan Madrasah Ibtidaiyah, dan pengembangan menjadi madrasah integratif yang tidak hanya menawarkan pendidikan dasar, para pengelola memutuskan untuk membuka madrasah tingkat menengah pertama, atau Madrasah Tsanawiyah (MTs). Pembukaan MTs merupakan langkah pertama pengembangan yang dilakukan pengelola MP sebelum merambah ke bidang-bidang lain—bahkan *in-line* dengan langkah pertama pengembangan tersebut, MP kemudian juga membuka Madrasah Aliyah (MA). Pada saat pertama kali dibuka, MTs MP memiliki 19 siswa sebagai angkatan pertama. Pada perkembangannya, peminat untuk belajar di MTs MP, terus mengalami peningkatan sejalan dengan semakin peningkatan mutu berkelanjutan yang diprogramkan.

Perkembangan pesat MI dan MTs MP tersebut segera menghadapkan para pengelola kepada masalah posisi kelembagaan. Pertama, jika pengelolaannya tetap di bawah Dekan Fakultas Tarbiyah, maka secara langsung akan menambah beban dekan karena harus memikirkan pengembangannya sekaligus melaporkannya kepada Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kedua, yang tidak kalah pentingnya, soal pertanggungjawaban keuangan juga dihadapkan pada dilema: apakah dilaporkan dan diperiksa Inspektorat Jenderal (Irjend) terintegrasi

21 Wawancara dengan Sukiman AR, Kamis 9 Februari 2023, pukul 13.00-14.15 WIB

dengan laporan fakultas, atau terpisah? Ketiga, pada saat yang sama, dekan juga harus memikirkan pengembangan Fakultas Tarbiyah, salah satu fakultas paling diminati dengan tawaran program studi/jurusan paling banyak. Keempat, dari perspektif status dan pengembangannya, MP membutuhkan fleksibilitas dan kemandirian dalam pengelolaan. Setelah melalui berbagai pertimbangan, Rektor mengambil keputusan untuk menyerahkan pengelolaan MP kepada Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta.²² Keputusan ini ditetapkan melalui SK Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor: 06 Tahun 1988.²³ Sejak saat itu, wewenang pembinaan dan pengelolaan MP berada di tangan yayasan yang meskipun secara kultural terikat dengan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, namun secara struktural dan kelembagaan terpisah. Boleh kiranya dikatakan bahwa yayasan sepenuhnya independen dalam pengembangan dan pengambilan kebijakan. Namun dia berada dalam lingkungan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Di bawah pengelolaan yayasan, pengembangan MP semakin pesat. Beberapa keputusan penting diambil untuk pengembangan. Antara lain, pada Juli 1991, MP membuka kelas jauh tingkat Madrasah Ibtidaiyah mulai kelas 1 sampai dengan kelas 3 di Pamulang, tepatnya di Komplek Perumahan Pamulang Permai. Pembukaan kelas jauh ini dilakukan untuk memenuhi aspirasi masyarakat Pamulang yang saat itu membutuhkan pendidikan tingkat dasar. Proyek ini dilakukan bekerja sama dengan Yayasan Al-Hidayah yang menyediakan sarana dan prasarana. Kebetulan yayasan tersebut telah mengelola TK dengan lokasi yang terintegrasi dengan masjid.²⁴

Pada Tahun Pelajaran 1991/1992 MP kembali membuat langkah strategis berikutnya dengan membuka Madrasah Aliyah (MA). Pada tahun pertama, sebanyak 32 anak tercatat sebagai siswa dengan rincian 10 anak laki-laki dan 22 perempuan. Ini dapat dikatakan sebagai MA Pembangunan tahap pertama. MA ini hanya beroperasi selama 4 tahun dan tidak menerima siswa lagi berkenaan dengan 22 Ditemukan dokumen yang bernama Yayasan Kesejahteraan Dosen dan Pegawai IAIN berkedudukan di Jakarta. Ini didirikan dosen dan karyawan pada 22 April 1964, jauh sebelum MP berdiri. Yayasan tersebut kemudian berubah menjadi Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta.

23 Kutipan SK Rektor No. 06 tahun 1988.

24 Wawancara dengan Sukiman AR, Kamis 9 Februari 2023, pukul 13.00-14.15 WIB

kebijakan Kementerian Agama tentang MA. Pada Tahun Pelajaran 1995/1996 diputuskan MA Pembangunan tidak menerima pendaftaran siswa baru lagi. Seluruh siswa yang tersisa sebanyak 31 siswa berhasil lulus pada Tahun Pelajaran 1996/1997.

Memasuki milenium ketiga, terjadi perubahan fundamental berkenaan dengan kelembagaan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Atas berbagai usaha para pimpinan, dengan dukungan Kementerian Agama, dan lembaga-lembaga lain yang terkait, IAIN mendapatkan mandat baru untuk melaksanakan pembelajaran bidang-bidang dalam ilmu pengetahuan umum. Dengan penambahan dan perluasan mandat tersebut, kelembagaan IAIN mengalami transformasi: dari IAIN menjadi UIN (Universitas Islam Negeri). Secara resmi transformasi itu diteken Presiden Megawati Soekarno Putri melalui SK Presiden RI Nomor 031 tanggal 20 Mei 2002. Bersamaan dengan terbitnya SK tersebut, UIN mempunyai visi baru yang disebut dengan integrasi keilmuan, yaitu membangun jembatan, mengaitkan, dan merumuskan konsep yang integratif antara ilmu pengetahuan dan teknologi dengan ilmu-ilmu keislaman. Dengan demikian, misi utama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah mendidik manusia Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Penting dicatat bahwa IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta merupakan institut pertama di Indonesia yang diberikan mandat sebagai universitas dengan nama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Perubahan tersebut pada akhirnya berpengaruh juga kepada MP. Sejak transformasi IAIN menjadi UIN itu MP juga kemudian mengalami perubahan nama dan dikenal dengan Madrasah Pembangunan UIN Jakarta.²⁵

Pada Tahun Pelajaran 2006/2007 atas dorongan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan banyaknya permintaan masyarakat, Madrasah Pembangunan UIN Jakarta kembali membuka tingkat Madrasah Aliyah. Jumlah siswa pertama yang diterima adalah 47 siswa terbagi dalam 2 rombongan belajar. Jumlah tersebut terus membesar pada tahun-tahun berikutnya. Tiga tahun kemudian, tepatnya pada akhir 2009, Madrasah Aliyah Pembangunan UIN Jakarta berhasil meraih prestasi dalam bentuk peringkat A dalam Akreditasi—peringkat yang

²⁵ UIN Syarif Hidayatullah, *Pedoman Akademik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2022.

bermakna unggul dan bermutu. Prestasi itu semakin membanggakan dan membawa rasa percaya diri karena setahun sebelumnya, pada 2008, Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Pembangunan UIN Jakarta ditetapkan sebagai Madrasah Standar Nasional oleh Kanwil Departemen Agama Provinsi DKI Jakarta.²⁶

Pada 2015 lahan MP yang berlokasi di Pamulang mulai dimanfaatkan. Lahan yang perolehannya melibatkan hibah dari wali murid MP itu, mulai dibangun gedung untuk pendidikan.²⁷ Yayasan mendorong didirikannya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Pamulang. Seluruh proses perijinan diurus dengan baik dan legal. Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan mengeluarkan SK Nomor: 421.1/Kep. 20153.1-Dikdas/2015 yang menandai legalitas Taman Kanak-kanak Madrasah Pembangunan (TKMP). Pada 2022 sejalan dengan pembangunan gedung sekolah Islam di area yang sama, yaitu Sekolah Dasar Islam Pembangunan (SDIP), Taman Kanak-kanak MP (TK MP) mengalami perubahan nomenklatur menjadi Taman Kanak-kanak Islam Pembangunan (selanjutnya ditulis: TKIP) sehingga selaras dengan hadirnya SDIP.²⁸ Dengan hadirnya sekolah Islam—yang satu induk dengan Madrasah Pembangunan—di Pamulang dari tingkat TK dan SD, maka kebutuhan masyarakat Pamulang dan sekitarnya akan lembaga pendidikan yang menjaga keseimbangan antara ilmu-ilmu keislaman dengan pengetahuan umum terpenuhi.²⁹

Tokoh-tokoh yang Berjasa dalam Pendirian MP³⁰

No.	Nama	Jabatan
1.	Prof. Dr. Mukti Ali	Menteri Agama RI (1971–1978)
2.	Drs. H. Kafrawi Ridwan, MA	Direktur Perguruan Tinggi Departemen Agama dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1973)
3.	Prof. H. M. Toha Jahya Omar	Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1970-1973)

26 Surat Keputusan Kanwil Departemen Agama DKI Jakarta, nomor: Kw.09.4/4/5/HK.005/2081/2008

27 Wawancara dengan Prof. Abudin Nata, MA, 27 November 2023, Pukul 13.00 di Jakarta.

28 Surat Keputusan Nomor 5.13/028/Teknis-Disdikbud/X/2020

29 Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor : 421.1/85-DPMPTSP/OL/2021.

30 Wawancara dengan Tarmizi Tanjung, Plt. Kepala MI tahun 1973-1975, Kamis 9 Februari 2023 (09.00-09.45).

4.	Prof. Dr. H. AR Partosentono	Wakil Rektor Bidang Akademik IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1970-1973)
5.	Drs. H. Husen Segaf, MA	Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1970-1973)
6.	Drs. H. Bakran Yakob	Ketua Jurusan Bahasa Indonesia Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1972)
7.	Drs. H. Agustiar, MA	Ketua Jurusan Pedagogik, Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1972)
8.	Drs. H.A. Muzakir	Kasubdit II Direktorat Pendidikan Departemen Agama (1972)
9.	Drs. H.M. Ali Hasan	Kepala Seksi Pembina Tenaga Guru dan Pengawas Subdit V Direktorat Pendidikan Agama Departemen Agama (1972)

Sosialisasi dan *Networking*

Sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya, pada saat pertama kali dibuka pada 1974 *total student body* untuk MI sebanyak 58 siswa, sedangkan untuk MTs—dibuka pada 1977—sebanyak 19 siswa. Untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat, para pengelola merancang program yang dapat disebut sebagai sosialisasi dan *networking*. Ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan minat masyarakat agar mengirimkan anak-anaknya belajar di MP.

Pada periode awal—dan terus berlanjut sampai sekarang—para pengelola berinisiatif merancang dan melaksanakan beberapa beberapa kegiatan sosialisasi dan *networking* untuk membangun kepercayaan masyarakat. Kegiatan tersebut terdokumentasi dengan ringkasan sebagai berikut:

No.	Nama Kegiatan	Waktu	Pelaksanaan
1.	Kordinasi	1980	Kunjungan ke Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan
2.	Sosialisai dan Promosi	1979-1980	Penampilan drama dan angklung dalam Siaran Aneka RIA Anak-anak Nusantara di TVRI; Lomba Cerdas Cermas di TVRI; Lomba Acara Ayo Menyanyi

			Kunjungan ke sekolah sekitar, yaitu MI Jamiatul Khair (Kp Utan), MI Yaspina (Rempo), MI Al-Akhyar (Pd Cabe), SD Legoso, SD Pisangan, MI Al-Huda, MI Al-Dinayah (Sasak Tinggi), MI Al-Ihsan (Komplek Depag Bambu Apus);
			Kunjungan ke Majelis Taklim di sekitar Ciputat;
3.	Inovasi dan Kreatifitas Model Pembelajaran		Update guru dan Tenaga Kependidikan dalam metode, mekanisme, dan pengelolaan kegiatan belajar-mengajar;
4.	Kegiatan Ekstrakurikuler Siswa		Kegiatan dilakukan di dalam sekolah, atau berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan di luar sekolah.
5.	Data dan Komunikasi Online		Memanfaatkan email secara maksimal untuk berkomunikasi dan kordinasi;
			Membentuk Pusat Sistem Informasi Dokumentasi dan Publikasi (SIDP); Unit ini memproduksi berbagai produk visual yang berfungsi memberikan informasi, dokumentasi, dan publikasi tentang MP secara komprehensif;
			Promosi lembaga dengan media digital;
			Menyediakan jaringan internet;
			Menggunakan Buku Ajar E-Modul;
			Menerapkan pembelajaran berbasis digital;
6.	Sarana dan Prasarana		Renovasi gedung dan pembangunan gedung baru;
			Pembangunan Gedung Administrasi Terpadu;
			Pembangunan Perpustakaan Terpadu yang Luas dan Nyaman;
			Menyediakan Ruang untuk Podcas yang nyaman;
			Ruang Kelas Multimedia dilengkapi papan tulis berupa Smart TV;
			Pergantian Meja Kursi
			Kelas Bilingual;

BAB 2

Konsolidasi Kelembagaan

Pengantar

Bagian ini akan memberikan gambaran tentang proses dan tahapan penguatan kelembagaan MP. Sebuah organisasi, apalagi berupa lembaga pendidikan, pada dasarnya hidup dalam suatu lingkungan yang kompleks dan dinamis yang selalu menghadapkan organisasi tersebut kepada masalah dan kesempatan (*problems and opportunities*). Masalah dan kesempatan itu tidak hanya terbatas kepada organisasinya sendiri, tetapi juga kepada individu di dalamnya, dan bahkan termasuk masyarakat sekitar. Para pengelola organisasi itu dituntut memahami lingkungan dengan baik yang akan mengantarkan organisasinya menjadi bernilai bagi masyarakat, melakukan inovasi, dan terus menjaga keberlangsungannya.

Diuntungkan oleh idealisme sebagai “madrasah laboratorium” Fakultas Tarbiyah IAIN Jakarta, MP tidak kekurangan ide pengembangan, baik pada tingkat organisasi-kelembagaan dan SDM guru, tenaga kependidikan, dan manajer. Fakultas Tarbiyah merupakan tempat di mana para calon guru mendapat pendidikan dalam dua aspek, yaitu aspek pedagogik dan materi pembelajaran. Dalam konteks ini, SDM guru dan tenaga kependidikan memiliki *resources* yang tidak tertandingi madrasah lain pada saat itu. Sebagian guru MP, seperti Elman Sadri

misalnya, yang menjabat Direktur MP Periode 1983-1991, memiliki pengalaman mengajar di Sekolah Islam Al-Azhar, Kebayoran Baru, yang tergolong elite dan modern pada masa itu. Pengalaman itulah yang kelak dibawa ke MP dengan inovasi baru.³¹ Pada aspek organisasi dan kelembagaan, pengalaman pimpinan dan dosen Fakultas Tarbiyah juga sangat kaya untuk berimajinasi tentang pengembangan MP. Bagian ini akan menunjukkan keputusan-keputusan strategis yang dibuat para pendahulu MP dalam pengelolaan kelembagaan. Antara lain pergulatan penyamaan visi dan cita-cita, berbagai dinamika dan pergulatan sehingga menjadi lembaga seperti sekarang ini, ragam inovasi dan proses KBM (Proses Belajar Mengajar) yang mendapatkan kepercayaan publik.

Manajer Operasional: Direktur

Mengorganisasi lembaga pendidikan madrasah—dasar, menengah, dan atas—yang berada di dalam lingkungan perguruan tinggi membutuhkan struktur yang tetap membuka wawasan dan kreativitas orang-orang di dalamnya. Struktur organisasi pertama dibentuk dengan sederhana oleh Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta segera setelah MP beroperasi. Rektor Prof. H. M. Toha Yahya Omar, pada waktu itu, secara langsung membentuk pengelola dengan menetapkan Kepala Madrasah yang diberikan kewenangan penuh, termasuk merekrut SDM guru. Namun setelah berjalan beberapa waktu, tepatnya awal September 1974, struktur organisasi mengalami sedikit perubahan dengan menempatkan struktur Pembina di atas Kepala Madrasah. Pembinaan MP diserahkan kepada Tim Pembinaan dengan Dekan Fakultas Tarbiyah, Drs. H. Agustiar (1974-1976) sebagai ketua.³²

Setahun kemudian, struktur organisasi kembali mengalami perombakan. Dibutuhkan seorang manajer menengah yang dapat menjembatani hubungan antara Tim Pembinaan dan Kepala Madrasah. Di samping itu, dia juga membuat rencana pengembangan MP dan menyetujui inovasi-inovasi yang dilakukan Kepala Madrasah.

31 Wawancara dengan Prof. Abudin Nata, MA, 27 November 2023, Pukul 13.00 di Jakarta.

32 Wawancara dengan Siti Muttaqinati, salah seorang guru MI Angkatan I, Senin 23 Mei 2022 (08.15-09.30)

Ini semua dilakukan untuk mempercepat kemajuan madrasah. Dalam kaitan ini kemudian ditambahkan struktur jabatan yang disebut sebagai Direktur MP. Pada 1975, Drs. Muallimi, seorang pendidik dengan pengalaman mengelola madrasah, ditetapkan sebagai Direktur Madrasah Pembangunan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang sekaligus menjadikannya sebagai direktur pertama MP.³³ Dengan adanya direktur, maka posisi Dekan Fakultas Tarbiyah hanya bersifat pengawasan.

Konsolidasi Lembaga

MP didirikan berdasarkan idealisme mengembangkan madrasah modern yang mempersiapkan anak didiknya memasuki dunia baru. MP lahir pada periode di mana madrasah di Indonesia sedang mengalami madrasah. Seperti diketahui, pada awal abad ke-20—yang sekaligus periode kebangkitan madrasah Indonesia—banyak Muslim mempergunakan “madrasah” sebagai simbol lembaga pendidikan Islam modern dengan ciri-ciri lembaga pendidikan klasikal, kurikulum terstruktur, ujian dirancang periodik, kenaikan kelas dan sertifikat sebagai tanda lulus. “Madrasah modern” merupakan hasil perjumpaan budaya (*cultural encounter*), antara tradisi pembelajaran dalam Islam—baik yang terlembagakan dalam madrasah tradisional maupun pesantren—dengan sekolah-sekolah modern yang datang bersama kolonialisme. Madrasah sebagai simbol modernitas segera mengalami diseminasi intensif di kalangan kaum Muslim melalui berbagai jalur gerakan-gerakan Islam, termasuk pesantren—yang kemudian menjadikan “madrasah” sebagai media transmisi ilmu-ilmu keislaman yang biasanya disampaikan secara tradisional. Tidak sedikit organisasi Islam yang mendirikan madrasah pada waktu itu.

Sejak awal, MP merupakan madrasah yang merumuskan dan mempraktikkan kurikulum yang disusun berdasarkan SKB Tiga Menteri secara konsisten. Dengan konsistensi tersebut—dan inovasi pembelajaran yang berlanjut—MP menjadi lembaga pendidikan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Islam di tengah

33 Wawancara dengan Siti Muttaqinati Senin 23 Mei 2022 (08.15-09.30), wawancara Sukiman, Kamis 9 Februari 2023

semangat modernisasi dan industrialisasi Indonesia. Kehendak untuk maju dan sejahtera, meninggalkan kondisi miskin, terbelakang, dan ketertinggalan di bidang ilmu dan teknologi, menjadi daya dorong yang kuat bagi pengelola MP untuk melakukan konsolidasi lembaga. Apalagi berdirinya MP pada tingkat tertentu merupakan bentuk ikhtiar pejabat dan intelektual di lingkungan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Kementerian Agama RI sekaligus.

Dalam konteks nasional, Kementerian Agama sendiri berusaha meningkatkan mutu madrasah dengan jalan berikut: membangun Madrasah Negeri, “menegerikan” madrasah swasta, dan menjadikan Madrasah Swasta yang sudah baik sebagai percontohan. Berkaitan dengan program “penegerian madrasah”, argumentasi yang ditemukan bersifat politis dan edukatif. Argumen politis itu berupa keprihatinan Kementerian Agama terhadap perkembangan suasana di Departemen Pendidikan yang dirasakan cenderung mengabaikan pendidikan Islam.³⁴ Pada periode 1967 sampai dengan awal 1970, kecurigaan tokoh-tokoh Muslim terhadap Departemen Pendidikan cukup tinggi. Pada periode tersebut dominasi kalangan sekuler dan Kristen di Departemen Pendidikan memang cukup besar. Tokoh-tokoh Muslim memperkirakan bahwa dalam jangka panjang porsi mata pelajaran Islam akan mengalami kemerosotan, baik di sekolah maupun madrasah. Oleh karena itu, “penegerian” madrasah pada umumnya mendapat sambutan positif. Sebab dengan posisi madrasah sebagai ‘bagian dari negara’, maka berarti pemerintah akan memberikan perhatian lebih besar kepada madrasah. Ini sekaligus menandai dimulainya pengelompokan ‘madrasah negeri’ dan ‘madrasah swasta’.

Argumentasi yang bersifat edukatif adalah madrasah negeri diproyeksikan menjadi model atau acuan bagi madrasah-madrasah swasta yang berlokasi di sekitarnya.³⁵ Kinerja madrasah negeri yang berkualitas—karena mendapatkan dukungan sepenuhnya dari Kementerian Agama—akan membawa efek positif bagi madrasah-madrasah swasta di sekitarnya. Pada saat itu belum terdapat ketentuan mengenai seberapa jauh jarak geografis dan berapa jumlah madrasah

³⁴ Lee Kam Hing, *Education and Politics in Indonesia 1945-1965* (Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 1995) h. 106.

³⁵ Lee Kam Hing, *Education and Politics*, h. 106.

swasta yang “menjadi binaan” sebuah madrasah negeri. Ini merupakan langkah strategis dalam konteks modernisasi madrasah dengan sumber pembiayaan yang terbatas. Sementara itu, madrasah swasta yang dijadikan sebagai percontohan seperti MP diharapkan akan menjadi rujukan mutu bagi madrasah swasta lain di sekitarnya yang tidak terjangkau Madrasah Negeri.

Proses penguatan kelembagaan ini dilakukan sejak periode awal MP dengan memperkuat SDM (Sumber Daya Manusia) lembaga. Hal ini dilakukan mulai dari penguatan struktur kepemimpinan sampai kepada seleksi terhadap tenaga pendidik dan kependidikan, serta seleksi terhadap calon siswa. Direktur MP, dalam hal ini, diberikan kewenangan, fleksibilitas, dan fasilitas yang dibutuhkan agar bekerja dengan maksimal. Bahkan pada waktu itu, Direktur MP difasilitasi rumah dinas di Perumahan Dosen IAIN. Direktur diberi kewenangan penuh mengelola Madrasah sampai pada tingkat pencarian dan penentuan besarnya biaya pendidikan bagi Madrasah Pembangunan.

Situasi itu menjadi pemicu Direktur MP untuk melahirkan kreativitas dan inovasi yang menjadikan MP terus maju dan sejalan dengan keinginan masyarakat. Pimpinan MP juga didukung oleh kualitas guru-guru yang baik. Guru-guru Madrasah Pembangunan diambil dari sarjana-sarjana terbaik IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, IKIP dan Perguruan Tinggi lainnya yang memiliki keunggulan akademik dan memiliki keterampilan khusus yang dibutuhkan, antara lain qiroat (membaca al-Qur’an dengan *tahsin*), Pramuka, serta olahraga dan seni. Dalam penerimaan murid baru, MP melakukan seleksi terhadap calon murid berupa seleksi tulis dan wawancara—terhadap calon murid dan calon wali murid.³⁶

Untuk melaksanakan proses pendidikan yang representatif, dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Dalam rangka memenuhi target fasilitas sarana dan prasarana yang memadai, MP melakukan pembangunan fisik, baik gedung tempat belajar, gedung pusat administrasi, perpustakaan, laboratorium, masjid, kantin, lapangan olahraga, taman, area parkir, sarana layanan bank, antar jemput untuk siswa, toko, koperasi bagi guru dan karyawan. Sarana

³⁶ Wawancara dengan Elman Sadri, 19 Februari 2023 (10.00-11.00 WIB)

prasarana ini sangat penting, sehingga kebutuhan siswa untuk proses pembelajaran di MP terpenuhi dengan baik. Sarana untuk wali murid juga disediakan, khususnya bagi wali murid yang akan menjemput anaknya disediakan tempat khusus gedung layanan dan ruang tunggu untuk orang tua/wali murid.

Pengembangan Lembaga: Madrasah Integratif

Pengembangan kelembagaan ini terus dilakukan secara berangsur-angsur, didukung dengan penyiapan sarana dan prasarana modern yang diperlukan. Penguatan ini dilakukan sebagai dukungan untuk menyukseskan visi dan misi lembaga. Pembangunan gedung untuk kelas, kantor, perpustakaan dilengkapi dengan laboratorium untuk sarana praktik-praktik dalam pembelajaran sesuai dengan bidang ilmu masing-masing terus dilakukan.

Di tengah proses pengembangan tersebut, TK Ketilang, yang sebelumnya terpisah secara kelembagaan, bergabung dengan Yayasan Syarif Hidayatullah. TK Ketilang pada awalnya dirintis dalam konteks kegiatan kemahasiswaan—senat mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada perkembangannya, karena kepengurusan senat berakhir, dibutuhkan pengelolaan yang lebih profesional. Bergabungnya TK Ketilang menjadikan MI Pembangunan mendapatkan calon siswa potensial. Karena berada di bawah yayasan yang sama, lulusan TK Ketilang dapat diterima langsung dan diprioritaskan di MP.

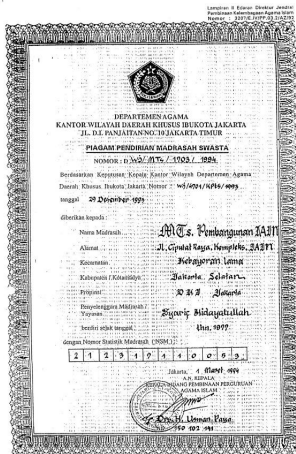
Madrasah Ibtidaiyah (MI) Pembangunan

MI merupakan cikal bakal MP secara umum. Beroperasi sejak 1974 dengan jumlah siswa sebanyak 58 orang, sekarang ini MIP (Madrasah Ibtidaiyah Pembangunan) telah menjadi salah satu madrasah favorit di Ciputat dan sekitarnya. Meskipun kompetitornya semakin banyak, posisi MIP sebagai pilihan kalangan kelas menengah Muslim untuk menyekolahkan anaknya tetap dalam posisi atas. MIP hanya dibuka di lokasi di Ciputat. Pada 1991 MIP pernah membuka kelas jauh di Pamulang, tetapi sejalan dengan berakhirnya perjanjian kerjasama, kelas jauh di Pamulang sudah ditiadakan.

MIP menawarkan program unggulan berupa: (1) Tilawati. Metode Tilawati telah dipergunakan sejak 2016. Tilawati diajarkan di pagi hari pada saat 'habitual kurikulum', dan jam pertama pelajaran al-Qur'an di kelas 1—3; sedangkan untuk kelas 4—6 metode Tilawati dipergunakan dalam kegiatan Tadarrus al-Qur'an; (2) Paskibraka. Paskibraka dipandang mampu memberikan kontribusi positif bagi siswa dalam pembentukan karakter, tertib, disiplin, bertanggung jawab, yang bermuara pada peningkatan prestasi belajar; (3) Pembinaan akhlakul Karimah dan Penerapan Zona Sunyi (dalam pelaksanaan shalat); (4) Penguatan Bahasa Inggris dan Bahasa Arab dari Kelas 1; (5) Pembinaan Matematika, Sains, dan *Tahfidz* (Juz 30).

Pada tingkat MI, karena mutu dan prestasi belajar siswanya, di kalangan masyarakat Ciputat dan sekitarnya muncul MP sebagai *branding* sebagai "madrasah unggulan" di wilayah DKI Jakarta.

Madrasah Tsanawiyah (MTs) Pembangunan



Surat Keputusan Kanwil Departemen Agama Provinsi DKI Jakarta nomor Depag RI Nomor: Kep/D/03/1978.

MTs MP dibuka setelah MI berjalan selama tiga tahun. Pembukaan MTs MP dilakukan dengan pada 1977 SK Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Meskipun dimulai dengan 17 siswa, perkembangan MTs MP sangat pesat. Apalagi sejak periode awal, tepatnya pada 1978, MTs MP telah ditetapkan sebagai *Madrasah Pilot Proyek Percontohan*, yaitu madrasah yang secara konsisten dan ideal menerapkan kurikulum berbasis SKB Tiga Menteri.³⁷ Pada 2008 MI Pembangunan dan MTs Pembangunan ditetapkan sebagai Madrasah Standar Nasional oleh Kanwil Departemen Agama Provinsi DKI Jakarta.³⁸

37 Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam Depag RI Nomor: Kep/D/03/1978.

38 Surat Keputusan Kanwil Departemen Agama Provinsi DKI Jakarta nomor: Kw.09.445HK.00520812008.

Madrasah Aliyah (MA) Pembangunan

MA Pembangunan dibuka pada Tahun Pelajaran 1991-1992. Dengan jumlah siswa sebanyak 32 orang terdiri dari 10 laki-laki dan 22 perempuan, MA Pembangunan beroperasi dengan baik. Akan tetapi, setelah beroperasi selama empat tahun, sejak Tahun Pelajaran 1995-1996, MA Pembangunan ditutup sementara karena alasan kebijakan dari Kementerian Agama. Pada Tahun Pelajaran 1996-1997, seluruh siswa angkatan terakhir sebanyak 31 orang dinyatakan lulus dari MA Pembangunan IAIN Jakarta. MA Pembangunan dibuka kembali pada Tahun Pelajaran 2006/2007. Ketiga dibuka kembali, sebanyak 47 siswa terdaftar sebagai angkatan pertama.

Pada akhir 2009, tepat tiga tahun setelah beroperasi, MA Pembangunan berhasil menorehkan prestasi berupa akreditasi dengan level A, level tertinggi dalam akreditasi—prestasi yang juga sudah diraih MI Pembangunan dan MTs Pembangunan. Pada Tahun Pelajaran 2015/2016 MA Pembangunan membuka Kelas Bahasa dengan program utamanya penguasaan TOEFL (peserta didik kelas X) dan IELTS (peserta didik kelas XI). Pada Tahun Pelajaran 2016/2017 MA Pembangunan mencanangkan diri sebagai “Madrasah Riset” dan mengimplementasikan Sistem Manajemen Mutu (SMM)—sebagaimana MI dan MTs—dan memperoleh sertifikat-ISO-001:2008-No.QSC:00863.

Terus Berkembang Mengukir Prestasi

Saat ini Madrasah Pembangunan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sudah memiliki lima unit satuan pendidikan, yakni: Tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI), Tingkat Madrasah Tsanawiyah (MTs), Tingkat Madrasah Aliyah (MA), Tingkat Taman Kanak-Kanak Islam Pembangunan (TKIP) dan Tingkat Sekolah Dasar Islam Pembangunan (SDIP). Semua unit yang ada di Madrasah Pembangunan UIN Jakarta berada dalam satu naungan Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta.

Semenjak berdiri pada 1974, MP terus tumbuh menjadi madrasah unggul yang mendapatkan pengakuan dan kepercayaan masyarakat dan pemerintah. Pengakuan dan kepercayaan masyarakat dibuktikan dengan grafik peningkatan jumlah siswa yang selalu naik setiap tahun—bahkan untuk tingkat MI menerapkan pembatasan

kuota. Sedangkan di mata pemerintah, c.q. di lingkungan Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, MP juga dikenal sebagai madrasah yang telah mengukir segudang prestasi. Bermodalkan itu semua, MP masih menjadi salah satu madrasah yang menjadi pilihan banyak para orang tua untuk menitipkan putra-putri terbaiknya untuk belajar.

Capaian tersebut, tidak terpisahkan dari upaya *stakeholders* madrasah dalam merumuskan program, menentukan langkah strategis implementasinya, membangun kerjasama dan *networking*, menjaga tata kelola dan *leadership* yang adil dan transparan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah mendesain program pembelajaran dan layanan terbaik yang dilakukan kepada siswa.

Program Strategis

Pembinaan SDM Guru dan Tenaga Kependidikan

Terdapat pandangan bahwa bahwa kualitas pendidikan dari semua negara tidak akan melebihi kualitas gurunya. Pandangan tersebut, tentunya sangat relevan dengan kondisi yang terjadi di dunia pendidikan saat ini. Mengacu kepada hasil riset, pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa beberapa faktor yang dapat menyebabkan majunya pendidikan di sebuah institusi pendidikan adalah sebagai berikut: guru dan tenaga kependidikan yang profesional, kurikulum yang *excellent*, dan sarana dan prasarana yang mendukung.

Berdasarkan itu, program pembinaan kepada guru dan karyawan di MP pada semua unit dari mulai tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), Taman Kanak-kanak Islam Pembangunan (TKIP) dan Sekolah Dasar Islam (SDIP) merupakan program prioritas. Program pembinaan kepada para guru dan tenaga kependidikan dirumuskan dengan sangat baik, sistematis, dan tepat sasaran. Program pembinaan guru dan tenaga kependidikan juga disusun mengacu kepada kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang ada di unit masing-masing. Hal ini dimaksudkan agar pembinaan guru dan tenaga kependidikan benar-benar memperbaiki bagian-bagian yang dianggap lemah sehingga secara langsung berpengaruh pada kualitas.

Program pembinaan guru yang dilakukan di MP untuk semua unit adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan melalui kegiatan pelatihan, seminar, workshop dan studi S2 dan S3;
- b. Penguatan Pembelajaran Berbasis *Multiple Intelligences*;
- c. Penetapan Madrasah Aliyah sebagai madrasah riset;
- d. Workshop Strategi Pemanfaatan Sumber Belajar Kelas Dunia & TED (Technology, Entertainment, Design Education);
- e. Pelatihan Penulisan Kisi-kisi Soal AN;
- f. Pelatihan *service excellent*;
- g. Komunikasi Efektif;
- h. Metode pembelajaran;
- i. Peningkatan budaya penulisan karya ilmiah (riset);
- j. Seminar Pendidikan & MP Berbagi (Pelatihan Menulis, Penilaian HOTS, Google for Educator);
- k. Gema GTK (Gerakan membaca Al-Qur'an Guru dan Tenaga Kependidikan) *One Month One Juz*;
- l. Melaksanakan Forum Diskusi Guru (FGD);
- m. Study Banding;
- n. Supervisi guru di kelas; dan
- o. Penetapan madrasah digital. Program pembinaan untuk tenaga kependidikan disesuaikan dengan keahlian dan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Antara lain, Pelayan Prima, *Public Speaking*, Tata Kelola Madrasah, Manajemen Kearsipan dan yang lainnya.



Gambar .2.1
Workshop/ Pelatihan Guru

Meningkatkan Mutu Tata Kelola Madrasah

Para pengelola MP menyadari bahwa tata kelola, atau manajemen, lembaga pendidikan sangat berpengaruh terhadap proses belajar-mengajar. Di dalam tata kelola, faktor struktur organisasi, relasi antar unit kerja, kepemimpinan, pembagian kerja, alur pertanggung jawaban dan pelaporan, termasuk di dalamnya pola kepemimpinan yang memiliki kredibilitas, keadilan, dan transparansi dalam pengambilan keputusan, merupakan aspek-aspek yang secara langsung berpengaruh pada kinerja. Oleh karena itu, MP memberikan perhatian besar terhadap sistem tata kelola yang baik, profesional dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola lembaga pendidikan modern. Tata kelola MP selalu diperbaiki dengan mengacu pada standar mutu yang tersedia. Ini terbukti dengan perolehan sertifikat-ISO-001:2008-No.QSC:00863.

Fleksibel dan Adaptif Menghadapi Perubahan

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang dengan pesat sesuai zamannya. Respons positif dan strategis terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan menciptakan peluang baik untuk berkembang. Teknologi komunikasi berbasis internet dan digitalisasi yang menyerbu berbagai sektor, ditangkap MP sebagai peluang pengembangan dan dimanfaatkan secara maksimal. MP memanfaatkan perkembangan tersebut dengan menciptakan *Learning Management System (LMS)* dengan nama "SMART MP". Dengan "SMART MP", proses layanan administrasi pendidikan bermigrasi dan bertransformasi berbasis digital.

Fokus pada Proses (The Best Process)

Indikator sekolah unggul di Indonesia terdiri dari *Best INPUT*, *Best PROCESS* dan *Best OUTPUT*. Mayoritas, atau sebanyak 99% sekolah di Indonesia, menerapkan konsep *Best Input* dengan asumsi dua yang terakhir akan dengan mudah tercapai. Akan tetapi berbeda dengan mayoritas sekolah tersebut, MP mengambil pilihan untuk menjadikan

best process sebagai fokus utama. Pilihan itu diambil karena MP menjadikan *multiple intelligences* basis filosofis dalam pembelajaran. *Multiple intelligences* merupakan pandangan yang meyakini bahwa setiap siswa memiliki cara, pendekatan, dan metode yang berbeda dalam memperoleh pengetahuan, atau informasi. Dengan keyakinan tersebut, maka proses belajar yang baik menjadi lebih penting daripada *input* yang baik, bahkan hasil yang baik sekalipun.

Dalam praktik, karena fokus pada proses yang unggul, MP memastikan semua program-program yang dirancang berjalan dengan baik. Karena itu pula, penerapan standar baku manajemen dengan ISO, dan tahapan-tahapannya, diikuti dengan konsisten. Dengan memberikan jaminan kualitas itu, MP memiliki keyakinan apa pun *input* peserta didik, dengan pendekatan proses yang unggul dalam pembelajaran, maka kecerdasan dominan yang dimiliki siswa akan berkembang dan mencapai hasil terbaik. Konsepsi pendidikan ini bukan hanya melahirkan sikap optimis terhadap proses pendidikan yang dilaksanakan, tetapi lebih dari itu juga berimplikasi kepada cara pandang atau paradigma guru dan tenaga kependidikan dalam memandang peserta didik: "semua peserta didik adalah bintang, para juara dan cerdas di bidangnya masing-masing".

Membangun Network dan Kerjasama

Membangun jaringan dan kerjasama merupakan bagian penting dalam memperkuat eksistensi kelembagaan, memperoleh pengakuan, dan memperluas pergaulan, dan yang tidak kalah penting mengukir prestasi, serta meningkatkan mutu. Menyadari pentingnya jaringan dan kerjasama, sejak periode awal, MP menjalin komunikasi dengan madrasah sekitar, Kementerian Agama, lembaga penyiaran, dan pemerintah daerah. Jaringan dan kerjasama yang telah dibangun pada periode awal menjadi fondasi bagi perluasan jaringan yang terus berlangsung sampai sekarang. Arah yang dituju dalam pengembangan jaringan dan kerjasama adalah satu: memperkuat dan meningkatkan mutu MP.

Partisipasi siswa dan guru dalam ajang perlombaan tingkat nasional Kompetisi Sains Madrasah (KSM), yang melibatkan siswa, guru

dan tenaga kependidikan Tingkat Provinsi dan Nasional, merupakan salah satu contoh perluasan jaringan dan kerjasama. Dalam ajang KSM yang bergengsi itu, kontingen MP mengukir prestasi membanggakan. Beberapa guru terpilih mengikuti program peningkatan mutu pembelajaran di luar negeri, yaitu Australia dan Thailand. Untuk kerjasama, MP juga menekan MoU dengan BATAN (Badan Tenaga Nuklir Nasional) dalam proses pembelajaran sains. MoU tersebut juga mencakup aspek peningkatan SDM, dan layanan pemanfaatan laboratorium bagi siswa tingkat MA.

Berikut antara lain lembaga yang menjadi mitra MP dalam mendidik siswa-siswa unggul: Kementerian Agama RI, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Kampus PTN/PTS Favorit, Bimbel Belajar ternama, UNESCO, Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Millennia 21, *Japan Foundation*, Inggris IEC), *National English Center* (NeC), Laboratorium ILMA, Ar-Rahman Kediri. PTIQ, IIQ dalam pengembangan Kelas Bilingual Sains dan Tahfiz.



Gambar.2.2
MoU dengan Pelatih Luar (Olimpiade)



Gambar. 2. 3
Mou dengan Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)

BAGIAN II : Eksistensi dan Kehadiran MP

BAB 3 Aktor di Balik Struktur: Mencatat Program dan Kinerja

Pengantar

Mengenal tokoh yang bekerja di balik sistem merupakan bagian penting dalam melihat perjalanan sebuah lembaga. Tokoh yang memiliki kinerja yang baik dalam sebuah sistem organisasi memberikan *environment* yang sehat bagi organisasi tersebut. Meskipun demikian, harus digariskan di sini bahwa sistem juga memberikan kondisi yang memungkinkan seorang tokoh untuk bekerja dengan baik. Keduanya merupakan *simbiosis-mutualisme* yang saling melengkapi, dan tidak terpisahkan.

MP, dari segi *environment* dan budaya kerja, memberikan lingkungan yang kondusif tidak hanya untuk implementasi, tetapi juga kreativitas dan inovasi. Beberapa aspek dalam konteks *external environment* misalnya terpenuhi dengan baik. Dari aspek situasi finansial, meskipun terbatas dan bersumber dari sumbangan siswa, memberikan keleluasaan untuk bekerja dengan standar kualitas yang ditetapkan; dari aspek kondisi legal, pimpinan—baik pimpinan IAIN Jakarta, kemudian Yayasan Syarif Hidayatullah, ketika sudah diserahterimakan—memberikan otoritas penuh untuk pengembangan MP dengan kepastian legal kepada direktur (manajer); dari aspek sosial budaya, terdapat kesamaan asal-usul pendidikan dan nilai-nilai yang

dijadikan pedoman dalam konteks pengembangan madrasah; dari aspek teknologi, tersedia perangkat pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman; dan aspek lingkungan secara umum tersedia lingkungan kerja yang nyaman dan mandiri.

Bagian ini memberikan profil para manajer MP yang telah bekerja menjadikan MP menjadi seperti sekarang ini. Posisi Direktur MP merupakan posisi strategis karena inilah level manajemen yang membangun performa organisasi MP selama ini. Atas kinerja level manajemen inilah, tentu saja dengan dukungan dari seluruh unit kerja yang meliputi guru, tenaga pendidikan, dan proses yang berlangsung, roda organisasi MP sebagai madrasah bermutu bergerak mencapai tujuannya.

Posisi Direktur MP

Membentuk struktur organisasi madrasah dengan menempatkan posisi direktur termasuk tidak biasa. Apalagi ketika pertama kali posisi direktur ditetapkan, posisi MP masih pada tahap pengembangan. Alasan diperlukannya jabatan Direktur MP karena akan ada pengembangan beberapa jenjang pendidikan, yakni tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTS) dan Madrasah Aliyah (MA), sehingga diperlukan sebuah posisi yang mengordinasikan tiga unit jenjang pendidikan tersebut. Di samping itu, sebagaimana disebutkan, posisi direktur ini penting sebagai jembatan komunikasi antara IAIN Syarif Hidayatullah, c.q. Dekan Fakultas Tarbiyah sebagai pembina, dengan Kepala Madrasah. Di samping itu, direktur juga merupakan manajer menengah yang memiliki otoritas untuk merumuskan pengembangan madrasah di masa depan. Dengan posisi demikian, dalam konteks struktur organisasi MP, direktur ini merupakan pihak yang mengambil keputusan berkaitan dengan *resources inputs, tranformation process, dan product ouputs*.

Sejak beroperasi, pembinaan MP ditangani badan pembina yang dipimpin Dekan Fakultas Tarbiyah. Akan tetapi, itu hanya terbatas untuk bidang akademik. Sedangkan untuk bidang-bidang lain seperti keuangan, kelembagaan, koordinasi yang bersifat langsung, monitoring dan evaluasi, serta rapat rutin, di luar jangkauan pembina.

Termasuk gagasan akan kebutuhan sebuah payung yang lebih lebar, pada mulanya juga datang atas usulan direktur. Drs. Muallimi, Direktur MP pertama, mengusulkan agar ada juga pembinaan dalam bidang keuangan yang mengurus tentang pemasukan dan pengeluaran keuangan, kelembagaan dan yang lainnya. Usulan tersebut mulanya ditampung dalam bentuk BP3 (Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan). Namun, setelah berjalan beberapa waktu dan dipandang kurang efektif, payung besar itu kemudian diterima oleh Yayasan Syarif Hidayatullah—sebelumnya bernama Yayasan Kesejahteraan Dosen dan Karyawan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada saat menerima tanggung jawab memayungi MP, posisi Ketua Yayasan adalah Dr. H. Ali Ibrahim (Periode 1986-1996), dosen Fakultas Ushuludin, dan Bendahara Drs. H. Ibrahim Gade (Periode 1986-1996), dosen Fakultas Syari'ah.

Direktur MP pertama dijabat Drs. Muallimi. Ketika diangkat sebagai direktur, status Drs. Muallimi adalah dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sebelumnya, dia tercatat sebagai dosen di IAIN Cabang Sukabumi. Karena alasan yang bersifat administratif, IAIN Cabang Sukabumi ditutup yang bersangkutan pindah ke IAIN Jakarta. Melalui SK Rektor, Drs. Muallimi ditetapkan sebagai Direktur Madrasah Pembangunan IAIN Jakarta (Periode 1975-1983).

Direktur MP kedua, Drs. H. M. Elman Sadri (Periode 1983-1991), juga ditetapkan dengan SK Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada 1991, setelah masa jabatan Drs. H. M. Elman Sadri berakhir, terjadi kekosongan direktur sebelum Rektor IAIN Jakarta menugaskan H. Hamdi Ayusa, BA sebagai Pengendali Organisasi MP sampai dengan ditunjuknya Direktur definitif. Pada 1996, H. Purnomo, BA ditetapkan sebagai direktur merangkap sebagai Ketua Yayasan.

Sedangkan Kepala Madrasah pertama di MP tingkat MTs adalah Drs. H. Amir Abyan. Sedangkan untuk MI, Drs. H. Masan, AF., M.Pd. Pada periode awal (1974-1975), MI MP dipimpin H. Tarmizi Tanjung atas usulan Drs. H. Bakran Yakub.

Profil dan Kiprah Direktur MP

Sebagaimana disebutkan, Direktur MP pada mulanya ditetapkan melalui SK Rektor Syarif Hidayatullah Jakarta. Drs. H. Muallimi dan Drs. H.

Elman Sadri, Pelaksana Direktur H. Hamdi Ayusa, BA, dan Purnomo, BA ditetapkan melalui SK Rektor. Pada perkembangannya, ketika Yayasan Syarif Hidayatullah sudah mendapatkan mandat untuk mengelola MP, jabatan Direktur ditetapkan melalui SK Yayasan. Dr. Hj. Farida Hamid, M.Pd (2003-2009), Dr. H. Ahmad Sofyan, M.Pd (2009-2015), dan Dr. H. Bahrissalim, M.Ag (2015-2022) merupakan deretan nama direktur yang ditetapkan Yayasan.

Pada perkembangan yang lebih belakangan, tepatnya tahun 2022 lalu, Yayasan Syarif Hidayatullah melakukan restrukturisasi organisasi dengan mengoptimalkan peran yayasan dalam direktorat pendidikan, pengembangan SDM, sosial keagamaan dan ekonomi bisnis.

TAHUN	DIREKTUR	YAYASAN
1976-1983	Drs. H. Mualimi	-
1983-1991	Drs. H. Elman Sadri	Drs. H. Ali Ibrahim
1991-1996	H. Hamdi Ayusa, BA	Drs. H. Ali Ibrahim
1996-2002	H. Purnomo, BA	H. Purnomo, BA
2003-2009	Dr. Hj. Farida Hamid, M. Pd	Prof. Dr. Ridho Masduki, MA Prof. Dr. Abudin Nata, MA
2015-2022	Dr. H. Bahrissalim, M. Ag	Prof. Dr. Abudin Nata, MA Prof. Dr. H. Murodi, MA

Profil Direktur MP dari Masa ke Masa

Drs. H. Mualimi, MA (1976-1983)



Drs. Mualimi, MA adalah Direktur Madrasah Pembangunan yang pertama. H. Mualimi adalah Sarjana Pendidikan Islam lulusan Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. H. Mualimi mengabdikan sebagai Direktur pada tahun 1976-1983. Pada masa kepemimpinannya didampingi Kepala Madrasah Ibtidaiyah H. Masan AF, M.Pd (1981-1983) dan kepala MTs Drs. H. Amir Abyan (1981-1985), pada awal kepemimpinannya sudah berdiri gedung Madrasah Ibtidaiyah lantai 1, gedung Madrasah Tsanawiyah lantai 1, Masjid At-Tanmiyah dan 2 (dua) ruang kelas yang dijadikan rumah bagi yang menjaganya.

Drs. H. M. Elman Sadri (Periode: 1983-1991)



Drs. H. M. Elman Sadri adalah Direktur Madrasah Pembangunan yang kedua. H. Elman Sadri adalah sarjana Pendidikan Islam lulusan Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. H. Elman Sadri mengabdikan sebagai Direktur pada tahun (1983–1991). Pada masa Direktur H.M. Elman Sadri, beliau sempat membangun dua lantai yang digunakan ruang administrasi dan laboratorium (sekarang digunakan perpustakaan dan Lab MI).

H. Elman Sadri menyampaikan bahwa saat menjadi direktur, dia mendapatkan mandat dari Rektor Prof H. Harun Nasution. Terdapat 2 (dua) program yang harus dijalankan: (1) mengelola MP Labschool Fakultas Tarbiyah IAIN dan (2) madrasah berkualitas.

Akan tetapi, karena konsep Labschool Fakultas Tarbiyah IAIN ini belum jelas, pengelolaan madrasah sebagai labschool IAIN tidak tergarap dengan prima. Fokus MP tertuju hanya pada peningkatan mutu. Untuk mewujudkan madrasah berkualitas ini kemudian Elman Sadri mengawalinya dengan mengumpulkan orang tua peserta didik untuk diajak berdiskusi mewujudkan madrasah berkualitas. Di antara saran dan usulan yang mengemuka, berupa perlunya peningkatan keterampilan siswa dalam bidang olahraga dan seni sekaligus penyusunan anggarannya.

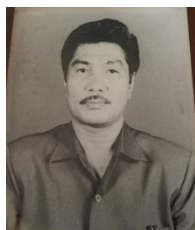
Perkembangan MP pada masa H. M. Elman Sadri (1983-1991) dengan Kepala MTs Drs. H. Sukiman AR dan Kepala MI Drs. H. Masan AF. M.Pd berhasil menciptakan madrasah berkualitas. Indikatornya antara lain, adanya seleksi masuk bagi calon peserta didik baru, mengikutsertakan berbagai lomba baik berupa olahraga dan seni dengan persiapan yang maksimal. MP pernah meraih juara umum Porseni tiga kali berturut-turut pada ajang lomba yang diadakan Kelompok Kerja Madrasah (KKM). Selain itu, sebagai bentuk terobosan juga diselenggarakan tari balet sebagai kegiatan ekstrakurikuler, seni dan drama. Hasil setiap ekskul ini selanjutnya ditampilkan pada saat akhir tahun kenaikan kelas/wisuda.

Selanjutnya, untuk tingkat MTs, pada masa Sukiman (1987),

pernah dijadikan sebagai Kelas Jauh MTsN 3 Pondok Pinang. Bahkan pernah mendapatkan tawaran untuk berubah status menjadi MTsN. Tawaran datang dari Drs. H. Muzayin Arifin yang saat itu menjabat sebagai Direktur Pergurais Kementerian Agama. Tawaran ini, setelah dikonsultasikan kepada Rektor (Prof. Dr. Harun Nasution), tidak disetujui dan ditolak.³⁹

H. Sukiman juga melakukan beberapa upaya dalam pengembangan madrasah, di antaranya sebagai berikut: (1) Dengan tujuan supaya alumni MI Pembangunan pada mendaftar ke MTs Pembangunan, pada akhir tahun ajaran menyempatkan untuk mempresentasikan MTs kepada para orang tua murid kelas 6 (enam) MI Pembangunan; (2) Bagi mahasiswa yang praktik lapangan (PKL) di MP dan meraih nilai bagus, maka mahasiswa yang terbaik diminta untuk mendaftarkan diri sebagai guru MP. Adapun prestasi yang sempat diraihny adalah Madrasah Terbaik I (satu) dalam Bidang Administrasi.

H. Hamdi Ayusa, BA, Plt. Direktur (Periode: 1991-1996)



H. Hamdi Ayusa, BA adalah Direktur Madrasah Pembangunan yang ke tiga—dengan status Plt (Pelaksana Tugas). H. Hamdi Ayusa, BA adalah alumni IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. H. Hamdi Ayusa, BA mengabdikan sebagai Direktur pada tahun 1991-1996 pada masa kepemimpinannya MP telah melaksanakan pengembangan sarana fisik maupun

yang lainnya.

Pada Masa (PJS) Direktur Hamdi Ayusa, BA (1991-1996) dibangun 2 (dua) lantai gedung MI (sekarang digunakan MTs) dan lantai 2 (dua) Gedung Eks. MAN 3 Jakarta. Pada masa itu juga MP mengadakan penambahan lahan seluas 8000 m² tanah di wilayah Pamulang—yang sekarang menjadi lokasi SDIP. Tanah dibeli dari Ibu Hj. Hanifah dengan harga yang jauh di bawah standar dengan sumber pendanaan dari dana ZIS yang dikumpulkan dari orang tua siswa/siswi MP.⁴⁰ Selain itu, MP juga membuka kelas jauh MI Pembangunan sebagai respons

39 Wawancara dengan H. Elman Sadri, 20 Februari 2023 pukul 10.00-11.00 WIB.

40 Wawancara dengan Sukiman AR, Kamis, 9 Februari 2023 Pukul 13.00-14.15 wib

dari adanya permintaan dari Yayasan al-Hidayah, Pamulang.

H. Purnomo (Periode: 1996-2002)



H. Purnomo, adalah Direktur Madrasah Pembangunan yang ke tiga. H. Purnomo adalah alumni IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. H. Purnomo menjabat Direktur pada 1996–2002. Pada masa kepemimpinannya Madrasah Pembangunan telah melaksanakan pengembangan sarana fisik maupun pengembangan lainnya. Pada masa Direktur H. Poernomo, BA dibangun lantai 3 dan 4 yang diperuntukkan untuk ruang laboratorium dan aula, di mana sebelumnya telah dibangun lantai 1 dan 2 pada masa Direktur M. Elman Sadri. Dalam pengembangan mutu pendidikan pada masa Direktur H. Poernomo, BA lebih banyak memberikan porsi kepada para guru untuk lebih bebas berekspresi dalam menentukan proses pembelajaran dan program tahunan yang akan dikembangkan sehingga pertemuan guru kelompok bidang studi dan rapat bersama semua unit cukup sering dilaksanakan.

Dra. Hj. Farida Hamid, M.Pd (Periode: 2003-2009)



Dra. Hj. Farida Hamid, M.Pd, adalah Direktur Madrasah Pembangunan yang ke empat. Hj. Farida Hamid adalah Sarjana Pendidikan Islam lulusan Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta 1988. Hj. Farida Hamid menjabat Direktur periode 2003–2009. Pada masa kepemimpinannya, Madrasah Pembangunan telah melaksanakan pengembangan sarana fisik maupun pengembangan lainnya. Pada masa Direktur Ibu Dr. Hj. Farida Hamid, M.Pd dengan Asisten Direktur Bapak H. Rahmatullah, M.A (2003-2006) dan Drs. H. Agus Salim, M.Pd (2006-2009), dilakukan inovasi, baik dalam bidang fisik bangunan maupun dalam bidang peningkatan kualitas guru dan siswa. Antara lain renovasi gedung MTs, yang semula hanya 2 (dua) lantai bertambah menjadi 4 (empat) lantai.

Pendirian dan pembangunan gedung MA, dan pembebasan

lahan parkir belakang juga dilakukan pada periode ini. Dalam hal peremajaan fasilitas belajar, pada masa Farida juga terdapat pergantian meja dan kursi serta penyediaan fasilitas belajar berupa OHP dan *slide*. Pada periode inilah, pada 2006, MP mendapatkan kehormatan dikunjungi Perdana Menteri Belanda dan Menteri Pendidikan Kerajaan Belanda, tamu kehormatan lainnya. Prof. Azyumardi Azra, yang saat itu menjabat Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menunjukkan MP sebagai salah satu lembaga pendidikan moderat dan unggul.

Farida Hamid juga memperhatikan soal peningkatan kualitas SDM, pada level pimpinan madrasah, guru dan karyawan. Alokasi anggaran untuk peningkatan SDM melalui pelatihan dan workshop ditingkatkan, bahkan studi banding ke luar negeri (Singapura dan Malaysia) dilakukan pada 2007. Farida Hamid juga mencanangkan program pengembangan jiwa *entrepreneurship* di kalangan siswa dengan mengadakan kegiatan ekstra kurikuler yang disebut “Student Company” untuk tingkat MTs. Siswa membangun perusahaan dan berdagang dengan teman-teman beda provinsi bahkan negara. Pada akhir masa jabatannya, sempat melakukan pengiriman siswa terbaik ke Jepang hasil kerja sama dengan Kedutaan Jepang 2008.

Dr. H. Ahmad Sofyan, M.Pd (Periode: 2009-2015)



Dr. H. Ahmad Sofyan, M.Pd adalah Direktur Madrasah Pembangunan yang ke lima. Ahmad Sofyan adalah Sarjana S1 Tadris IPA Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1989), Magister bidang Pendidikan dari UNJ (Universitas Negeri Jakarta) (2000), dan S3 UNJ lulus (2012). Ahmad Sofyan menjabat Direktur periode 2009–2015. Pada masa kepemimpinannya Madrasah Pembangunan telah melaksanakan pengembangan sarana fisik, di antaranya pembangunan gedung dan inovasi pendidikannya.

Ahmad Sofyan, yang didampingi dua Wakil Direktur, yaitu Drs. H. Agus Salim, M.Pd. (2009-2012) dan Drs. Rusli Ishaq, M.Pd (2012-2015) melakukan inovasi baik dalam bidang fisik bangunan maupun dalam bidang peningkatan kualitas guru dan siswa. Untuk pembangunan fisik

berupa bangunan 4 (empat) lantai gedung administrasi, membangun gedung TK/MPEC di Pamulang, mengadakan ruangan khusus laboratorium MIPA dan 4 (empat) ruang kelas, serta menyediakan fasilitas lapangan basket/futsal (*outdoor*) MA, renovasi lantai 2 gedung MI dekat masjid, renovasi gedung perpustakaan serta mengganti meja kursi tingkat MTs. Ahmad Sofyan juga berhasil melakukan perluasan lahan MP di 6 titik sekitar 1 Ha di Pusat dan di Pamulang.

Dalam rangka mewujudkan layanan administrasi yang sistematis, dikembangkannya layanan administrasi satu atap agar terdokumentasikan data/arsip dengan tertib. Juga dikembangkan manajemen kontrol ISO 15000:2008 bekerjasama dengan Sucofindo. Sedangkan untuk peningkatan kecerdasan spiritualitas siswa, pada saat *habitual curriculum* siswa disempatkan beberapa menit di kelas mengikuti prosesi *silent sitting*.⁴¹ Ini merupakan adaptasi dari hasil kunjungan ke salah satu sekolah di luar negeri.

Silent sitting yang dikembangkan di Madrasah Pembangunan oleh kepala laboratorium sedikit berbeda, namun spiritnya hampir sama. Pengembangan budaya literasi menjadi bagian tak terpisahkan dalam programnya sehingga di tingkat MTs terbukukan 4 (empat) karya siswa hasil perjuangan pegiat literasi yang dipelopori oleh Abdul Muttaqin, S.Ag dan guru-guru Bahasa Indonesia.

Dalam pengembangan berbahasa asing para guru dan siswa, Sofyan bekerja sama dengan Kampung Inggris Pare Kediri, di mana tim tutor datang dan bermukim di Madrasah Pembangunan dalam beberapa hari. Selanjutnya siswa dan perwakilan guru yang datang ke kampung Inggris Pare, agar kemampuan berbahasa asing guru dan siswa dapat berkembang sesuai target. Dalam kaitan dengan ini, di tingkat MTs, dengan Drs. Rusli Ishaq, M.Pd sebagai Kepala Madrasah, mulai dikembangkan "Kelas Bilingual".

41 *Silent Sitting* adalah berdiam diri sejenak sebelum pembelajaran dimulai dengan memejamkan mata dan hati khusus seraya mengikuti bimbingan guru dalam merenungi pemberian Allah SWT, berupa nur (cahaya) pada manusia, seraya berdo'a untuk mendapatkannya agar hati terbuka dan merasa nyaman.



Gambar 3.1
Pembelajaran Kelas Bilingual MTs Pembangunan UIN Jakarta

Kelas Bilingual sendiri merujuk pada program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di mana pada saat itu dicanangkan Program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Ketetapan ini didasarkan pada UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional, Pasal 50 Ayat 3, yang menyatakan bahwa pemerintah dan/ atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional. Dari sinilah kemudian bermunculan sekolah-sekolah yang mengembangkan program RSBI meskipun akhirnya—seperti diketahui—model sekolah ini tidak diteruskan hingga sekarang setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ketentuan tentang sekolah internasional tersebut.

Meskipun demikian, MP sejak tahun pelajaran 2011 terus mengembangkan semacam model kelas RSBI tersebut (*Bilingual Class*). Hal ini dilatarbelakangi semakin banyaknya orang tua dan calon peserta didik yang ingin belajar di kelas RSBI. Untuk tetap melestarikan pembiasaan berbahasa Indonesia di lingkungan madrasah,

pengembangan pembelajaran berbahasa asing tidak dikembangkan pada semua pembelajaran bidang studi yang ada melainkan hanya pada pembelajaran bidang studi Bahasa Arab, Bahasa Inggris, dan Sains. Adapun untuk meningkatkan kemampuan berbahasa yang perlu didukung dengan lingkungan berbahasa, maka dibuatkan sebuah program wajib berbahasa asing pada satu hari tertentu yakni *Arabic Day/English Day*.

Selanjutnya, di tingkat Madrasah Ibtidaiyah dengan kepala MI Drs. Yon Sugiyono dan Kepala Laboratorium Momon Mujiburrahman, MA (2013) dikembangkan pembelajaran membaca al-Qur'an dengan metode metode *Kibar* dan *Qiroati*. Dalam pengembangan kemampuan membaca al-Qur'an peserta didik dan para guru, dikembangkan pembelajaran al-Qur'an dengan metode *Tilawati*. Pengembangan pembelajaran metode *Tilawati* ini kerja sama dengan Pesantren al-Qur'an Nurul Falah Surabaya.

Dr. H. Bahrissalim, MA (Periode: 2015-2022)



Dr. H. Bahrissalim, M.Ag adalah Direktur Madrasah Pembangunan yang ke enam. Latar belakang pendidikannya di IAIN Sunan Ampel di Malang (sekarang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang) program S-1 pada jurusan PAI (1995), IAIN Alauddin Makassar (UIN Alauddin) Program Magister Program Studi Pendidikan Islam (1998), dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung pada Program Doktor Program Studi Pengembangan Kurikulum (2017).

Bahrissalim menjabat sebagai Direktur pada 2015–2022 dengan wakil direktur H. Djamaludin, M. Pd. Pada masa kepemimpinannya telah melakukan inovasi dan kreativitas dalam meningkatkan mutu MP baik kualitas pembelajaran dan sarana prasarana pendidikan. Inovasi yang pertama dilakukan adalah penyederhanaan visi Madrasah Pembangunan. Sebelumnya visi MP adalah: “Menjadi Madrasah Pembangunan Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah terdepan dalam pembinaan keislaman, keilmuan dan keindonesiaan, dengan mengapresiasi potensi-potensi anak

serta perkembangan era globalisasi dan perkembangan zaman. Diubah “Menjadi lembaga pendidikan terkemuka dalam pembinaan keislaman, keilmuan, dan keindonesiaan, dengan mengapresiasi potensi peserta didik”. Pada visi yang baru, penekanan diberikan kepada pengembangan potensi peserta didik.

Penekanan kalimat “mengapresiasi potensi peserta didik” menjadi dasar penyusunan program peningkatan mutu MP dengan menerapkan pendekatan *Multiple Intelligences* dalam proses pembelajaran. *Multiple Intelligences* dilaksanakan bekerja sama dengan Nex Edu Surabaya pimpinan Munif Chatib sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan pada semua potensi peserta didik sebagaimana yang tercantum pada visi MP. Penerapan pendekatan *Multiple Intelligences* tersebut berdampak pada perubahan beberapa hal, antara lain sistem PPDB yang berbasis *Multiple Intelligences Reset* (MIR) dan berbasis kuota dengan tidak melakukan tes akademik di tingkat MI dan SDIP; perubahan paradigma pembelajaran dari pembelajaran berpusat pada guru (*Teacher Centered Learning*) menjadi pembelajaran berpusat pada peserta didik (*Student Centered Learning*) yang menekankan pada proses pembelajaran yang baik (*The Best Process*) berbasis *Multiple Intelligences*; perubahan paradigma guru dan tenaga kependidikan dalam memahami peserta didik yaitu “semua peserta didik adalah para bintang dan para juara, perubahan paradigma ini berdampak pada proses pembelajaran guru di kelas dan pelayanan prima tenaga kependidikan.

Inovasi selanjutnya adalah perubahan keunggulan Madrasah Pembangunan yang awalnya “Sains, Bahasa dan Akhlakul Karimah” berubah urutannya menjadi “ Akhlak, Bahasa dan Sains”. Perubahan ini menggambarkan bahwa Pendidikan di Madrasah Pembangunan mengutamakan pada pencapaian akhlakul karimah peserta didik dalam perencanaan program akademik dan non akademik yang merupakan pondasi keberhasilan peserta didik. Hal ini sesuai dengan hasil riset para dosen Stanford University tentang keberhasilan peserta didik ditentukan 87,5 % oleh *positive attitude* dan 12,5 % oleh kualitas akademik.

Setelah melakukan perubahan tagline atau keunggulan MP,

program unggulan yang dilakukan adalah menetapkan Madrasah Aliyah sebagai “Madrasah Berbasis Riset” (Madrasah Riset) pada 2016. Inovasi keunggulan Riset ini menjadi distingsi Madrasah Aliyah Pembangunan dengan tujuan membiasakan peserta didik melakukan riset dalam proses pembelajaran dan khususnya pada mata pelajaran muatan lokal. Penerapan model pembelajaran yang dilakukan guru berbasis riset dapat menumbuhkan kemampuan riset peserta didik seperti *project based learning*, *problem based learning*, *inquiry learning*, *discovery learning* dan lain-lain dan beberapa program di luar madrasah.

Inovasi lain yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas Pendidikan di MP yang lain adalah Program Madrasah Digital. Program madrasah digital ini tidak hanya berkaitan dengan *digital learning* dengan menggunakan tablet saja, tetapi layanan administrasi di MP bermigrasi berbasis digital, seperti sistem PPDB *online*, layanan keuangan berbasis *online*, sistem pegawai online “SIMPEG”, pembuatan *Learning Management System* (LMS) dengan nama “SMART MP”, penerbitan majalah Al-Ashri berbasis digital, penilaian pembelajaran berbasis CBT dan lain-lain.

Pada masa kepemimpinan Dr. Bahrissalim dan Djamalludin, M. Pd peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan juga mendapatkan perhatian utama dalam rangka, bahkan dipandang sebagai pintu gerbang, menuju peningkatan kualitas pendidikan di MP. Oleh karena itu, dirancang program peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan melalui sejumlah workshop dan pelatihan. Jika dihitung, selama periode ini, terselenggara workshop dan pelatihan sebanyak 55 kali. Implikasinya tidak hanya dirasakan dalam proses pembelajaran siswa dengan prestasi akademiknya, tetapi juga berimplikasi pada prestasi guru. Tercatat terdapat 17 capaian prestasi guru, tenaga kependidikan dan lembaga selain peserta didik,

Dari mulai tingkat TKIP sampai MA dikembangkan pembelajaran membaca al-Qur’an dengan metode *Tilawati* yang merupakan keunggulan dari MP dan Sekolah Islam Pembangunan. Metode *Tilawati* yang berkembang hingga sekarang (2023) pada semua unit dipandang sebagai metode pembelajaran al-Qur’an yang relatif paling cocok, di samping memiliki kekhasan irama saat melantunkannya, juga

sistem pembelajarannya jelas. Lebih dari itu, ada media pembelajaran yang mudah diperoleh, baik berupa buku panduan, buku bacaan 6 jilid, *munaqasah*; jika mendalami teknik dan metode pembelajaran, media digital menyediakannya dengan akses yang mudah, dan yang lebih penting lagi adanya pendampingan dari tingkat cabang secara terorganisir.



Gambar 3.2
Pembelajaran Tilawatil MI Pembangunan UIN Jakarta

Selanjutnya khusus di tingkat MTs, yang dipimpin Momon Mujiburrahman, M.A., tercatat adanya inovasi penting pada 2018 dengan dibukanya kelas Tahfiz. Ini merupakan respons terhadap semakin besarnya kesadaran kaum Muslim untuk semakin dekat dengan al-Qur'an dengan cara menghafalnya. Dukungan besar datang dari wali murid, baik mereka yang anaknya duduk di kelas 5-6 MI dan SDI, khususnya yang berminat melanjutkan pendidikan anaknya ke MTs. Di samping kelas tahfidz, atas aspirasi yang berkembang dari kalangan siswa sendiri—yang didukung wali murid—dibuka kelas bahasa asing. Memperhatikan kondisi tersebut maka mulai tahun

pelajaran 2018-2019, setelah mendapatkan persetujuan dari Yayasan, Manajemen, dan Komite Madrasah, MP membuka Bilingual Tahfidz.

Selain peningkatan kualitas pembelajaran di MP, Dr. Bahrissalim dan Djamaluddin, M.Pd juga melakukan inovasi di bidang sarana dan prasarana dan kelembagaan yang dapat menunjang proses pembelajaran dan mempromosikan Madrasah Pembangunan serta pendirian Lembaga baru, antara lain :

1. Pendirian Sekolah Dasar Islam Pembangunan (SDIP)
2. Pendirian Lembaga Tilawati
3. Pendirian Penerbit Pustaka MP
4. Pembangunan Gedung Laboratorium Madrasah Aliyah Pembangunan.
5. Pembangunan Gedung Kantin MTs dan MA bekerjasama dengan KOPERASI
6. Pembangunan ruang SIDP
7. Pembangunan lapangan olahraga semi *outdoor* MA
8. Pembangunan Gedung II TKIP
9. Pembangunan Gedung IKAMP dan Komite
10. Renovasi Aula Mukti Ali
11. Renovasi ruang kepala sekolah
12. Renovasi ruang kepala TU dan Kasub
13. Renovasi ruang kelas
14. Renovasi ruang resepsionis terintegrasi unit layanan keuangan
15. Penggantian Meja Kursi peserta didik MI
16. Pengadaan mesin air minum
17. Pembangunan ruang podcast

Peran dan Posisi Yayasan Syarif Hidayatullah Sekilas Sejarah Yayasan Syarif Hidayatullah

Yayasan Syarif Hidayatullah, yang sekarang ini menjadi payung bagi MP dengan segala aktivitas pengembangannya, sebenarnya memiliki sejarah panjang. Yayasan ini merupakan keberlanjutan dan perubahan (*continuity and change*) dari "Jajasan Kesedjahteraan Dosen dan Pegawai I.A.I.N." (selanjutnya ditulis: Yayasan Kesejahteraan Dosen dan Pegawai IAIN). Dari sudut pandang nama yang dipilih para pendiri untuk yayasan,

tampak jelas bahwa yayasan ini memiliki keterkaitan erat, bahkan tidak terpisahkan, dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Bahwa nama pertama yang dipilih adalah Yayasan Kesejahteraan Dosen dan Pegawai IAIN, maka dapat diperkirakan dengan kuat bahwa pendirian yayasan dilatarbelakangi oleh niat untuk mendorong dan memfasilitasi kesejahteraan dosen dan pegawai. Harus dibayangkan bahwa situasi sosial ekonomi Indonesia pada periode awal beroperasinya IAIN Jakarta. Pada periode itu, sebagai negara yang baru merdeka, *post colonial state*, atau negara baru yang lahir setelah dekolonisasi dan PD II, Indonesia sebenarnya masih mencari bentuk tentang kehidupan berbangsa dan negara yang ideal. Dalam situasi seperti itu, membentuk yayasan merupakan pilihan alternatif terbaik karena dengan menggunakan yayasan sebagai kendaraan, kegiatan-kegiatan yang bersifat filantropi sampai dengan kegiatan yang bersifat bisnis sosial dapat dikerjakan dengan legal.

Pada 1964, tepatnya pada hari Rabu Tanggal 22 April (bertepatan dengan 9 Dzulhijjah 1383) tiga orang dosen senior, yang juga sedang menduduki jabatan di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, berinisiatif mendirikan yayasan. Mereka menghadap Notaris R. Soerojo Wongsowidjoyo yang berkantor di Jakarta. Tiga “petinggi” IAIN, yang bertindak sekaligus sebagai pendiri yayasan adalah, Profesor Sunardjo (Rektor IAIN Jakarta), Profesor Bustami Abdul Gani (Dekan Fakultas Adab), dan Hadji Mohammad Toha Jahya Omar (Dekan Fakultas Ushuluddin).

Yayasan yang mereka dirikan diberi nama: “Jajasan Kesedjahteraan Dosen dan Pegawai I.A.I.N. (Institut Agama Islam Negeri) berkedudukan di Djakarta” (asli sebagaimana tertulis di dalam Akta Notaris). Dalam Akta Notaris tersebut, pengurus yayasan tercatat sebagai berikut:

Ketua : Haji Ilyas Muhammad Ali;
Sekretaris : Drs Ahmad Sjadali;
Bendaharawan : Drs Mashudi;
Anggota : Muhammad Sahar;
Hamdani Alim A;
Drs. Husein Assegaf;
Chawas S.⁴²

42 Dikutip dari Dokumen “Tambahan Berita Negara R.I. Tanggal 5/10 - 2001 No. 80.

Pada 1988 terbit SK Rektor IAIN Syarif Hidayatullah, Drs. H. Ahmad Sjadzali, Nomor 06 Tahun 1988, Tentang Pelimpahan Tugas Wewenang dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan Madrasah Pembangunan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Melalui SK tersebut, Rektor Memutuskan dan Menetapkan: melimpahkan Tugas Wewenang dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan Madrasah Pembangunan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta kepada Yayasan Kesejahteraan IAIN Jakarta. Dalam surat tersebut juga dinyatakan bahwa kewajiban yayasan adalah membuat laporan tertulis secara berkala kepada Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Setahun setelah menerima SK tersebut, tepatnya pada Rabu 4 Oktober 1989, secara resmi yayasan menggunakan nama baru: Yayasan Syarif Hidayatullah. Perbuahan nama tersebut dilakukan berdasarkan rapat pengurus yayasan yang diselenggarakan pada 21 Agustus 1989, dengan peserta rapat terdiri dari Dewan Pembina dan Dewan Pengurus Yayasan Kesejahteraan IAIN Jakarta. Perubahan hanya dilakukan dengan pasal 1, di mana nama Yayasan Kesejahteraan diubah namanya menjadi Yayasan Syarif Hidayatullah—nama yang sampai sekarang masih dipergunakan.

Bidang Kerja Yayasan

1. Mendukung dan Melakukan Pengawasan Kinerja MP

Sesuai dengan posisinya sebagai lembaga tempat bernaung dari lembaga pendidikan Islam madrasah yang integratif, Yayasan Syarif Hidayatullah mengambil peran sebagai pendukung, memberikan konsultasi, dan membantu koordinasi, dan menjadi pijakan legal operasional MP. Selanjutnya, yang juga menjadi bagian tidak terpisahkan dari kerja yayasan adalah mengaitkan, dalam satu *in-line*, antara Direktur dan Wakil Direktur, Pimpinan Madrasah, Guru, dan Tenaga Pendidikan MP. Dengan demikian, kinerja seluruh bagian bukan hanya bersinergi, tetapi juga dalam koridor visi dan misi madrasah. Dalam kaitan ini, yayasan melakukan koordinasi penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan seluruh *stakeholders*, dalam rangka merumuskan tujuan dan program kerja yang akan ditetapkan. Seluruh program kerja MP harus saling mendukung dan menguatkan sehingga MP—mulai

dari MI, MTs, MA—berjalan dalam ritme dan irama yang sama. Dengan demikian, terdapat jaminan proses pendidikan yang berkualitas, dengan proses yang dilaksanakan sesuai standar, kinerja SDM yang *skill full* dan handal, sesuai dengan bidang yang menjadi tugas masing-masing. Sebagai jaminan tersebut, sekaligus sebagai ukuran standar kualitas, sejak 2022, pengurus yayasan di bawah kepemimpinan Prof. Dr. Murodi, MA, menyusun sejumlah pedoman kinerja dan memperkuat efektivitas kerja yayasan dengan restrukturisasi kepengurusan yayasan pada periode 2019-2024 agar sesuai dengan kebutuhan peningkatan kualitas MP secara berkelanjutan.

2. Monitoring Kinerja

Yayasan memiliki tanggung jawab terhadap kinerja MP. Tanggung jawab itu diwujudkan dalam bentuk monitoring kinerja yang dilakukan Yayasan terhadap kinerja Direktur, dan Wakil Direktur, pimpinan Madrasah, guru dan karyawan MP. Monitoring dilakukan dengan berpedoman pada regulasi yang ditetapkan pada setiap level.

3. Pengawasan Internal Keuangan Madrasah

Pada periode awal, tepatnya pada 1988, Yayasan secara langsung melakukan pembinaan dan pengawasan keuangan. Karena itu, Pengurus Yayasan berkantor di Gedung MP bersama dengan pimpinan MP lain. Yayasan juga melakukan pendampingan dalam pengelolaan keuangan. Ketika itu, Ketua Yayasan Drs. H. Ali Ibrahim, Sekretaris Drs. H. Ibrahim Gade dan Bendahara Drs. H. Syarwani DH. Untuk tugas pengawasan seperti itu, pengurus Yayasan berkantor di MP. Yayasan memberikan saran dan masukan sehingga keuangan sekolah dapat dikelola dengan baik. Yayasan juga memberikan usulan dan mengambil inisiasi untuk pembangunan sarana dan prasarana yang mendorong peningkatan mutu pembelajaran. Peran sebagai pengawas internal ini semakin diperkuat pada periode sekarang ini dengan dibentuknya divisi pengawasan yang berperan sebagai semacam “inspektorat” di kementerian. Dengan demikian, laporan keuangan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan.

4. Regulator Proses Pendidikan

Yayasan memberikan perhatian besar terhadap tata aturan yang dibutuhkan dalam proses belajar yang berkualitas. Yayasan memfasilitasi tersusunnya peraturan pada berbagai tingkatan manajemen. Untuk Yayasan sendiri secara organisatoris diatur dalam AD/ART yang selalu disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan. Sedangkan untuk MP, Yayasan memiliki peraturan tentang pemilihan direktur, pemilihan kepala madrasah, rekrutmen, tugas dan fungsi (*job description*). Selanjutnya, Yayasan memberikan legalitas terhadap seluruh keputusan dan peraturan yang ditetapkan kepala madrasah, dan bagian-bagian manajemen lainnya.

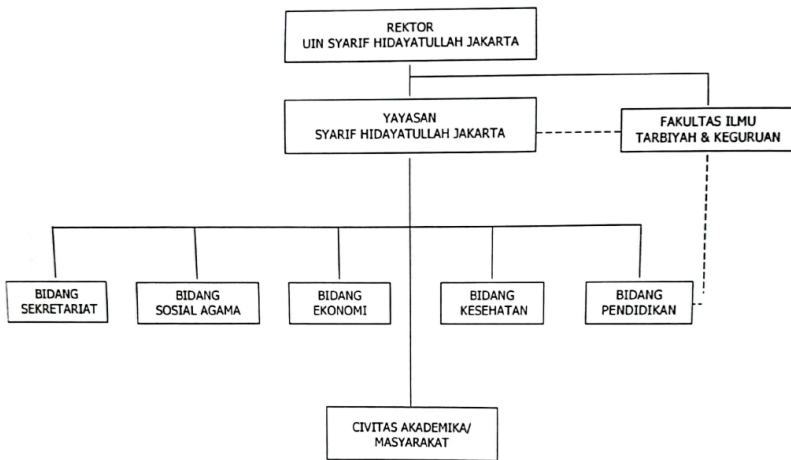
5. Fasilitator Investasi Sarana dan Prasarana Madrasah

Yayasan mengambil peran dalam investasi sarana dan prasarana dengan nilai yang besar. Pembangunan gedung, renovasi kelas digital, dan bentuk-bentuk investasi besar lain selalu melibatkan Yayasan. Untuk investasi dalam skala kecil seperti perbaikan-perbaikan ruang kelas dan sebagainya diberikan kewenangan kepada Direktur MP dibantu TU Madrasah. Gedung-gedung baru seperti gedung Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah, Gedung Perpustakaan, Gedung Administrasi, dan renovasi Masjid At Tanmiah difasilitasi dengan baik oleh Yayasan. Gedung Taman Kanak-kanak (TK) Sekolah Pembangunan, Gedung Sekolah Dasar Islam Pembangunan (SDI) gedung C lengkap empat lantai (2021-2022) juga merupakan fasilitasi dari Yayasan. Pada 2023, Ketua Yayasan Prof. Dr. Murodi, MA, berencana membangun Kembali Gedung SDIP, Gedung B dan Gedung A. Gedung B diperuntukkan buat kelas-kelas untuk KBM. Sedangkan Gedung A diperuntukkan buat Kantor Sekretariat Yayasan dan kantor administrasi.

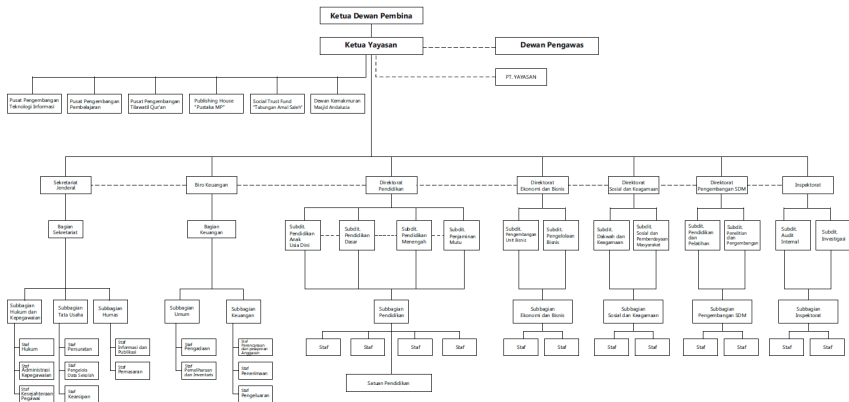
Pimpinan Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta dan Manajemen Madrasah Pembangunan

a) Ketua Yayasan

1. Drs. H. Ali Ibrahim (1988-1996)
2. H. Poernomo. B.A. (1996–2002)
3. Prof. Dr. H. Ridho Masduki, M.A. (2002– 2007)
4. Prof. Dr. H. Abudin Nata, M.A. (2007–2019)
5. Prof. Dr. H. Murodi, M.A. (2019–2024)



Gambar 3.3
Struktur Yayasan Periode 2009-2019



Gambar 3.4
Struktur Yayasan Periode 2018-2024

b) Direktur

1. Drs. H. Mualimi, M.A. (1976-1983)
2. Drs. H. Elman Sadri (1983-1991)
3. H. Hamdi Ayusa, BA (Plt) (1991-1996)
4. H. Poernomo, B.A. (1996 – 2002)
5. Dr. Hj. Farida Hamid, M.Pd (2003-2009)
6. Dr. H. Ahmad Sofyan, M.Pd. (2009-2015)
7. Dr. H. Bahrissalim, M.Pd (2015-2022)

c) Kepala MI

1. H. Tarmizi Tanjung (1974-1975)
2. H. Masan AF, M.Pd (1981-2000)
3. H. Nurzaman (2000-2006)
4. Mulyadi, M.A. (2006-2012)
5. H. Yon Sugiyono (2012-2018)
6. Wahyudi, M.Pd (2018-2026)

- d) Kepala MTs
1. Drs. H. Amir Abyan (1981-1985)
 2. Drs. H. Sukiman AR (1985-1995)
 3. Drs. H. Abdul Wadud, M.A (1996-1999)
 4. Drs. H. Nurcholis (2000–2003)
 5. H. Darul Janin, M.Pd (2003–2006)
 6. H. Djamaludin, M.Pd (2006 - 2009)
 7. Rusli Ishaq, M.Pd (2009 -2012)
 8. Drs. H. Syukri A. Gani (2012 - 2015)
 9. Hj. Eha soriha, M.Si (2015 – 2018)
 10. Momon Mujiburahman, M.A (2018-2022)
 11. Jaenal Mutaqin, M.Pd (2022–2026)
- e) Kepala MA
1. Drs. H. Hamid Sholihin (1991-1996)
 2. H. Darul Janin, M.Pd (2006-2012)
 3. Drs. H. Samingan (2012 – 2015)
 4. Drs. Rusli Ishaq, M.Pd (2015-2018)
 5. Zakariya, M.A. (2018-2026)
- f) TKIP
1. Hj. Ratu Linda Martina,ST, MM (2015-2027)
- g) SDIP
1. Asep Muttaqin Abror, M. Pd (2021-2024)

Daftar Guru Madrasah Pembangunan Periode Awal

1. Tarmizi Tanjung
2. IZ. Efwan Asfa
3. Hj. Wilda Rahma
4. M. Fauzoen
5. Farida Djamal
6. Hj Raswati Ramli
7. H. Sukiman
8. Zaenuri
9. H. Masan AF
10. Damilus Chaniago
11. Hj. Husna Saleh

12. Hj Siti Muttaqinati
13. H. Madrawan Subadri
14. H. Hamid Solihin
15. H. Abd Shomad
16. Hj. RR. Agustina guru seni berikutnya
17. Iis Aisyah
18. Rosna Efwan

BAB 4

Best Practices Pendidikan: Distingsi dan Keunggulan MP

Pengantar

Madrasah Pembangunan sudah mencapai usia setengah abad. Selama setengah abad itu, MP sebagai organisasi pendidikan Islam, telah melewati masa-masa kritisnya, yang muncul pada periode awal berdiri, terutama dalam bentuk yang dikenal sebagai VUCA (*volatile, uncertain, complex, and ambiguous*). Sekarang ini MP sudah memiliki perencanaan yang baik, jaminan tentang masa depan, sistem manajerial yang handal, dan kepercayaan dari masyarakat. Dan selama ini pula, dalam derap langkah selama setengah abad, MP sudah menciptakan *best practices* dalam mengelola pembelajaran dan penanaman akhlak mulia, yang dipraktikkan secara berulang, dan semakin lama semakin kokoh, dan dapat dijadikan sebagai model—atau basis—dalam melakukan hal serupa.

Best Practices yang akan diuraikan pada bagian ini, pada dasarnya merupakan deskripsi pengalaman yang diakumulasi MP sekian lama, di mana pengalaman tersebut diakui mampu memberikan hasil terbaik dalam proses pembelajaran, dan telah dipraktikkan secara berulang. *Best Practices* inilah yang membawa MP menjadi salah madrasah swasta yang mendapatkan kepercayaan masyarakat Muslim kelas menengah atas untuk mendidik anak, keluarga dan kerabatnya. Tidak

berlebihan juga jika dikatakan bahwa *best practices* itu juga yang menjadi *distingui* dan keunggulan MP. Meskipun demikian, penting dikemukakan bahwa dalam rangkaian panjang proses dan pengalaman yang terakumulasi dalam *best practices* tersebut, terdapat tiga aspek yang tidak boleh diabaikan: orisinalitas, inovasi, dan kreativitas. Praktik itu tidak hanya akan membawa hasil positif bagi *stakeholders* internal MP sendiri di masa depan, tetapi juga *stakeholder* eksternal MP.

Madrasah Integratif

Madrasah integratif yang dipraktikkan MP menyangkut dua aspek penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Pertama, menerapkan konsep lembaga pendidikan Islam yang terintegrasi dari tingkat pra-sekolah sampai dengan tingkat menengah atas. Dengan demikian, seorang siswa tercatat dan terevaluasi dengan lengkap perkembangan dan prestasinya dari pra-sekolah sampai menengah atas. Sekarang ini, MP—dalam usia setengah abad—memiliki lima unit pendidikan: Tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI), Tingkat Madrasah Tsanawiyah (MTs), Tingkat Madrasah Aliyah (MA). Semua berlokasi di Ciputat; dan Tingkat Taman Kanak-Kanak Islam Pembangunan (TKIP), dan Tingkat Sekolah Dasar Islam Pembangunan (SDIP), yang berlokasi di Pamulang.

Aspek madrasah integratif kedua, berkaitan dengan isi, atau konten, pendidikan yang diselenggarakan yang tidak hanya berkaitan dengan kurikulum, tetapi juga termasuk keseimbangan dalam meletakkan materi pembelajaran. MP mendesain kegiatan pembelajaran yang bersifat integratif dan seimbang antara ilmu pengetahuan, penanaman nilai moral, penghayatan spiritualitas, dan praktik religius. Dengan demikian, seluruh proses pembelajaran mencakup aspek intelektual, emosional, spiritual, dan aspek perilaku fisik yang berkaitan dengan potensi diri sebagai manusia.

Di antara aspek-aspek itu, terdapat beberapa aspek yang mendapatkan penekanan lebih, namun tanpa mengabaikan aspek lainnya. MP memiliki komitmen tinggi terhadap pembinaan keagamaan (karakter), pembiasaan bahasa (*language*), dan merespon perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*sains*). Dengan menempatkan pembentukan karakter pada urutan pertama, maka

siswa MP pertama-tama adalah manusia dengan karakter mulia, sebelum memiliki kemampuan bahasa yang memadai untuk membuka cakrawala global, dan memiliki kapasitas dalam bidang ilmu dan sains yang mumpuni.

Tiga Best Practices

Dalam konteks madrasah integratif tersebut, tiga bentuk *best practices* diuraikan di sini: (1) penanaman nilai religius yang bermuara pada pembentukan karakter; (2) motivasi berprestasi bidang akademik dan non-akademik yang bermuara pada wawasan global dan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan (3) pengembangan *soft skill* yang bermuara pada *life skill*.

Penanaman Nilai Religius

Penanaman nilai religius merupakan ciri khas madrasah. Pembinaan karakter dalam pendidikan Islam dilakukan dengan sepenuhnya bersumber dari ajaran Islam. Muara dari penanaman nilai religius adalah *akhlak al-karimah* yang menjadi indikasi manusia sempurna (*insan kamil*) dalam Islam. Penanaman nilai religius di MP dilakukan dirumuskan dalam program yang terstruktur dan sistematis. Program penanaman nilai religius ini dilakukan pada semua tingkat pendidikan, baik pada Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), Taman Kanak-Kanak Islam Pembangunan (TKIP) dan Sekolah dasar Islam Pembangunan (SDIP). Meskipun sifatnya umum, program disusun berdasarkan tingkat perkembangan siswa. Program ini juga dirancang tidak membosankan, sebaliknya dirancang sebagai program yang menyenangkan.

Program penanaman nilai religius di MP disebut dengan *Habitual Curriculum* (HC). HC merupakan pembinaan akhlak selama tiga puluh lima menit pada awal jam pelajaran pertama setiap hari. Muatan materinya berupa hafalan do'a, surat-surat pendek, pembacaan surat-surat panjang maksimal 5 ayat, dan tausiah akhlak. Habitus mengandaikan sebuah proses yang berujung pada habit, atau kebiasaan yang built-in dalam setiap siswa. Pada pagi hari MP menanamkan kebiasaan-kebiasaan berupa shalat berjamaah, *Shalat*

Sunnah Rawatib (qabliyah dan ba'diyah), pembiasaan Shalat Sunnah Dhuha, pembiasaan Tilawah al-Qur'an dengan metode tilawati, iqra, tahsin, tahfiz al-Qur'an (sesuai dengan target hafalan masing-masing unit), anjuran bersedekah melalui program Tabungan Amal Saleh (TAS), pidato/ muhadharah, pembiasaan 3S (Senyum, Salam, dan Sapa), pembiasaan puasa sunnah Senin dan Kamis, pengajian bulanan dengan mendatangkan alumni (tingkat MA), malam Bina Iman dan Taqwa, Safari Dakwah, (unit MTs), dan menghafal surat-surat pendek (Unit MI, TKIP dan SDIP). Kegiatan HC juga mencakup pemberian apresiasi karakter "Student of The Month", Magic Word (Sorry, Thank You, Help and Permission), do'a harian, dan masih banyak lagi. Semua program ini dilaksanakan secara berkelanjutan dan konsisten dalam kesehariannya.



Gambar. 4.1

Kegiatan HC (Salat Dhuha MI Pembangunan Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta)



Gambar. 4.2
Kegiatan HC (Salat Dhuha MTs Pembangunan Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta)





Gambar. 4.3

Kegiatan HC (Salat Dhuha di Taman Kanak-Kanak Islam Pembangunan)



Gambar. 4.4

Pembelajaran Tilawati MI Pembangunan Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta



Gambar. 4.5

Manasik Haji MI Pembangunan Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta



Gambar. 4.6

Kegiatan Parade Tahfiz MI Pembangunan Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta



Gambar. 4.7

Manasik Haji MTs Pembangunan Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta



Habitual Cirriculum



Pengajian Bersih Hati

Gambar. 4.8

Kegiatan HC dan Pengajian Bersih Hati
MA Pembangunan Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta

Motivasi Berprestasi Bidang Akademik dan Non-Akademik

Pembinaan prestasi akademik dan non-akademik menjadi bagian dari praktik terbaik (*best practice*) yang dilakukan dan terus dikembangkan dengan inovasi dan kreativitas di semua unit satuan pendidikan MP. Memotivasi siswa untuk berprestasi, baik akademik dan non-akademik, merupakan pendekatan dengan tujuan yang lebih strategis dan utama: menjadikan siswa MP sebagai siswa yang memiliki kapasitas bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta siap berkompetisi dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, MP selalu berpartisipasi dalam ajang prestasi siswa pada tingkat daerah, nasional maupun internasional. Demikian juga halnya dengan ajang prestasi siswa bidang non-akademik.

Pembinaan prestasi bidang akademik dan non-akademik di MP meliputi beberapa kegiatan berikut: PERISMA: pembinaan siswa berprestasi untuk persiapan lomba-lomba, bimbingan belajar, *reading habit*, literasi, dan pembelajaran riset—salah satu distingsi MP—melalui muatan lokal dan kegiatan ekstrakurikuler KIR (Karya Ilmiah Remaja untuk tingkat MA); PROBITASI (Program Bina Prestasi): KSM, OSN, Optika, Mayress, Olimpiade, dan Porseni; KBS (Klub Bidang Studi): Agama, Penguatan Karakter dan Tilawah Al-Qur'an metode Tilawati (distingsi MI Pembangunan), Bahasa, IIS/IPS, dan MIA/IPA, *Arabic Program* (Matrikulasi) dan *English Program* (TOEFL & IELTS), Kelas Bilingual Tahfidz dan Sains (Distingsi MTs) dan *Remedial Service*.

Prestasi akademik dan non-akademik yang raih siswa MP tidak hanya berpengaruh positif terhadap siswa bersangkutan, tetapi membawa imbas positif bagi institusi MP. Atas prestasi yang diraih siswa, MP semakin meneguhkan diri sebagai madrasah unggul dan berprestasi. Ini kemudian mendongkrak jumlah orang tua yang mengirimkan anaknya belajar di MP. Prestasi yang telah diraih semakin memperkuat kepercayaan (*trust*) bagi masyarakat kepada MP, baik pada tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), Taman Kanak-Kanak Islam Pembangunan (TKIP) dan Sekolah Dasar Islam Pembangunan (SDIP).



Gambar. 4.9
 Kegiatan Pembelajaran Bahasa Asing
 MTs Pembangunan Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta



Latihan Bahasa Asing dengan Native Speaker

Gambar. 4.10
Kegiatan Pembelajaran Bahasa Asing
MA Pembangunan Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta



Gambar. 4.11
Kegiatan Jambore Riset
MA Pembangunan Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta



Gambar. 4.11
 Prestasi Terbaik Para Kepala Madrasah (MI, MTs dan MA) diajang Jakarta Madrasah Awards 2022



Gambar. 4.12
 Nasywa Ramadhanti Fauzi, Peserta Didik Kelas XII MIA 1 meraih prestasi terbaik pertama (medali emas 1 cabang matematika tingkat MA) diajang Kompetisi Sains Madrasah (KSM) Tingkat Nasional Tahun 2022



Gambar. 4.13

Prestasi Terbaik Peserta Didik dan Dewan Guru diajang Jakarta Madrasah Competition 2022

Pengembangan Soft Skill: Pengembangan Diri Peserta Didik

Soft skill merupakan kemampuan yang cenderung pada keterampilan sosial, komunikasi, kecerdasan sosial, dan *problem solving*. Berbeda dengan *hard skill*, yang cenderung bersifat teknikalitas, *soft skill* juga lebih menekankan aspek kemampuan untuk beradaptasi dalam kehidupan dan dunia kerja. Oleh karena itu, seringkali dikatakan bahwa *soft skill* yang melekat pada seseorang, memiliki andil lebih besar dalam menentukan sukses, dibandingkan *hard skill* yang dimiliki. Meskipun, dalam konteks proses pembelajaran, keduanya harus mendapatkan perhatian yang seimbang. Berdasarkan pertimbangan seperti itu, MP merumuskan program pembinaan pengembangan

diri peserta didik dengan menempatkan *soft skill* dalam porsi yang memadai.

Program pengembangan diri yang dilakukan MP antara lain: pembinaan kegiatan ekstrakurikuler, pembinaan OSIS dan MPK, pembinaan dalam kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) dan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN), program unggulan masing-masing unit seperti: Galaksi (tingkat MI), Masterpiece (MTs), Aلتrev, Funtastic BS, SNAP (*Spiritual Never Ending Aliyah Project*), Ekskul, Upacara, ICS (*I Can Speak*), PROLIMA (Program Literasi Madrasah), Pembinaan OSIS-MPK, Muhadarah, Apresiasi Seni, dan Tes kelanjutan Studi (Tes Psikotes), Puncak Tema (TKIP), Pembelajaran Berbasis Projec (SDIP). Sedangkan untuk tingkat Madrasah Aliyah, kegiatan yang diarahkan untuk pembentukan karakter melalui pembiasaan dalam kegiatan: Rutin, Spontan, Terprogram, Keteladanan, Pengembangan potensi dan ekspresi diri, sesuai dengan bakat dan minat (TKIP) serta program yang lainnya.



Gambar. 4.14
Kegiatan Galaksi MI Pembangunan Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta



Gambar 4.15
Field Trip MI Pembangunan Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta



Gambar 4.16
Field Trip MA Pembangunan Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta



Gambar. 4.17

Kegiatan Pembinaan dan Pelantikan OSIS-MPK di MA Pembangunan Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta



Gambar 4.18

Kegiatan Puncak Tema Budi Daya Anggrek dan Puncak Tema Air Udara Api bersama Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Selatan



Gambar 4.19
Kegiatan Pembelajaran Berbasis Project SDIP



Gambar. 4.20

Kegiatan Funtastic BS di MA Pembangunan Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta

Basis Pembelajaran: Multiple Intelligences dan Best Learning Process

Selama ini terdapat tiga kategori besar tentang bagaimana manusia belajar: *visual learning*, *auditory learning*, *kinesthetic learning*. Yang pertama kategori orang yang lebih mudah belajar melalui media visual, berikutnya lebih mudah paham dengan media pendengaran, dan yang terakhir lebih merasa nyaman dengan peragaan. Di samping tiga kategori besar itu, berbagai pendekatan juga terus bermunculan sebagai upaya untuk mendapatkan pendekatan pembelajaran yang lebih efektif. Di antara teori yang muncul adalah *multiple intelegences theory*, yang dikembangkan Howard Gardner, Ph.D, dari The Harvard Graduate School of Education, Harvard University pada 1983. Gardner (2013) mengatakan bahwa lepas dari bidang studi yang diajarkan—seni, sains, sejarah maupun matematika—seorang guru harus mempresentasikan materi pembelajarannya dalam banyak bentuk dan cara. Dengan cara seperti itu,

maka siswa dapat memahami materi yang disampaikan sesuai dengan jenis potensi kecerdasan yang dia miliki. Model pembelajaran seperti ini adalah model pembelajaran *multiple intelegences* dalam pengertian sebuah model pembelajaran yang memperhitungkan kecerdasan setiap siswa.

Selanjutnya, Gardner mengatakan bahwa orang tua atau guru tidak boleh terburu-buru menjatuhkan klaim tentang kecerdasan anak. Apalagi mengeluarkan *judgment* bahwa anak itu lemah, bodoh, atau tidak memiliki kemampuan. Riset yang dilakukan Gardner menemukan bahwa ternyata, setiap manusia memiliki banyak kecenderungan kecerdasan, tidak hanya terbatas pada satu atau dua kecerdasan. Setiap anak berpotensi untuk memiliki kecerdasan di bidang-bidang berikut: (1) kecerdasan verbal-linguistik (*verbal-linguistic intelligence*), keterampilan verbal yang berkembang dengan baik dan kepekaan terhadap bunyi, makna, dan ritme kata-kata; (2) kecerdasan logis-matematis (*logical-mathematical intelligence*), kemampuan berpikir konseptual dan abstrak, serta kemampuan membedakan pola logis dan numerik; (3) kecerdasan spasial-visual (*spatial-visual intelligence*), kemampuan berpikir dalam gambar dan memvisualisasikan secara akurat dan abstrak; (4) kecerdasan kinestetik jasmani (*bodily-kinesthetic intelligence*), kemampuan mengendalikan gerakan tubuh dan menangani benda dengan terampil; (5) kecerdasan musikal (*musical intelligence*), kemampuan menghasilkan dan mengapresiasi ritme dan nada; (6) kecerdasan interpersonal (*interpersonal intelligence*), kemampuan untuk mendeteksi dan merespons secara tepat suasana hati, motivasi, dan keinginan orang lain; (7) intrapersonal, kapasitas untuk sadar diri dan selaras dengan perasaan batin, nilai-nilai, keyakinan dan proses berpikir; (8) kecerdasan naturalis (*naturalist intelligence*), kemampuan mengenali dan mengkategorikan tumbuhan, hewan, dan benda lain di alam; (9) kecerdasan eksistensial (*existential intelligence*), sensitivitas dan kapasitas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang keberadaan manusia seperti, "Apa arti hidup? Mengapa kita mati? Bagaimana kita bisa sampai di sini?" (2004).

Setiap kecenderungan kecerdasan menjadi sebuah potensi bakat yang dimiliki anak. *Multiple Intelligences* adalah alat riset yang

akan mengetahui potensi setiap kecerdasan anak Ternyata, kecerdasan seorang anak tidak dapat dinilai dengan menggunakan alat apapun. Penelitian terbaru mengatakan kecerdasan seorang anak dapat diketahui hanya dari kebiasaan anak tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan adalah perilaku seseorang yang diulang-ulang. Kebiasaan tersebut bersumber pada dua hal: bagaimana anak tersebut terbiasa kreatif dan bagaimana anak tersebut terbiasa dalam menyelesaikan masalahnya sendiri dalam pembelajaran. Dengan pendekatan ini, MP menggali kecerdasan dan bakat terpendam peserta didik. Dan setelah potensi bakat itu mulai terlihat, MP akan jauh lebih mudah menerapkan metode pembelajaran paling tepat dalam memberikan pelajaran di kelas masing-masing.

Basis kedua dalam pembelajaran yang diterapkan MP adalah penerapan prinsip *best learning process*, prinsip atau pendekatan proses belajar terbaik. Pembelajaran adalah proses yang berkembang dan dinamis. Oleh karena itu, tantangan terbesar yang dihadapi guru adalah meyakinkan siswa agar secara pribadi memiliki tanggung jawab untuk pembelajaran mereka. Jika menggunakan metafora makan, guru dapat mengisi meja prasmanan dengan berbagai makanan beraroma dan bergizi, namun hanya siswa yang dapat memutuskan apakah akan memuaskan rasa lapar mereka dengan pilihan yang lezat. Belajar, seperti halnya makan, adalah sesuatu yang dilakukan siswa sendiri.

Triptych Aristotelian—beri tahu mereka apa yang *akan* Anda sampaikan kepada mereka, beri tahu mereka, dan beri tahu mereka apa yang *sudah* Anda diberitahukan kepada mereka—menawarkan kerangka organisasi yang sangat baik untuk keberhasilan pengajaran yang diterapkan di MP. Dua hal penting untuk pembelajar yang diselingi dengan triptych Aristotelian adalah mengapa mendengarkan (yaitu, apa untungnya bagi saya?) dan bagaimana sekarang (yaitu, apa gunanya bagi saya?). Secara kombinasi, proses belajar mengajar yang efektif kemudian dilakukan dengan mengikuti lima langkah berurutan. Pertama, guru meninjau bagaimana konten disipliner diorganisasikan. Kedua, guru mengkomunikasikan informasi dengan jelas dan spesifik untuk meyakinkan siswa bagaimana dan mengapa mendengarkan

secara pribadi akan menguntungkan mereka. Ketiga, guru memimpin kelas interaktif dengan memanfaatkan variasi pendekatan pembelajaran diselingi dengan kegiatan pembelajaran yang menarik. Keempat, melalui penugasan, guru memperkuat pembelajaran. Kelima, siswa menggunakan pengetahuan dan keterampilan baru yang dipelajari.

Pada prinsipnya proses pembelajaran efektif diterapkan sebagai bagian dari tahapan untuk menciptakan siswa cerdas sesuai dengan *multiple intellegences* yang mereka miliki. MP ingin memastikan bahwa pembinaan terhadap peserta didik di semua tingkatan menerapkan pendekatan dan proses terbaik sehingga dari manapun latar belakang input peserta didik, jika ditangani dengan proses pembelajaran yang baik, maka akan menjadi baik. Dengan demikian, ini sekaligus menolak pandangan bahwa belajar dengan di kalangan masyarakat bahwa sekolah atau madrasah unggulan hanya mungkin jika input siswanya memang sudah berkualitas.

Mendidik generasi—agar menjadi—generasi unggul memang membutuhkan tidak hanya strategi pembelajaran, tetapi juga filsafat tentang manusia, khususnya berkaitan dengan hakekat manusia sebagai makhluk multidimensi. Pendekatan *multiple Intelligences* dan *The Best Learning Process* yang selama ini diterapkan, bukan hanya sejalan dengan konsep manusia sebagai makhluk multidimensi, tetapi juga telah mengantarkan MP menjadi madrasah unggul dengan pola pembelajaran yang didesain berdasarkan kebutuhan siswa (*based on student needs*).



Gambar. 4.21

Metode mengajar guru untuk para peserta didik yang memiliki kecenderungan Kecerdasan di bidang bahasa (*linguistik*) dan Kecerdasan dibidang angka dan logika (*Matematis-Logis*) di MA Pembangunan Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta

Inovasi Kurikulum

Bagian yang tidak kalah penting dari praktik terbaik (*best practices*) yang dilakukan MP adalah inovasi, modifikasi, dan improvisasi dalam penyusunan kurikulum—yang terlihat dalam dokumen KTSP—setiap tahun pembelajaran. Inovasi, modifikasi dan improvisasi kurikulum yang dilakukan secara periodik setiap tahun penting dilakukan mengingat ilmu pengetahuan terus berkembang, zaman terus berubah, dan karakter peserta didik dalam setiap tahun pun berbeda. Oleh karena itu, MP secara periodik melakukan review dan workshop kurikulum dengan mengundang nara sumber internal dan eksternal sehingga diskusi tentang pengembangan kurikulum lebih komprehensif. Perkembangan ilmu, perkembangan zaman, dan perubahan karakter siswa merupakan pertimbangan utama dalam review dan workshop tersebut.

Tagline MP yang sudah demikian populer dalam soal kurikulum adalah: “apapun kurikulumnya, Madrasah Pembangunan UIN Jakarta Solusinya”. Tagline tersebut mengandung pengertian bahwa MP selalu siap beradaptasi dengan perubahan kurikulum—atau sistem

pembelajaran—pada pada level nasional karena ciri khas dan keunggulan yang dimiliki MP. Berbagai program pembelajaran yang telah dirancang MP memberikan jaminan keberlangsungan MP sebagai madrasah yang menanamkan karakter akhlak mulai, inetgrasi ilmu pengetahuan Islam dan umum, dan *life skill*. Kegiatan ekstrakurikuler MP juga merupakan modal untuk beradaptasi dengan perkembangan baru, tetapi sekaligus tetap berpegang teguh kepada yang lama yang lebih baik. Antara lain, pembelajaran al-Qur'an dengan metode Tilawati, Literasi Day, Coding bagi unit Madrasah Ibtidaiyah, program Bilingual Tahfiz dan Sains bagi unit Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Kurikulum Riset bagi unit Madrasah Aliyah (MA), penerapan metode pembelajaran berbasis STEAM (*Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics*) untuk TKIP, penerapan pembelajaran berbasis *multiple intellegencies* dan *best learning process*, dan pembelajaran digital (*digital learning*).

Pembelajaran *Full Day School* dalam Sepekan

Madrasah Pembangunan dan Sekolah Islam Pembangunan menerapkan pembelajaran dari pagi hari hingga sore hari (*full day school*). Pembelajaran dengan model *full day school* mensyaratkan persiapan pembelajaran yang lebih matang karena siswa akan seharian berada dalam lingkungan sekolah dan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk belajar. Model *full day school* dipilih pertama-tama secara umum dapat meningkatkan motivasi belajar siswa mereka memiliki lebih banyak waktu di sekolah, dan dengan demikian meningkatkan intensitas belajarnya. Lebih dari itu, MP memiliki pertimbangan berikut. Pertama, MP ingin menjadikan madrasah sebagai rumah kedua bagi para peserta didiknya. Kedua, dengan model *full days school*, para peserta didik akan lebih banyak melakukan kegiatan di madrasah yang merupakan lingkungan belajar. Ketiga, dengan model *full day school* madrasah dapat melakukan pembelajaran secara efektif, pembinaan-pembinaan dapat berjalan dengan optimal—baik pembinaan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler mengingat guru dan siswa memiliki waktu yang luasa untuk melakukan kegiatan belajar dan mengajar di madrasah. Sistem pembelajaran yang bersifat *full day* dapat menjadi model pembelajaran terbaik yang juga menjadi

praktik baik (*best practice*) yang dilakukan secara berkelanjutan (*istiqamah*).

Lembaga Pustaka MP

Pustaka MP adalah salah satu lembaga baru yang dibentuk pada periode Dr. H. Bahrissalim, MA menjabat Direktur MP. Lembaga ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut: pertama, untuk memfasilitasi para peserta didik dan guru dalam bidang tulis menulis (karya ilmiah). Kedua, sebagai wadah bagi para peserta didik dan guru untuk menyalurkan hobi tulis menulis sesuai minatnya masing-masing. Ketiga, menjadikan para guru dan peserta didik agar cinta dan suka dengan dunia literasi (karya ilmiah). Sudah banyak karya-karya terbaik peserta didik dan guru yang telah dipublikasikan, baik yang bersifat fiksi atau nonfiksi. Lembaga ini tentunya dapat menjadi wadah bagi peserta didik dan guru untuk mempublikasikan karya-karya terbaiknya sesuai dengan bakat dan minatnya.



Gambar. 4.22

Salah satu karya yang dihasilkan oleh tim Pustaka MP adalah Buku Alfa Numerik dan Refleksi Konsep dan Pengalaman PJJ Karya Abdul Mutaqin, S.Ag.



Gambar. 4.23

Salah satu karya yang dihasilkan oleh tim Pustaka MP adalah Buku Desain Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) MA Pembangunan Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta Di Era Pandemi Covid-19 Karya Zakariya, MA., dan Novel Satu Hari Bersama Ayah Karya Dedi Santosa, M.Pd.



Gambar. 4.24

Salah satu karya yang dihasilkan oleh Kepala dan Guru TKIP, Ibu Linda Martiana Andryani, ST, M.M. dan Ibu Neni Nasriyah, S.Pd.I. Buku Desain Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di TKIP Di Era Pandemi Covid-19



Gambar. 4.25

Salah satu karya yang dihasilkan oleh Peserta Didik tingkat MTs berupa Antologi

BAGIAN III: Dinamika Pendidikan dan Sosial Kelembagaan

BAB 5 Menapaki Era Madrasah Digital

Pengantar

Perkembangan teknologi komunikasi berbasis internet telah menciptakan ulang dunia menjadi benar-benar baru. Berbagai platform berbasis internet telah mengubah berbagai aspek dalam kehidupan. Dunia sudah tidak lagi dibatasi oleh jarak (*death of distance*) dan muncul dalam bentuk baru sebagai “desa buana” (*global village*). Secara *real time* sekarang ini seluruh peristiwa yang terjadi dan berlangsung di seluruh pojok dunia dapat diakses dari mana pun. Manusia sepenuhnya terhubung melalui jaringan berbasis internet dan teknologi komunikasi yang melekat pada dirinya: bisa berupa komputer maupun *smartphone*. Tidak ada hari di mana manusia tidak terkoneksi, baik dengan teknologi komunikasi, maupun dengan sesamanya yang bisa jadi berada di ujung dunia lain. Cara manusia menghabiskan waktu, berkomunikasi, gaya hidup, bahkan budaya belajar pun mengalami perubahan. *Laisure* kini dilakukan dengan memanfaatkan media sosial—Facebook, Youtube, atau TikTok, jalinan komunikasi disambungkan melalui video call berbasis WhatApps, gaya hidup diekspresikan melalui media sosial, dan belajar mengalami perkembangan dengan konsep *electronic-learning*, atau e-learning berbasis internet.

Generasi milenial, mereka yang lahir pada milenium kedua, merupakan generasi hasil bentukan teknologi komunikasi berbasis internet tersebut. Mereka seringkali disebut sebagai generasi *digital native* dalam pengertian bahwa sejak kecil sudah mengenal, hidup bersama, dan mengangkses *screen* (layar) yang berasal komputer atau *smartphone* yang mereka miliki. Mereka memiliki akses yang tidak terbatas terhadap informasi. Apa pun yang mereka ingin tahu, tinggal *klik*, maka informasi yang dikehendaki akan muncul di layar dengan beragam pilihan perspektif. Boleh dikatakan mereka seperti kebanjiran informasi apa saja, baik berupa peristiwa, belanja, *platform* baru, atau sekadar bagaimana cara menghabiskan waktu. Harus diakui bahwa di dalamnya terdapat juga informasi atau *platform* tentang cara belajar efektif, bahkan belajar membaca al-Qur'an sekalipun. Meskipun demikian, dalam konteks ini kemampuan untuk berpikir kritis dan selektif dalam menerima informasi menjadi pagar yang harus ditegakkan dalam diri mereka—namun harus dengan memberikan kesadaran, bukan paksaan. Ini jelas menjadi tantangan baru dunia pendidikan.

Pada 2020, dunia juga mengalami pembentukan ulang dengan munculnya Pandemi Covid-19, yang berlangsung selama dua tahun lebih. Dunia seperti berhenti karena penduduknya berdiam diri di rumah menghindari penyebaran virus yang tak dikenali. Seluruh aktivitas dilakukan dari rumah. Belanja dilakukan dari rumah dengan memanfaatkan *platform* belanja, kerja dilakukan dari rumah dengan memanfaatkan jaringan komputer sehingga populer istilah WFH (*Work From Home*), pentas musik, seminar, dan belajar, semua dilakukan dari rumah. Dalam konteks belajar, situasi diuntungkan karena jauh sebelum pandemi, program-program pembelajaran jarak jauh (*distance learning*) berbasis internet sudah mulai dirumuskan. Modul dan buku dalam bentuk elektronik juga sudah mudah diakses. Koneksi berbasis video juga mulai berkembang—dalam konteks ini *Zoom* merupakan platform digital yang paling banyak dimanfaatkan. Hanya karena koneksi berbasis internet yang dilengkapi beragam *platform* digital, dunia terus berputar ketika pandemi melanda.

Ketika pandemi berakhir, pembelajaran berbasis digital menjadi

warisan berharga yang akan terus berkembang. Konsep *hybrid*, yang mengombinasikan antara aktivitas berbasis *online* (*daring*, di dalam jaringan) dan aktivitas *offline* (*luring*, di luar jaringan)—istilah yang muncul pada era digital—muncul sebagai konsep baru dalam beraktivitas. Sampai hari ini, aktivitas *hybrid* menjadi pilihan alternatif dalam berbagai bidang, terutama yang kemudian menjadi terdepan adalah bidang pendidikan. Mempertimbangkan semua itu, digital learning merupakan masa depan yang harus dijemput, jika masa depan lembaga pendidikan semakin maju dan berkembang. Pilihan inilah yang dilakukan MP ketika Pandemi Covid-19 berakhir dan kehidupan normal baru (*new normal*) dimulai.

Madrasah Digital

Sebagaimana lembaga pendidikan lain, baik sekolah, madrasah maupun universitas, pembelajaran berbasis digital di MP secara intensif dimulai ketika Pandemi Covid-19 melanda dan menghentikan aktivitas sekolah seperti biasa. Platform *Zoom*, *Google Classroom*, dan *Video Call berbasis WhatsApp*, dipergunakan sebagai media pembelajaran yang menghubungkan antara guru dan murid, atau disebut juga “kelas digital”. Praktik “kelas digital” berlangsung sejak awal sampai dengan berakhirnya pandemi yang secara resmi diumumkan pemerintah pada 2022. Implikasi tidak terduga dari situasi sulit ini adalah siswa terbiasa dengan kelas digital, guru terbiasa dengan penyampaian materi secara digital, dan digitalisasi menjadi kebutuhan. Keputusan kemudian diambil dengan optimis dan yakin: MP akan menerapkan pembelajaran berbasis digital di kelas. Ini sekaligus mengantarkan MP masuk pintu gerbang pembelajaran digital sekaligus mendeklarasikan diri sebagai “madrasah digital”.

Penggunaan Device Tablet

Kebijakan tentang madrasah digital dimulai pada tahun pelajaran 2022-2023 setelah dilakukan setahun sebelumnya. Perubahan besar dilakukan dalam penyelenggaraan proses pembelajaran di kelas—dari kelas satu, tujuh dan sepuluh. Pertama, siswa belajar dalam ruang kelas pintar (*smart class*) di mana akses terhadap internet dan media pembelajaran modern tersedia dan mudah diakses. Kedua, setiap

siswa menggunakan perangkat, atau *device tablet* yang terkoneksi dengan aplikasi-aplikasi online digital pembelajaran yang dapat diputar dan dimainkan. Berada di kelas pintar dengan perangkat pembelajaran yang sesuai dengan karakter siswa sebagai *digital native*, menempatkan siswa di cakrawala dunia yang penuh dengan informasi sehingga belajar menjadi kegiatan yang menyenangkan. Guru, di samping menjalankan fungsi tradisionalnya, juga bertindak sebagai *gatekeeper* sehingga proses pembelajaran tetap fokus pada materi yang menjadi subjek. Tablet juga berfungsi sebagai pengganti buku teks yang jumlahnya banyak dengan bobot yang berat yang selama ini dianggap membebani siswa.

Bahan Ajar Digital: e-Modul

Menyiapkan bahan ajar digital dalam bentuk e-modul merupakan implikasi dari pilihan menerapkan pembelajaran digital. Ini menjadi tugas yang menantang para guru MP. E-modul interaktif disusun para guru di satuan pendidikan masing-masing. Dengan dimulainya pembelajaran berbasis digital di kelas-kelas yang sudah ditentukan, maka e-modul mata pelajaran yang dibuat oleh para guru, sebagai pengganti buku sumber yang bentuk cetak, mulai dipergunakan. E-modul yang sudah dibuat oleh guru tersebut kemudian disimpan di *Learning Management System (LMS) SMART MP* yang kemudian dapat diakses secara *realtime* oleh peserta didik kapan pun dan dimanapun. Dalam pelaksanaannya, para guru dan peserta didik terbantu dengan adanya e-modul tersebut dan menjadikan proses pembelajaran lebih menarik, interaktif dan fleksibel.

Learning Management System (LMS) SMART MP dalam Pembelajaran

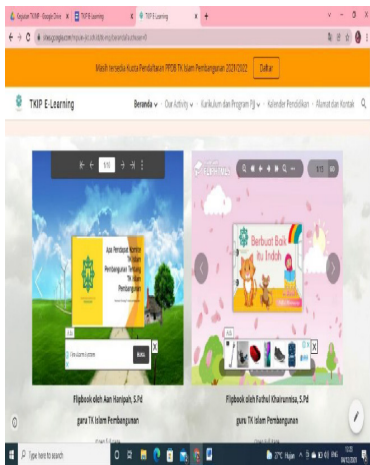
LMS SMART MP, yang dibangun dan dikembangkan tim digital MP, merupakan *Learning Management System* mandiri yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan di MP. Guru memanfaatkan LMS dengan mengupload materi, tugas, instruksi pembelajaran dan memberikan nilai, memonitor hasil latihan peserta didik yang dikumpulkan ke LMS, dan berbagai fungsi pembelajaran lainnya. LMS jelas sangat membantu guru dalam proses administrasi pembelajaran

dan pelaksanaan pembelajaran. Sedangkan untuk peserta didik, memanfaatkan LMS SMART MP mengakses e-modul dan informasi lain yang berkaitan dengan kebutuhan siswa di kelas. LMS telah membantu mengurangi catatan dengan kertas dan dapat memanfaatkan secara maksimal materi yang tersimpan setiap pertemuan—yang telah diupload guru. Di samping itu, siswa juga dapat mengumpulkan tugas atau latihan secara *realtime*, kapan pun dan di mana pun, tidak harus mengumpulkan langsung saat tatap muka dengan guru.

Hybrid Learning

Proses pembelajaran digital yang dikembangkan membawa suasana baru di kelas. Tercipta suasana belajar yang interaktif, *student-based needs*, menyenangkan, dan dengan pendekatan yang semakin variatif. Ini dimungkinkan karena menggunakan device tablet, bahan ajar digital e-modul, dan divariasikan dengan aplikasi-aplikasi pembelajaran digital lainnya. Langkah berikutnya yang patut dicatat adalah penerapan sistem *hybrid learning*, atau *blended learning* sehingga terjadi integrasi pendekatan pembelajaran.

Berkaitan dengan digital madrasah yang dicanangkan, dan *hybrid learning* yang dikembangkan, pada awal 2022, MI Madrasah Pembangunan meraih Juara 1 Kategori Madrasah Digital Terbaik dan Juara 1 Kategori Pembelajaran Digital Terbaik Tingkat Madrasah Ibtidaiyah se-Provinsi DKI Jakarta; Untuk tingkat Madrasah Tsanawiyah MP juga meraih Juara 1 Kategori Pembelajaran Digital Terbaik untuk tingkat Madrasah Tsanawiyah se Provinsi DKI Jakarta; dan begitu juga dengan Madrasah Aliyah Pembangunan MP yang meraih Juara ke-dua untuk Pembelajaran Digital untuk Tingkat Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta se-Provinsi DKI Jakarta dalam ajang Madrasah Digital Awards tahun 2022.



Susu Ajaib & Bunga Kertas Mekar di Air
#generasiemastkip



Gambar. 4. 26
Kegiatan Pembelajaran digital di TKIP dan SDIP



Gambar. 4. 27
Kegiatan Pembelajaran digital di MA Pembangunan

***Paperless Office* dalam Keseharian**

Penerapan pembelajaran berbasis digital secara langsung berdampak pada layanan keseharian kepada para peserta didik, orang tua, guru dan *stakeholders* lainnya. Salah satu dampak positif yang patut dicatat adalah berkurangnya secara drastis penggunaan kertas sebagai penopang sistem administrasi. Layanan administrasi pembelajaran, surat menyurat, keuangan dan yang lainnya, yang sebelumnya berbasis kertas, telah berakhir. MP bermigrasi ke *paperless office*.



Gambar. 28
Pembagian hadiah lomba Jakarta Madrasah Digital Awards tahun 2022

Podcast Sebagai Media Promosi Baru

Zaman terus berubah, ilmu pengetahuan terus berkembang, dan teknologi komunikasi berbasis internet, telah membentuk ulang komunikasi massa. Media komunikasi dan promosi tidak lagi cukup menggunakan media-media tradisional seperti spanduk, atau surat kabar, bahkan media elektronik seperti radio dan televisi. Komunikasi dan promosi melalui media-media tersebut tetap dilakukan MP—sebagaimana sejak periode awal dulu dilakukan. Akan tetapi, sejalan semakin kuat dan berpengaruhnya media sosial, MP mengambil langkah untuk memanfaatkan media sosial untuk memperkaya media promosi.

Pilihan diwujudkan pada *podcast* yang ditayangkan melalui Youtube. Dengan *podcast*, maka ide dan informasi baru tentang pendidikan secara umum, inovasi dan kreativitas pembelajaran di MP, prestasi yang diraih siswa, dan sebagainya dapat disebarkan dengan barasi yang detil dan mudah dipahami. Tidak hanya itu, dengan *podcast* sekaligus juga dilakukan dokumentasi dalam bentuk jejak digital yang mudah untuk diakses kembali. Dengan demikian, informasi terbaik MP dapat diakses melalui Youtube dalam format *podcast*. Konten *podcast* tidak terbatas pada satuan pendidikan saja, tetapi meliputi Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), Taman kanak-kanak Islam Pembangunan (TKIP) dan Sekolah Dasar Islam Pembangunan (SDIP).

Penyebaran informasi melalui *Podcast* di MP diwadahi sebuah lembaga tergolong baru. Akan tetapi, sebagai sebuah kegiatan berbasis digital, *podcast* sudah sering dilakukan, terutama berkaitan dengan topik-topik yang menginspirasi banyak orang. *Podcast* sudah mengundang banyak narasumber. Mereka adalah para ahli, baik dari unsur internal, seperti guru, pengurus yayasan, dan unsur eksternal seperti para profesional bidang pendidikan. *Podcast* juga menghadirkan siswa dan alumni berprestasi. Dengan demikian, *Podcast* menjadi salah satu kunci keberhasilan pendidikan dan pengajaran di Madrasah dan Sekolah Islam Pembangunan, dan menjadi sebuah praktik baik.

Berikut gambar saat *Podcast* dengan beberapa Narasumber



Gambar. 4.29

Zakariya, MA (Kiat Sukses Meraih Juara Nasional di ajang Anugerah GTK Madarrasah Berprestasi tahun 2021) & Asep Mutaqin Abror, M.Pd (Pembelajaran Berbasis Project di SD Islam Pembangunan)



Gambar. 4. 30

Dr. Bahrissalim, Dr. Imam Marzuki Shofi, M.T dan Dr. Tantan Hermansyah (Metaverse dalam Pendidikan Islam) & Prof. Dr. M. Arief Mufraini, M. Si dan dr. Fiki Aprilino Risenta, Sp.B (Peran dan Kiprah alumni MP)

BAB 6

Kepak Sayap Terbuka: Menatap Peluang Masa Depan

Pengantar

Ketika didirikan pada dekade 1970-an, MP menghadapi situasi politik pendidikan yang tidak menguntungkan madrasah. Pada saat itu, madrasah merupakan lembaga pendidikan marginal di Indonesia, dibandingkan dengan sekolah umum. Siswa madrasah harus berada di madrasah sampai tingkat madrasah aliyah. Tidak dimungkinkan bagi siswa madrasah untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi ke sekolah umum. Meskipun demikian, komitmen *founding fathers* MP kepada madrasah yang sangat kuat, mendorong mereka untuk tetap memilih mendirikan madrasah daripada sekolah umum. Pilihan yang tidak salah karena hanya selang beberapa waktu, Menteri Agama Prof. Mukti Ali, yang juga tokoh pendiri MP, berinisiatif mengeluarkan kebijakan SKB Tiga Menteri pada 1975. Dengan SKB Tiga Menteri, maka isolasi madrasah berakhir, dan lulusan madrasah memiliki alternatif untuk melanjutkan pendidikannya yang lebih tinggi ke sekolah umum. Madrasah sendiri, sebagai lembaga pendidikan Islam khas Indonesia, memiliki keleluasaan untuk berkembang menjadi madrasah favorit dan unggul.

Perjalanan MP kini telah mencapai setengah abad. Untuk sampai pada situasi sekarang, MP telah melewati perjalanan panjang yang

penuh tantangan. Dari sebuah gedung, kini MP telah menjadi kompleks belajar yang memadai dengan sarana dan prasarana yang lengkap; dari madrasah yang berlokasi di kampung (*village*), kini telah muncul sebagai madrasah yang menjadi bagian dari *global village*; MP telah muncul sebagai salah satu “madrasah digital” di Indonesia yang siap memasuki kompetisi nasional dan global. MP juga telah membangun (Sumber Daya Manusia), baik guru dan tenaga kependidikan, yang berkualitas dan profesional. Mereka telah dipersiapkan memasuki dunia baru pembelajaran yang menjadi tuntutan lembaga pendidikan di masa depan.

Bagian ini akan menguraikan tentang tantangan MP dan bagaimana MP mengatasi tantangan itu sehingga tetap menyongsong masa depan dengan optimis. Pertama-tama akan didiskusikan berbagai tantangan eksternal, terutama berkaitan dengan semakin ketatnya kompetisi antarlembaga pendidikan swasta. Kedua, akan diuraikan tentang langkah yang ditempuh MP untuk menjaga eksistensinya dari perspektif internal. Langkah-langkah seperti memberikan prioritas terhadap pendidikan nilai, langkah untuk melakukan transformasi menuju peningkatan mutu, langkah perbaikan, pengembangan, dan langkah adaptasi terhadap perkembangan paling mutakhir—dengan tetap memelihara ciri khasnya—merupakan sebagian langkah yang telah dilakukan untuk memperkuat kelembagaan MP. Terakhir akan dibahas tentang penguatan ekosistem digital.

Memasuki Era Kompetisi

MP sekarang ini tidak lagi menjadi pilihan tunggal madrasah unggul. Sejalan dengan perkembangan masyarakat Muslim kelas menengah di Ciputat dan sekitarnya, kebutuhan akan pendidikan yang berkualitas semakin besar. Pertumbuhan perubahan di sekitar Ciputat menjadikan jumlah anak usia sekolah juga mengalami kenaikan. Celah ini dibaca kalangan pelaku pendidikan dengan mendirikan sekolah-sekolah baru yang menjanjikan proses pembelajaran unggul. Di antara sekolah-sekolah yang bermunculan di wilayah Ciputat antara lain, Labschool Cirendeui, LA FATH, Sekolah Ruhama (Labschool UHAMKA), MUMTAZA, Kharisma Bangsa, Al-Azhar dan Global Islamic School (GIS).

Yang juga harus diperhitungkan adalah MTsN 1 Tangerang dan MTsN 3 Jakarta. Sekolah-sekolah elite tersebut—jika dikatakan demikian—menawarkan proses pembelajaran berbasis multimedia dengan berbagai tawaran kegiatan ekstrakurikuler yang bermuara pada pengembangan diri siswa.

Merespons perkembangan tersebut, MP tidak pernah surut langkah dalam memajukan diri. Komitmen kuat MP adalah mempertahankan dan memelihara identitas madrasah sebagai tempat penyemaian nilai-nilai agama dan akhlak mulia. Di samping itu, juga ditambahkan kemampuan membaca al-Qur'an yang merupakan keterampilan dasar yang harus dimiliki seorang Muslim. Arah yang akan dicapai adalah memperkuat SDM guru, pada semua tingkatan, dalam penguasaan teknologi, kemampuan berbahasa asing (Arab dan Inggris), membaca al-Qur'an, dan kapasitas menyajikan pembelajaran dengan metode berbasis digital.

Komitmen "mendidik dengan hati", dan mendorong siswa untuk memiliki keterlibatan aktif dalam kehidupan sosial, selalu berkomunikasi dengan santun, merupakan fundamen guru MP dalam seluruh proses pembelajaran. Inilah kekuatan yang dimiliki MP dan sekaligus menjadi ciri khas dan keunggulannya. Karena pola pendidikan seperti ini, tidak sedikit kemudian keluarga yang berturut-turut tiga generasi belajar di MP: dari mulai ayah, istri, dan anaknya belajar di MP. Tantangan eksternal MP berupa kehadiran sekolah-sekolah baru di sekitar Ciputat justru semakin menjadikan MP kompetitif.

Memprioritaskan Pendidikan Nilai

Pendidikan merupakan proses yang bersifat dinamis. Aspek-aspek di luar pendidikan, seperti perubahan sosial, perkembangan teknologi-komunikasi, lingkungan, budaya dan politik—untuk hanya menyebutkan beberapa saja—memiliki pengaruh besar terhadap proses pendidikan. Lebih dari itu, MP menyadari bahwa masa kanak-kanak dan perkembangannya merupakan masa yang rentan. Mereka membutuhkan pengasuhan dan pembimbingan, namun tidak boleh sembarangan. Pertama-tama yang harus mendapatkan perhatian adalah memenuhi apa yang mereka butuhkan. Pengasuhan dan

pembimbingan itu tidak boleh *overprotecting* dan *under-protecting*, tetapi harus seimbang antara keduanya. Oleh karena itu, sebagaimana telah disebutkan, paradigma *multiple intelligences*, benar-benar diterapkan secara konsisten dalam sistem pembelajaran di MP.

Dalam proses pengasuhan dan pembimbingan itu, pendidikan nilai menjadi penting. Nilai dalam pengertian luas sebagai baik-buruk yang mewujud di dalam konsep *akhlaq al-karimah* di dalam Islam, harus mendapatkan prioritas dalam proses pendidikan. Integrasi pendidikan nilai dalam setiap mata pelajaran kemudian menjadi misi yang diemban para guru di MP. Dengan mengintegrasikan setiap mata pelajaran dengan penanaman nilai, maka siswa tidak hanya menyerap ilmu pengetahuan yang diajarkan, tetapi menghayati dan menginternalisasi nilai yang ditanamkan para guru.

Pendidikan yang menginteragasikan subjek ilmu pengetahuan dengan nilai akan mendorong pendidikan menjadi lebih humanis. Sekolah tidak menjadi "pabrik" (*factory school*) yang menopang pasar kerja dan industrialisasi, tetapi merupakan tempat untuk "memanusiakan manusia". MP menolak konsep *factory school* yang mendidik siswa semata-mata untuk memenuhi kebutuhan dan hiruk-pikuk industrialisasi. Dalam proses pendidikan seperti ini, sukses hanya dikaitkan dengan alumni yang memiliki standar ilmu pengetahuan tertentu yang siap memasuki pendidikan lebih lanjut dan sejalan dengan kebutuhan pasar kerja. MP menempatkan penanaman nilai dalam wujud *akhlaq al-karimah* sebagaimana disebutkan sebagai prioritas utama dalam pembelajaran.

Dasar Elevasi dan Transformasi Pendidikan MP

Pendidikan merupakan upaya sistematis dan strategis dalam memperkuat kemanusiaan seseorang. Karena, hanya dengan semangat menghasilkan manusia yang berwatak manusia, maka peradaban bisa dibangun, ditegakkan dan dipertahankan. Inilah yang bagi sebagian orang disebut sebagai karakter. Karakter bukanlah sesuatu yang hadir dari ruang hampa, tetapi diaggregasi oleh suatu sistem yang mendorong karakter tersebut dikenali, dipahami, kemudian dikristalisasi dalam tindakan.

Dalam konteks itu, metode pembelajaran yang dipilih harus mampu mengantarkan pada tujuan yang telah disebutkan di atas. Metode ini yang kemudian bertanggung jawab pada proses belajar mengajar yang adaptif dengan kebutuhan zaman, tetapi tetap berkontribusi pada penguatan karakter. Kondisi orang tua peserta didik cukup beragam, kebanyakan yang menyekolahkan anaknya di MP terdiri dari masyarakat profesional dan pengusaha dengan tingkat pendidikan dan penghasilan menengah ke atas. Mereka menginginkan agar anak-anaknya berakhlak mulia. Pendidikan yang berdimensi kepada penguatan kemanusiaan itu sendiri merupakan proses pembelajaran yang diarahkan untuk membentuk manusia yang berkepribadian baik dan berperilaku baik, serta mempunyai kesadaran terhadap hak dan martabat manusia. Pendidikan ini juga bertujuan untuk mengembangkan sikap-sikap kemanusiaan seperti toleransi, kepedulian, empati, dan keadilan. Pendidikan yang berdimensi penguatan kemanusiaan harus diterapkan di semua jenjang pendidikan. Mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga pendidikan tinggi.

Hal tersebut dilakukan dengan menggunakan beberapa strategi, seperti pengulangan pelajaran kepada orang yang sama, menggunakan contoh praktis dan ilustrasi, serta melibatkan siswa dalam pembelajaran aktif. Selain itu, guru juga dapat menggunakan empati, kebaikan, dan ambisi keberhasilan siswa mereka untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang positif. Selanjutnya, guru dapat secara bertahap memperkenalkan konsep-konsep yang kompleks kepada siswa untuk memastikan mereka memahami dasar sebelum beralih ke topik yang lebih advanced. Proses belajar tatap muka dan aktivitas menulis juga dapat digunakan sebagai metode pengajaran yang efektif. Dengan menggabungkan metode-metode ini ke dalam pendidikan modern, guru dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang menarik dan efektif bagi siswa mereka.

Modal itulah yang dimiliki oleh MP dalam melakukan transformasi dan adaptasi pada perubahan sosial ekonomi budaya masyarakat Indonesia sehingga sistem pendidikan MP bisa tetap mendapatkan respons positif dari masyarakat. Hal ini bisa dilihat secara nyata pada

beragam pertumbuhan yang hadir di lembaga pendidikan. Misalnya meningkatnya jumlah lokal, meningkatnya jumlah guru, dan meningkatnya jumlah tenaga kependidikan. Meningkatnya jumlah siswa serta meningkatnya beragam program yang mendukung sistem pendidikan untuk menunjang keberhasilan siswa dalam menyukseskan kehidupannya, menjadi bukti bahwa lembaga MP memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menata dan mengelola potensi dan kepercayaan masyarakat.

Transformasi digital dalam sistem pendidikan juga secara sistematis sudah diterapkan di MP. Bahkan momentum untuk melakukan transformasi besar-besaran pada masa Pandemi Covid-19, dilakukan dengan cermat, tepat dan akurat. Menjaga agar tidak kehilangan momentum, maka digitalisasi sistem pendidikan dilakukan menyediakan infrastruktur penunjang terlebih dahulu. Setiap siswa diberikan sebuah tablet pembelajaran yang dampaknya bukan hanya meminimalisir penggunaan kertas dan juga meringankan beban bawaan buku siswa, tetapi juga efektivitas dan efisiensi dalam pembelajaran. MP menetapkan dasar-dasar yang kuat sebelum melakukan lompatan lebih jauh dalam sistem pembelajaran.

Di masa mendatang MP yang sudah siap melakukan lompatan besar dalam sistem pendidikan akan menjadi *leading sector* dalam sistem pembelajaran. *Trajectory* yang sudah dibangun selama ini, serta beragam prestasi yang telah dicapai, menunjukkan bukan hanya proses kepemimpinan yang visioner, tetapi juga manajemen dan pengelolaan yang bertanggung jawab. Di masa depan, MP menargetkan akan merealisasikan model pendidikan yang mengadopsi sistem *hybrid* atau *blending* secara lebih komprehensif di mana sebagian siswa MP tidak mesti selalu hadir di kelas, bahkan mungkin dia sedang berada di negara lain, namun tetap dapat mengikuti pelajaran dengan baik karena difasilitasi media internet sebagai sarana penghubung dengan tablet sebagai sarana belajar. Dengan proses ini, kesempatan mendapatkan pendidikan yang terbaik dari MP akan semakin terbuka luas.

Pengembangan dan penguatan sistem pendidikan dan pembelajaran yang selama ini dilakukan di lembaga MP, yang hampir

berusia setengah abad, menjadi dasar suatu gerakan model pendidikan baru yang di dalamnya mengintegrasikan semangat keislaman modern, sekaligus mendukung tegaknya NKRI, serta menguatnya nilai-nilai kebaikan yang menyeluruh pada seluruh cerita akademik MP.

Penguatan Ekosistem Digital

Satu diantara yang sangat penting dipersiapkan untuk melakukan lompatan dalam sistem pendidikan saat ini adalah bagaimana menyatukan visi digitalisasi sistem pendidikan melalui pembangunan dan penguatan ekosistem digital. Jika kita cermati prinsip-prinsip dari ekosistem digital antara lain adalah: memastikan adanya *Platform Pembelajaran Online*: Platform ini dapat berupa LMS (*Learning Management System*) atau MOOC (*Massive Open Online Course*) yang memungkinkan para siswa dan guru untuk berinteraksi dalam lingkungan belajar yang online. Dalam konteks MP, telah dipergunakan LMS dan masih akan terus dikembangkan untuk menunjang sistem pembelajaran, baik manual atau konvensional maupun pembelajaran digital.

Penguatan juga dilakukan pada "Konten Pendidikan Digital". Konten yang dimaksud dapat berupa video pembelajaran, *ebook*, atau aplikasi pembelajaran yang dibuat khusus untuk mengajar siswa di lingkungan digital. Jika proses menghadirkan beragam konten untuk pendidikan digital sudah tersedia dengan baik, solid, dan kompetitif, maka yang akan memanfaatkan setiap materi sistem pembelajaran tidak hanya siswa internal, tetapi juga publik secara luas. Karena bersifat transparan, masyarakat juga dapat ikut melakukan evaluasi dan memberikan masukan perbaikan terhadap konten pembelajaran tersebut.

Menjadi keniscayaan kemudian bagi MP untuk mengembangkan "Sistem Analitik Pembelajaran". Sistem ini akan membantu guru dalam memantau perkembangan siswa secara *real time* (rumah atau sekolah), dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pembelajaran dengan metode dan pendekatan yang tepat. Selanjutnya yang harus dikembangkan juga adalah teknologi *Augmented Reality* (AR) dan *Virtual Reality* (VR). Teknologi AR dan VR digunakan untuk optimalisasi

proses pembelajaran serta menghasilkan nuansa dan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menarik bagi siswa. Teknologi ini juga membuat proses interaksi antara siswa guru dan para pihak yang berkaitan dengan proses pembelajaran bisa lebih dalam sehingga bisa menghasilkan produk pengetahuan yang akan bermanfaat luas.

“Sistem Manajemen Sekolah” merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari semua proses tersebut. Sistem ini memungkinkan guru dan tenaga kependidikan mengatur jadwal, absensi, tugas, dan informasi lainnya yang terkait dengan administrasi sekolah secara digital, sehingga para pihak yang berkaitan dengan mekanisme dan sistem pendidikan di dalam sekolah MP bisa secara partisipatif dan aktif mengetahui ragam kegiatan materi dan muatan dari setiap proses pembelajaran.

Terakhir adalah melakukan upaya melengkapi “Perangkat Pembelajaran Digital”. Ini merupakan langkah yang harus dilakukan secara baik dan bijaksana. Dalam proses pembelajaran digital, seluruh siswa MP akan menggunakan perangkat teknologi yang mendukung proses pembelajaran di kelas, termasuk laptop, tablet, atau *smartphone*. Dan semuanya mengakses platform pembelajaran online dan konten pendidikan digital secara massif dan terintegrasi. []

EPILOG

Madrasah Pembangunan dalam Lintasan Sejarah Pendidikan Islam Indonesia

Prof. Dr. Husni Rahim, MA

Madrasah Pembangunan (MP) kini hampir setengah abad. Pengakuan atas MP sebagai madrasah unggul, tidak muncul secara tiba-tiba, tapi melalui proses panjang yang penuh tantangan dan hambatan. Alhamdulillah MP mampu mengatasinya secara kreatif.

Kita tahu pertumbuhan dan perkembangan madrasah tidak saja dipengaruhi oleh faktor internal madrasah, tapi juga oleh faktor eksternal, berupa berbagai aturan dan kebijakan pemerintah. Kebijakan tersebut ada yang bersifat membantu, tapi banyak juga yang menghambat. Hal tersebut dapat kita lihat dari sejarah pertumbuhan dan perkembangan madrasah di Indonesia di bawah ini.

Ketika MP lahir tahun 1974 posisi madrasah tengah mengalami ketegangan karena didiskriminasi dan belum diakui eksistensinya dalam undang-undang. Baru pada tahun 1975 dengan keluarnya SKB 3 Menteri (Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Menteri Dalam Negeri) madrasah diakui sama dengan sekolah. Namun dengan catatan porsi kurikulum agama berubah dari 70% menjadi 30 % dan 70% nya untuk pelajaran umum. Lulusan madrasah bisa masuk ke sekolah dan perguruan tinggi umum sebagaimana lulusan sekolah.

Dengan keluarnya SKB 3 Menteri ini, MP harus menyesuaikan kurikulumnya. Untungnya MP baru berjalan satu tahun, sehingga

lebih mudah menyesuaikan dirinya. Kebanyakan madrasah telah menerapkan porsi pelajaran umum 70% dan pelajaran agama yang 30%. Tampaknya MP langsung menggunakan Kurikulum SKB 3 Menteri dengan porsi Pendidikan Umum 70 % dan Pendidikan Agama 30 % sesuai SKB 3 Menteri, sehingga alumni Madrasah Pembangun dapat melanjutkan di sekolah umum dan juga perguruan tinggi umum. MP ketika itu berpromosi bahwa lulusan MP dapat melanjutkan ke sekolah umum dan perguruan tinggi umum di samping ke madrasah dan perguruan tinggi agama Islam, sebagaimana diuraikan pada bagian 1 di latar belakang pendirian MP.

Tantangan MP dalam menggunakan kurikulum SKB 3 Menteri cukup berat, karena kualitas pelajaran umumnya *harus baik, bahkan lebih baik dari sekolah* agar dapat menjadi pilihan utama masyarakat. Di sisi lain MP juga harus mencerminkan ciri madrasah sebagai sekolah agama yang tampak dari muridnya yang taat beribadah, mampu membaca Al-qur'an dan berakhlak baik serta kelihatan pula dari suasana keagamaan di MP.

Bagaimana MP mensiasati agar kualitas lulusannya sama bahkan lebih dari lulusan sekolah yang mengajarkan pelajaran umumnya 100%, sedangkan MP hanya mengajarkan dengan porsi 70%. Di sisi lain, MP harus menerapkan pelajaran agama 30%.

Tantangan berikutnya, setelah umat Islam berhasil memasukkan madrasah dalam sistem Pendidikan Nasional melalui UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Posisi madrasah makin kuat karena sudah dalam UU Pendidikan Nasional bukan lagi SKB 3 Menteri. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan kurikulum madrasah sama dengan kurikulum sekolah ditambah ciri khas agama Islam. Ini bermakna kurikulum madrasah 100% plus mata pelajaran ciri khas. Berarti beban kurikulum madrasah jauh lebih berat dari beban sekolah. Apalagi bila madrasah menerjemahkan ciri khas Islam itu dengan mengajarkan pelajaran agama yang selama ini sudah ada di madrasah yaitu Al-Qur'an, Hadist, Tauhid, Fiqh dan Sejarah Kebudayaan Islam (SKI). Penerjemahan seperti ini tentu memperberat beban madrasah dibanding sekolah. Beratnya beban tersebut akan berdampak pula pada kualitas, sehingga sulit bagi madrasah untuk menyaingi kualitas

sekolah. Masih muncul pemikiran banyak madrasah bahwa madrasah harus menyiapkan calon ulama, namun dengan posisi pelajaran Islam hanya dalam bentuk ciri khas Islam, tentu sangat terbatas waktu yang tersedia.

Sebenarnya dalam perjuangan umat Islam untuk mendapatkan pengakuan pemerintah itu adalah masuknya madrasah dan LPI (Lembaga Pendidikan Islam) lainnya dalam Sistem Pendidikan Nasional. Namun perjuangan yang didapat dalam UU No. 2 tahun 1989 baru pengakuan madrasah saja, sehingga madrasah keagamaan yang berfokus penyiapan calon ulama yang berpengetahuan umum belum diakui. Barulah pada UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berhasil diakui oleh pemerintah.

Madrasah Pembangunan berada dalam arus dan gejolak perubahan kebijakan pemerintah tersebut. MP menghadapi dan harus menerapkan kurikulum 70% umum dan 30% agama pada SKB 3 Menteri. Lalu menghadapi lagi kurikulum 100% sama sekolah plus ciri khas Islam pada UU.No.2 Tahun 1989.

MP berhasil menampilkan diri sebagai madrasah yang berani bersaing dengan sekolah dalam kualitasnya, serta menampakkan ciri khas sebagai sekolah Islam dalam suasana dan gejolak kebijakan pemerintah tersebut. Inilah yang menjadi daya tarik MP. Keberhasilan ini ditampakkan dengan banyaknya program yang dilakukan MP secara bertahap seperti berikut ini.

Dalam menghadapi tantangan berat tersebut MP berusaha keras agar lembaganya tetap eksis dan unggul sambil mengikuti gerak dan gejolak perkembangan kebijakan pemerintah seiring dengan perjuangan umat Islam dalam menghadirkan madrasah dan LPI sebagai bagian dari pendidikan nasional.

Madrasah Pembangunan cukup jeli memilih strategi dan program untuk tetap eksis dan berkualitas serta mampu bersaing dengan sekolah umum. Strategi dan program tersebut dapat kita lihat dari uraian utama buku ini. Ada hal yang menarik dalam pembinaan dan pengembangannya MP menerapkan tiga strategi dasar yaitu penguatan lembaga , pembinaan SDM guru dan tenaga kependidikan dan penambahan sarana prasarana. Kebijakan MP ini sesuai dengan hasil

penelitian UNDP bahwa kualitas suatu sekolah ditentukan oleh Guru 48%, Manajemen 30% dan sarpras 22%. MP tampaknya mengikuti pola ini di mana perhatian pada pembinaan diarahkan pada tiga aspek tadi seperti diungkapkan dalam bagian dua dan bagian empat buku ini.

Guru menjadi fokus utama, karena dalam penerapan konsep *best proses* memerlukan guru professional, guru panggilan hati yang mencintai muridnya serta memiliki kemampuan mendidik secara baik. Guru MP dilatih menggunakan bahan ajar digital dalam upaya PBM berbasis digital serta berbagai program peningkatan kualitas guru telah dan akan terus dilakukan.

Fokus manajemen yang dilakukan MP juga cukup strategis di mulai dengan penguatan lembaga, memperbaiki tata kelola dan melakukan digitalisasi madrasah serta penggunaan *podcast* sebagai media komunikasi serta menetapkan pola belajar *full day* dan juga penggunaan *paperless* dalam keseharian serta bermitra dengan berbagai Lembaga luar.

Fokus sarana, walaupun perannya tidak sebesar guru dan manajemen, tapi menjadi penunjang untuk memudahkan, mempercepat capaian dan membuat suasana menyenangkan juga menjadi perhatian MP. Walaupun dalam buku ini tidak diuraikan secara khusus, perhatian terhadap sarana dan prasarana tersebut terlihat sangat kuat.

Perkembangan MP seirama dan mengikuti perjuangan umat Islam agar madrasah/LPI mendapatkan pengakuan dan penghargaan yang sama dengan sekolah sebagai bagian dari sistem Pendidikan Nasional. Perjuangan umat Islam tersebut dapat kita kategorikan dalam tiga tahapan besar yaitu; pertama Keragaman Lembaga Pendidikan Islam (LPI) sebelum dan di awal kemerdekaan. Kedua, perjuangan menuntut eksistensi dan, Ketiga Perjuangan menampilkan keunggulan dan siap bersaing

Keragaman LPI Sebelum dan di Awal Kemerdekaan

Sebelum madrasah hadir, telah ada lembaga pendidikan keagamaan dalam bentuk, pesantren, meunasah, surau, rangkang, langgar dan berbagai bentuk lain yang mengajarkan agama Islam, baik

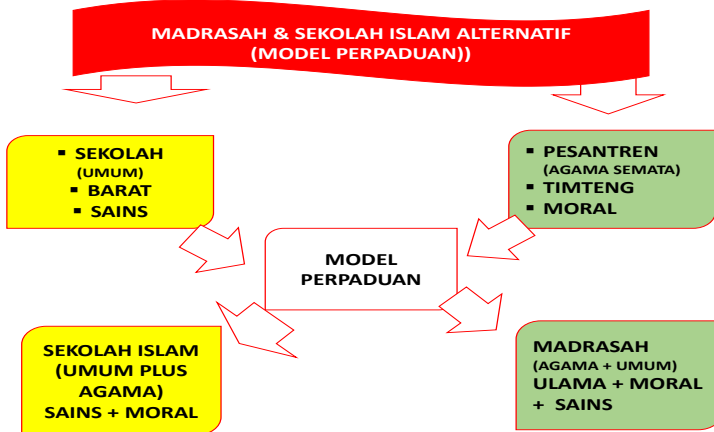
untuk menyiapkan ulama maupun untuk membuat orang menjadi muslim yang baik. Kemudian di sisi lain telah ada juga lembaga pendidikan yang di bawah pemerintah kolonial Belanda di Indonesia dalam bentuk sekolah yang diperuntukan bagi golongan Eropa, bagi golongan Timur Asing dan bagi golongan Bumi Putera yang fokus mengajarkan ilmu-ilmu umum untuk menyiapkan kelompok intelektual dan kelompok pegawai pemerintahan kolonial Belanda. Kedua bentuk lembaga pendidikan tersebut mempunyai yang berbeda, satu fokus pada pengajaran agama dan satu lainnya fokus pada pelajaran umum.

Mencermati dua pola pendidikan tersebut, para tokoh nasionalis dan agama (Hatta, Sukiman, Natsir, Hasyim Asyari) melihat bahwa dua tujuan lembaga pendidikan tersebut diperlukan untuk bangsa Indonesia. Namun tidak dalam bentuk dikhotomis tapi dalam bentuk sinergis. Pengajaran agama tetap diperlukan dan pengetahuan umum juga diperlukan. Muncul ide dari beberapa tokoh Islam untuk memadukannya dalam suatu lembaga pendidikan. Lalu bentuknya seperti apa? Lahirlah ide membuat sekolah agama yang juga mengajarkan pelajaran umum yang kemudian dikenal dengan nama Madrasah. Jadi ide dasar dari lahirnya madrasah ingin menghasilkan dua produk dari lembaga pendidikan keagamaan dan pendidikan umum. Ketika itu dikenal istilah "menyiapkan ulama yang intelek dan intelektual yang ulama". Kalau kita terjemahkan secara lebih aktual menyiapkan calon intelektual sebagai seorang muslim yang baik. Begitu juga sebaliknya menyiapkan calon ulama yang berpengetahuan umum yang baik.

Pada awalnya bentuk sinergi tersebut di coba dengan adanya pelajaran agama dan pelajaran umum di madrasah. Kemudian muncul perdebatan bagaimana membagi fokus agama dan umum tersebut. Ada pendapat pada madrasah porsi agamanya harus lebih banyak dari porsi pengetahuan umum. Pendapat lain pengetahuan umumnya harus lebih banyak dari pengetahuan agama. Ada juga yang berpendapat sama banyak muatan agama dan umum di lembaga pendidikan tersebut.

Pada kenyataannya materi yang porsi umumnya lebih banyak dari agama membuat lembaga pendidikan dengan nama "Sekolah

Islam”, dan yang porsi agamanya lebih banyak dari pengetahuan umum memberi nama lembaga pendidikannya dengan “madrasah”. Penamaan madrasah pengaruh dari Timur Tengah dari Bahasa Arab dan penamaan sekolah pengaruh dari Barat (Belanda dan Inggris menyebut *school* dan Perancis menyebut *écola* hampir mirip dengan Portugis menyebut *ecola*). Untuk jelasnya lihat bagan berikut ini:



Gambaran tersebut dapat kita lihat dengan munculnya beragam nama dan bentuk lembaga pendidikan Islam seperti berikut ini:

1. Pesantren Tebu Ireng, 1899;
2. Madrasah Jami'at Khair, 1905;
3. Mambaul Ulum Surakarta (sekolah penghulu), 1905;
4. Madrasah Tarbiyah Islamiyah Candung, 1907;
5. Sekolah Adabiyah di Padang, 1909;
6. Normal Islam (Mahmud Yunus) di Padang, 1913;
7. Sumatra Thawalib di Padang Panjang, 1916;
8. His met de Qur'an Muhammadiyah
9. Kweekschool Muhammadiyah Yogyakarta
10. Mu'allimin Muhammadiyah, Solo, Jakarta
11. Kulliyatul Muballighin/ Muballighat, Padang Panjang
12. Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah dll

Lembaga-lembaga pendidikan Islam tumbuh dan berkembang dengan baik. Kehadiran LPI ini telah memberi peluang yang lebih luas bagi anak-anak Bumi Putera yang sangat sulit untuk masuk di lembaga pendidikan sekolah pemerintah kolonial Belanda. LPI tersebut tumbuh subur dan berkembang luas dengan semangat memajukan umat Islam. LPI tumbuh dan berkembang dengan menampilkan identitas berwujud LPI/madrasah yang "Islami, Populis, Beragam dan Berkualitas".

"Islami" pada LPI/madrasah, mencerminkan pendidikan madrasah sebagai lembaga pendidikan yang suasana dan kehidupan para peserta didik, pendidik dan para penghuni lainnya mengamalkan ajaran Islam dengan baik. Islami merupakan identitas utama yang harus tercermin dalam kurikulum dan proses pendidikan. Berbeda dengan lembaga pendidikan sekuler, pendidikan di madrasah dilaksanakan dengan mengejawantahkan nilai dan ajaran Islam dalam kehidupan dan perilaku semua komponen pendidikan mulai dari pimpinan sampai dengan siswa. Karakter Islami, yang pertama dan utama, berarti kesadaran sebagai pribadi Muslim untuk menjalankan secara konsisten perintah dan larangan agama dalam segala situasi dan kondisi, termasuk di lingkungan. Selain itu, karakter Islami berarti orientasi pendidikan yang holistik dan tidak terbatas pada cita-cita praktis, karena menempatkan nilai-nilai spiritual dan transedental [ketuhanan] dalam proses pencapaian tujuan pendidikan. Karakter Islami juga berarti strategi pembelajaran keagamaan yang tidak verbalistik sehingga memudahkan siswa untuk mengembangkan ketrampilan dan wawasan keislamannya secara terpadu. Di samping ketiga makna di atas, karakter Islami dari madrasah itu berarti ajakan dan seruan bagi lingkungan sekitar madrasah untuk meningkatkan syiar Islam melalui media pendidikan. Ciri Islami ini tercermin baik dalam kurikulum, aktifitas madrasah, pola tingkah laku penghuni madrasah, dan suasana lingkungan madrasah

"Populis", merupakan gambaran bahwa madrasah itu lahir dan dibesarkan oleh dan untuk masyarakat. Hampir seluruh madrasah muncul atas inisiatif masyarakat yang peduli dengan anak di sekitarnya yang memerlukan pendidikan. Memang pada awalnya dimulai dengan kebutuhan pendidikan agama tingkat dasar seperti belajar mengaji,

belajar shalat, mendoa dan sebagainya. Hal ini sejalan dengan munculnya dan berkembangnya Islam di daerah tersebut. Dalam banyak kasus, sekali mengabaikan watak populisnya, madrasah akan mengalami kematian karena ditinggalkan oleh massa pendukungnya.

Watak populis dari madrasah ini sangat relevan dengan tuntutan essensial ummat manusia sepanjang masa yang membutuhkan persaudaraan, saling kasih, dan semangat memberdayakan kaum tertindas. Dengan kata lain, madrasah hendaknya dilaksanakan dalam semangat yang merakyat sehingga melahirkan hasil pendidikan yang berprestasi dan sekaligus peduli dengan nasib sesama.

"Berkualitas", artinya *berorientasi pada mutu*. Kualitas pendidikan itu tercermin dalam dua tataran: proses pendidikan dan hasil pendidikan. Proses pendidikan menggambarkan suasana pembelajaran yang aktif dan dinamis serta konsisten dengan program dan target pembelajaran. Sedangkan hasil pendidikan menunjuk pada kualitas lulusan dalam bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jika gagal dalam mewujudkan visi ini, madrasah, akan tertinggal dari lembaga-lembaga pendidikan lain.

Berkualitas dicerminkan pada kegiatan dan nilai akademik yang diperoleh madrasah tersebut. Baik yang dapat dan dilihat dari hasil belajar siswa berupa nilai pada ulangan, kenaikan kelas, ujian akhir (NEM) maupun ujian masuk perguruan tinggi (UMPTN). Berkualitas ini tampak pula dengan banyaknya prestasi yang dicapai oleh siswa madrasah, baik dalam bidang seni, bahasa, komputer, olahraga, ketrampilan dan lain-lain. Sisi lain dari berkualitas adalah kemampuan siswa dan lulusan madrasah masuk dan bersaing dalam dunia global.

"Beragam" menunjukkan adanya fleksibilitas dalam pelaksanaan pendidikan, sehingga muncul berbagai model LPI sesuai dengan tujuan dan kekuatan yang dimilikinya seperti tampak dari dua belas LPI yang telah disebutkan sebelumnya. Keragaman tersebut mendorong kreativitas LPI dalam pengelolaan dan pengembangannya. Di sisi lain keragaman tersebut telah memberi pilihan bagi masyarakat dalam memilih lembaga pendidikan yang mereka inginkan.

Munculnya kebijakan pemerintah dengan penyeragaman yang terjadi selama tiga dekade terakhir disadari telah mematkan

kreativitas pengelolaan dan pengembangan madrasah. Hal ini sekaligus bertentangan dengan watak populis yang meniscayakan adanya lembaga, model, dan pendekatan pendidikan yang bervariasi sesuai dengan kompleksitas masyarakat. Pemerintah hendaknya membiarkan tumbuh dan berkembangnya aneka ragam lembaga pendidikan Islam, mulai dari pesantren, madrasah, majelis taklim, sampai dengan kelompok kajian usra. Dalam waktu yang bersamaan, setiap lembaga pendidikan Islam hendaknya juga dibiarkan berkembang dalam keanekaragaman tipe, mulai dari madrasah-umum, madrasah kejuruan, madrasah keagamaan, sampai dengan madrasah model. Sementara itu, dalam proses pembelajarannya, pendidikan Islam dapat mengembangkan berbagai strategi yang menjamin efektifitas pendidikan. Pola pendekatan yang tuggal akan menimbulkan kejenuhan siswa dalam belajar.

Kekuatan lain dari LPI adalah pengelolaannya yang berbasis masyarakat dan bersifat otonom. Kedua bentuk ini dikenal dengan istilah *Community Based Education* dan *School Based Management* yang populer saat ini.

Community Base Education bermakna bahwa LPI itu tumbuh dan berkembang dari masyarakat dan untuk masyarakat. Hal ini ditandai hampir seluruh LPI adalah lembaga swasta (milik masyarakat). Pertumbuhan dan perkembangan LPI secara cepat dari segi kuantitas, namun belum diiringi dari segi kualitas. Ini konsekuensi LPI yang bersifat "populis/massif" yang selalu cenderung memekar dan belum sempat mendalam. Keterikatan masyarakat terhadap madrasah lebih dinampakkan sebagai "ikatan emosional keagamaan" yang tinggi. Ikatan ini muncul karena bertemunya dua kepentingan. Pertama, hasrat kuat masyarakat Islam untuk berperanserta dalam pendidikan, dan kedua motivasi keagamaan untuk ber-"*tafaqquh fi al-din*".

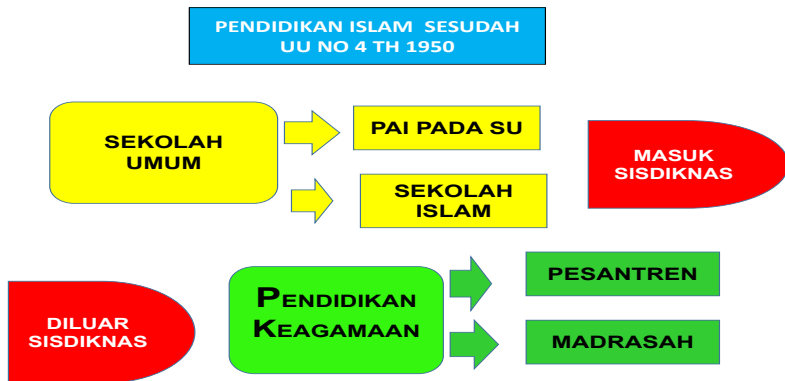
School Based Management bermakna bahwa pengelolaan sekolah didasarkan oleh adanya manajemen berbasis sekolah (MBS) yang memberikan kewenangan, kepercayaan dan tanggungjawab yang luas bagi sekolah berdasarkan profesionalisme untuk menata organisasi sekolah, mencari dan mengembangkan serta mendayagunakan sumberdaya pendidikan yang tersedia, dan memperbaiki kinerja

sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Dengan otonomi tersebut LPI dapat menentukan jenis keunggulan apa dari Lembaga pendidikannya dan ciri khas apa yang membedakan dengan madrasah/sekolah lain. Keragaman dan ketidaktergantungan dengan pusat dan birokrasi telah membuat madrasah pada masa lalu banyak yang ber"gensis".

Konsep *school based management* dan *community based education* yang didorong oleh pemerintah saat ini, ironisnya merupakan konsep yang melekat dan akrab dengan madrasah pada awalnya. Sayang madrasah "terpaksa" meninggalkan konsep tersebut karena tergilas dengan konsep sentralisasi dan penyeragaman yang dilakukan pemerintah.

Pejuangan Menuntut Pengakuan Eksistensi LPI *Upaya Integrasi Madrasah dalam Sistem Pendidikan Nasional*

Setelah Indonesia merdeka dan lahirnya UU Pendidikan yang pertama (UU no. 4 tahun 1950 jo UU no. 12 th 1954) tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran, ternyata pendidikan keagamaan dan madrasah belum masuk dalam sistem pendidikan tersebut. Ini bermakna belum diakui sebagai bagian dari lembaga pendidikan. Walaupun sebenarnya dalam salah satu pasalnya disebutkan untuk lembaga pendidikan keagamaan dan madrasah akan diatur dalam undang-undang tersendiri. Sayangnya undang-undang tersendiri itu tidak pernah keluar. Untuk lebih jelasnya posisi lembaga pendidikan keagamaan dan madrasah dalam sistem pendidikan nasional setelah UU No.4 th 1950 jo no 12 tahun 1954 lihat bagan berikut ini



Posisi lembaga pendidikan keagamaan dan madrasah yang masih berada di luar sistem itu berdampak munculnya diskriminasi perlakuan terhadap pendidikan lembaga keagamaan dan madrasah. Diskriminasi makin dirasakan ketika pemerintah membuat berbagai aturan yang bersifat sentralisasi, uniformisasi dan formalisasi. Kebijakan-kebijakan tersebut memaksa lembaga pendidikan keagamaan dan madrasah untuk menyesuaikan diri agar dapat diakui dan dihargai seperti sekolah.

Penyesuaian diri ini berakibat lembaga pendidikan keagamaan dan madrasah kehilangan identitas dan ciri khasnya yang juga secara langsung berakibat pada penurunan kualitas lulusannya. Mulai muncul sindiran bahwa lembaga pendidikan keagamaan dan madrasah adalah lembaga pendidikan kelas dua.

Keadaan ini diperparah lagi dengan keluarnya Keputusan Presiden No. 34 tahun 1972, yang kemudian diperkuat dengan Instruksi Presiden No 15 Tahun 1974. Kepres dan Inpres ini isinya dianggap melemahkan dan mengasingkan madrasah dari pendidikan nasional. Bahkan sebagian umat Islam memandang Kepres dan Inpres itu sebagai manuver untuk mengabaikan peran dan manfaat madrasah yang sejak zaman penjajahan telah diselenggarakan umat Islam.

Munculnya reaksi keras umat Islam ini disadari oleh pemerintah yang kemudian mengambil kebijakan untuk melakukan pembinaan mutu pendidikan madrasah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri (Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,

dan Menteri Dalam Negeri) yang dikenal dengan istilah SKB 3 Menteri tahun 1975

SKB ini merupakan model solusi yang di satu sisi memberikan pengakuan eksistensi madrasah, dan di sisi lain memberikan kepastian akan berlanjutnya usaha yang mengarah pada pembentukan sistem pendidikan nasional yang integratif. Dalam SKB tersebut diakui ada tiga tingkatan madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah yang ijazahnya diakui sama dan setingkat dengan SD, SMP dan SMA. Kemudian lulusannya dapat melanjutkan ke sekolah umum yang setingkat lebih tinggi, serta siswanya dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat.

Makna SKB Tiga Menteri ini bagi umat Islam adalah *pertama*, terjadinya mobilitas sosial dan vertikal siswa-siswa madrasah yang selama ini terbatas di lembaga-lembaga pendidikan tradisional (madrasah dan pesantren), dan *kedua*, membuka peluang kemungkinan anak-anak santri memasuki wilayah pekerjaan pada sektor modern.

Meskipun demikian, bukan berarti SKB Tiga Menteri ini tanpa masalah. Melalui SKB ini memang, status madrasah disamakan dengan sekolah berikut jenjangnya. Dengan SKB ini pula alumni MA dapat melanjutkan ke universitas umum, dan *vice versa*, alumni SMA dapat melanjutkan studinya ke IAIN. Karena madrasah diakui sejajar dengan sekolah umum, di mana komposisi kurikulum madrasah 70% mata pelajaran umum dan 30% pelajaran agama. Efek penyamaan kurikulum ini adalah bertambahnya beban yang harus dipikul oleh madrasah. Di satu pihak ia harus memperbaiki mutu pendidikan umumnya setaraf dengan standar yang berlaku di sekolah. Di lain pihak, bagaimanapun juga madrasah—sebagai sekolah agama—harus menjaga agar mutu pendidikan agamanya tetap baik. Namun, dengan penguasaan ilmu-ilmu agama hanya 30% termasuk Bahasa Arab, tidak cukup memadai bagi alumni MA untuk memasuki IAIN, apalagi untuk melanjutkan studi di Timur Tengah dan juga menjadi calon-calon ulama.

Undang-undang ini juga tidak menampung madrasah yang fokus utamanya pelajaran agama dan pelajaran umum, sekedar tambahan yang merupakan bentuk awal dari madrasah modern di

Indonesia. Di sisi lain hasil dari SKB ini belum memuaskan, karena masih sering lulusan madrasah mendapat perlakuan diskriminatif karena dianggap kemampuan umumnya belum setara dengan sekolah umum. Kenyataan itu tampak ketika lulusan madrasah mau masuk ke perguruan tinggi umum ataupun ke dunia kerja, di mana perlakuan diskriminatif sangat dirasakan oleh mereka.

Pengakuan Madrasah sebagai Sekolah Umum (berciri khas Islam)

Perjuangan agar mendapat perlakuan yang sama (integrasi madrasah dalam sistem pendidikan nasional secara penuh), baru dicapai dalam UUSPN No. 2 Tahun 1989, dimana madrasah dianggap sebagai sekolah umum yang berciri khas Islam dan kurikulum madrasah sama persis dengan sekolah, plus pelajaran agama Islam sebagai ciri khas.

Kenyataannya beban kurikulum bagi madrasah yang menerapkan kurikulum sekolah 100% ditambah dengan kurikulum agama sebagai ciri khas telah berakibat beban belajar siswa madrasah menjadi lebih banyak dan lebih berat dibanding dengan beban belajar anak sekolah. Hal itu dikarenakan pihak madrasah (c.q. Kementerian Agama) menerjemahkan undang-undang dan peraturan pemerintah tentang "madrasah adalah sekolah umum yang berciri khas Islam" dan "kurikulum madrasah sama dengan kurikulum sekolah" diterjemahkan beban kurikulum madrasah adalah 100% pelajaran umum di sekolah ditambah dengan 100% pelajaran agama di madrasah. Padahal jam belajar tetap sama dan situasinya juga sama. Di sisi lain kondisi, fasilitas dan latar belakang anak madrasah dengan anak sekolah cukup berbeda. Oleh karena itu wajar saja bila kualitas anak madrasah masih kalah dibandingkan dengan anak sekolah.

Namun ada juga madrasah yang memahami beratnya beban kurikulum itu, lalu mereka terpaksa menambah jam belajar hingga sore dan malam, khususnya madrasah yang di pondok pesantren seperti Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah di Pesantren Darunnajah. Madrasah yang tidak menambah jam pelajaran ataupun tidak mensiasati makna "kurikulum madrasah sama dengan kurikulum sekolah" maka hasil lulusan mereka menjadi "tangung" artinya penguasaan agama tidak

memadai dan penguasaan umum juga belum mencukupi. Inilah yang kebanyakan dialami madrasah-madrasah yang akhirnya mengesankan kualitas madrasah yang rendah baik untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi umum maupun ke perguruan tinggi agama.

Undang-Undang Pendidikan Nasional No.2 Tahun 1989 telah memperkuat posisi madrasah terhadap sekolah, namun disisi lain dianggap memperlemah posisi madrasah sebagai lembaga pendidikan agama yang fokus utamanya agama dan pengetahuan umum sebagai tambahan. Kebijakan ini juga yang dianggap memperlemah munculnya kader-kader ulama.

Ini pula yang menjadi dasar Menteri Agama Munawir Sjadzali (1983-1993) mendirikan MAPK (Madrasah Aliyah Program Khusus) dan kemudian dijadikan Madrasah Alyah Program Keagamaan (setelah UU No. 2 Tahun 1989) yang komposisi kurikulum 70% pelajaran agama dan 30% pelajaran umum plus pengajaran bahasa (Arab dan Inggris) secara intensif. Dengan program ini input IAIN secara kualitatif dapat ditingkatkan, dan yang penting lagi menjadi support bagi kemunculan calon-calon ulama. Karena komposisi agamanya tetap lebih besar dari umum, maka lulusannya lebih banyak diterima di perguruan tinggi agama, khususnya di Timur Tengah.

Dilihat dari sisi ini, kehadiran MAPK sejatinya adalah bentuk respon positif-progresif madrasah terhadap tantangan yang dihadapi. Namun dalam kenyataannya kehadiran MAPK masih ditumpangkan menjadi bagian atau program dari MA (karena politis menurut UU No. 2 tahun 1989 belum memberi tempat pengakuan untuk yang jenis ini, karena jenjang dasar dan menengah pertamanya tidak diakui/ tidak dimungkinkan oleh undang-undang tersebut. Demikian juga madrasah dan pesantren yang hanya semata-mata memberikan pelajaran agama tidak juga terakomodasi dalam undang-undang sistem pendidikan nasional ini (UU No. 2 Th 1989). Tentu hal ini masih dirasakan sebagai bentuk diskriminasi dalam pendidikan. Padahal umat menghendaki madrasah tetap memberi peluang yang sama antara madrasah sebagai sekolah umum yang berciri khas Islam dengan madrasah sebagai sekolah agama yang berwawasan Indonesia dan kemandirian ataupun madrasah yang semata-mata memberikan pelajaran agama.

Bukankah ketiganya merupakan upaya mencerdaskan anak bangsa, namun dengan fokus yang berbeda? Jadi yang membedakan madrasah dengan sekolah umum sekarang bukan lagi pada bobot pengetahuan umumnya tapi pada kualitas dan ciri khas madrasah itu sendiri. Madrasah sebagai sekolah umum berciri khas menjadi model yang diinginkan oleh para tokoh founder father untuk menyiapkan calon intelektual yang muslimnya baik. Sedangkan MAPK menyiapkan calon ulama yang berpengetahuan yang baik.

Sampai disini persoalan madrasah sebagai sekolah umum yang berciri khas Islam sudah terselesaikan sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional yang diakui sama dengan sekolah. Dengan kata lain madrasah sudah menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional seperti tampak pada bagan berikut ini:



Tinggal masalahnya bagaimana menterjemahkan *ciri khas Islam* pada madrasah tersebut. Apakah ciri khas tersebut berupa mata pelajaran agama (Al-Qur'an, Hadist, Tauhid, Fiqh, dan SKI) yang bersifat kognitif. Ataupun ciri khas Islam tersebut lebih bersifat afektif dan psikomotorik tanpa melupakan pengetahuan dasar agama Islam. Misalkan ciri khas Islam itu taat beribadah, berakhlak baik, hafal *Juz Amma* dan beberapa ayat yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Ini tantangan bagi madrasah yang berciri khas Islam.

Sedangkan bagi madrasah keagamaan tantangannya bagaimana menerjemahkan pengetahuan umum. Mata pelajaran apa saja dan seberapa banyak materi dasarnya yang harus diketahui. Di tengah arus teknologi tentu kedua jenis madrasah itu juga perlu dibekali ketrampilan teknologi.

Pengakuan Kembali Madrasah sebagai Sekolah Agama dan Pendidikan Keagamaan Menjadi Bagian dari Sistem Pendidikan Nasional

Setelah persoalan madrasah sebagai sekolah umum yang berciri khas selesai secara sistem, maka masih ada persoalan dengan madrasah sebagai sekolah agama yang memberikan porsi utama pengajaran agama ditambah pengetahuan umum sebagai ciri keindonesiaan dan kemodernan belum mendapat tempat dalam sistem pendidikan nasional versi UU No. 2 Tahun 1989.

Hal ini masih mengundang perasaan yang "kurang puas" di kalangan umat, karena masih ada perasaan pemerintah memojokkan madrasah yang berfokus pada pengajaran agama dan dengan tambahan pelajaran umum. Juga masih terdengar pendapat yang menyatakan bahwa madrasah sebagai sekolah umum yang berciri khas Islam itu sebagai upaya "mendangkalkan agama" bagi umat Islam Indonesia. Tentu prasangka ini tidak beralasan, karena memang peminat untuk memasukkan anak ke madrasah sebagai sekolah umum yang berciri khas Islam jauh lebih besar dibanding dengan yang ingin memasukkan anaknya ke sekolah agama yang pengetahuan agamanya lebih besar dari pengetahuan umum seperti ditunjukkan oleh data bahwa anak-anak yang memilih program pilihan agama jauh lebih kecil (48%) dari yang memilih pilihan IPS atau matematika (52%)^[xi].

Perjuangan untuk memasukkan madrasah sebagai sekolah agama (fokus utama pengajaran agama) dalam sistem pendidikan nasional baru berhasil setelah diundangkannya UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003^[xii]. Dalam undang-undang ini diakui kehadiran Pendidikan Keagamaan sebagai salah satu jenis pendidikan disamping pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi dan

khusus (pasal 15). Dalam pendidikan keagamaan ini tidak termasuk lagi madrasah sebagai sekolah umum yang berciri khas Islam. MI, MTs, MA dan MA Kejuruan sudah dimasukkan dalam jenis pendidikan umum dan pendidikan kejuruan. Pendidikan keagamaan ini diatur dalam bagian tersendiri (bagian kesembilan) pasal 30^[xiii].

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 telah memberi peluang yang sama kepada madrasah dan pesantren yang bukan sekolah umum berciri khas Islam untuk mendapat pengakuan, penghargaan dan tidak didiskriminasi di mata negara. Secara formal madrasah sebagai sekolah agama dan pendidikan keagamaan lainnya sudah menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional seperti tampak dalam Bagan berikut ini



Undang-undang sisdiknas No. 20 tahun 2003 ini telah membuka peluang kembalinya kebhinekaan lembaga pendidikan Islam yang diakui menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Dengan demikian tidak diperlukan lagi aktifitas ujian ekstranei, ujian persamaan dan sejenisnya bagi madrasah yang bukan sekolah umum untuk mengikuti kurikulum sekolah. Madrasah sebagai sekolah agama dan berbagai jenis pendidikan keagamaan lainnya perlu menata diri untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikannya secara tersendiri namun sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.

Perjuangan Menampilkan Keunggulan dan Siap Bersaing

Posisi madrasah dan LPI sudah kuat dengan masuk, diakui dan diharginya dalam Sistem Pendidikan Nasional. Tantangan setelah ini adalah bagaimana madrasah/LPI mampu menampilkan dirinya sebagai lembaga pendidikan yang baik dan unggul serta mampu bersaing dengan lembaga pendidikan lain secara nasional maupun global.

Ke depan dengan telah diundangkannya Sistem Pendidikan Nasional 2003, maka madrasah sudah bisa memilih dan memilah diri tipe madrasah seperti apa yang diinginkan, sehingga lebih fokus pada keunggulan dari masing-masing tipe tersebut. Kalau dulu ketiga tipe itu diinginkan, tapi wadahnya yang diakui hanya satu dan ini berakibat beratnya beban dan waktu belajar di madrasah. Kini dengan telah dibuka peluang tiga tipe madrasah dengan masing-masing punya fokus utama sendiri.

Sekarang terbuka tiga pilihan jenis madrasah yaitu:

Pertama, *madrasah sebagai sekolah umum yang berciri khas Islam*, di mana fokus utama pelajaran umum dan pelajaran agama sebagai ciri khas madrasah. Ini bermakna penguasaan pengetahuan umum bagus dan kuat. Namun ciri Keislaman dari madrasah tetap utama dan menonjol. Ini bermakna bahwa pengajaran agama ini lebih pada penghayatan dan pengamalan agamanya bukan pada pengetahuan keagamaannya. Pengetahuan keagamaan diajarkan sebagai dasar memperkuat keimanan dan pemahaman Islam secara utuh. Madrasah model ini sudah diwujudkan dengan hadirnya Madrasah Aliyah Insan Cendekia yang merupakan karya BJ. Habibie melalui SMA Insan Cendekian di bawah BPPT, yang kemudian dialihkan menjadi MA Insan Cendekia yang pada awal berada di Serpong dan Gorontalo. SMA Insan Cendekia berslogan "Unggul dalam Iptek dan Imtaq". Dengan demikian anak didik dapat lebih berkonsentrasi kepada pelajaran umum sesuai dengan kompetensi yang diharapkan, namun mereka tetap dididik dan dilatih untuk menjadi seorang muslim yang baik. Dengan cara ini akan tampak madrasah sebagai sekolah umum yang berani bersaing kualitas dengan sekolah umum lainnya, namun mereka adalah muslim-muslim yang baik (taat menjalankan agamanya). Dengan demikian

madrasah akan dikenal sebagai lembaga pendidikan Indonesia yang menghasilkan lulusan yang menguasai pengetahuan umum dengan bagus (Ipatek), tetapi juga sebagai muslim yang baik (Imtaq).

Kedua, *Madrasah sebagai sekolah agama berciri khas berpengetahuan umum*, di mana fokus utama adalah pelajaran agama. Namun Pelajaran umum sebagai penunjang. Madrasah model ini telah diwujudkan dalam bentuk MAPK (Madrasah Aliyah Program Keagamaan) yang telah digagas di masa Menteri Agama Munawir Sjadzali. Di sini murid madrasah disiapkan untuk penguasaan agama dengan baik tetapi juga mendapat tambahan masalah keindonesiaan dan kemodernan. Ini penting agar lulusan madrasah sebagai sekolah agama yang hidup dan tumbuh di bumi Indonesia, tetapi berpengetahuan luas dan berwawasan global. Madrasah seperti inilah yang akan melahirkan calon-calon ahli agama yang berwawasan luas dan global. Sebagai tindak lanjut dari undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, maka sudah waktunya Departemen Agama segera memisahkan Madrasah Aliyah Program Keagamaan menjadi Madrasah Aliyah Keagamaan yang berdiri sendiri dan terpisah dari Madrasah Aliyah sebagai sekolah umum yang berciri khas Islam.

Ketiga, *Madrasah sebagai sekolah kejuruan*, di mana fokus pelajaran pada ketrampilan hidup (*life skill*) namun siswa dididik dan dilatih untuk menjadi seorang muslim yang baik. Untuk itu perlu ditata kurikulum yang cocok untuk menghasilkan anak didik dengan kompetensi yang demikian itu. Sudah waktunya Departemen Agama segera memisahkan Madrasah aliyah program Ketrampilan menjadi Madrasah Aliyah Kejuruan yang berdiri sendiri terpisah dari Madrasah Aliyah sebagai sekolah umum yang berciri khas Islam sebagai tindak lanjut dari UU No.20 Th 2003. Madrasah ini nantinya akan menampung anak-anak yang ingin segera bekerja karena kemampuan keuangan orang tuanya terbatas untuk melanjutkan ke perguruan tinggi.

Untuk lebih jelasnya posisi madrasah setelah diterapkan UU No. 20 Tahun 2003 dapat dilihat pada bagan berikut ini



Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 ini, telah memberi tempat yang layak bagi madrasah sebagai sekolah agama dan berbagai pendidikan keagamaan lainnya sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu sudah sepatutnya kesempatan penghargaan ini digunakan dengan sebaik-baiknya bagi lembaga pendidikan keagamaan untuk menata diri sesuai dengan ketentuan perundangan ini. Artinya segera menata pendidikan keagamaan yang mana masuk pendidikan formal, mana yang nonformal dan mana yang informal. Demikian juga mana yang berjenjang dari pendidikan dasar sampai ke pendidikan tinggi, yang mana yang tidak perlu berjenjang.

Dan yang lebih mendesak lagi segera memisahkan MA Program Keagamaan dan MA Program Ketrampilan menjadi Madrasah Aliyah Keagamaan dan Madrasah Aliyah Kejuruan yang berdiri sendiri, terpisah dari Madrasah Aliyah sebagai sekolah umum yang berciri khas Islam.

MP bila ingin tetap sebagai Madrasah berciri khas Islam perlu menata lagi bahwa fokus mereka adalah menyiapkan calon intelektual dan sebagai muslim yang baik bagi anak didiknya. Ini berarti porsi pelajaran agama lebih banyak bersifat afektif dan psikomotorik daripada yang bersifat kognitif yang selama ini dicerminkan dengan mata pelajaran Tauhid, Qur'an, Hadist, Fiqh dan SKI. Tentu pengenalan materi dasar mata pelajaran tersebut tetap perlu, namun tidak harus

mendalam seperti menyiapkan mereka untuk menjadi calon ulama. Demikian juga dengan pelajaran umum mungkin tidak semua materi diajarkan tatap muka secara penuh. Bisa jadi ada beberapa materi yang bisa dikurangi tatap muka, namun diganti dengan penugasan. Silahkan kreatifitas MP yang sudah terlaltih selama ini memberikan solusinya agar MP tetap menjadi pilihan utama masyarakat dalam menyekolahkan anaknya. MP jangan berpretensi untuk menyiapkan tiga fokus madrasah tersebut secara penuh. Biarkan siswa dan orang tuanya dapat memilih marasah yang sesuai dengan minat dan kemampuan anaknya apakah akan memilih Madrasah Berciri Khas Islam, atau Madrasah Keagamaan ataupun Madrasah Ketrampilan.

Semoga MP maju terus dan makin berkembang untuk Indonesia.

Ciputat 07/06/23

Daftar Pustaka

Buku

- Anshari, *Pendidikan Berorientasi Akhlak Mulia di Madrasah Pembangunan UIN Jakarta*, Tesis Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012.
- Burhanudin, Jajat, Dina Afrianty (ed.), *Mencetak Muslim Modern, Peta Pendidikan Islam Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006).
- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kiyai*, (Jakarta: LP3ES. Cet I, 1982).
- Hilton, Steve, *More Human, Designing a World Where People Come First* (London: WH Allen, 2016).
- Jabali, Fuad, Jamhari (ed.), *IAIN dan Modernisasi Islam di Indonesia* (Jakarta: Logos, 2002).
- Kam Hing, Lee, *Education and Politics in Indonesia 1945-1965* (Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 1995)
- Lubis, Amany, *Autobiografi Amany Lubis: Namaku Harapan* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2019).
- Madjid, Nurcholis, *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan* (Jakarta: Paramadina, 1977).
- Munhanif, Ali, "Prof. Dr. A. Mukti Ali: Modernisasi Politik-Keagamaan Orde Baru," dalam Azyumardi Azra dan Saiful Umam (ed.),

Menteri-Menteri Agama RI: Biografi Sosial-Politik (Jakarta: INIS, PPIIM, Litbang Depag, 1998).

Nizar, Samsul, *Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah sampai Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007).

Saridjo, Marwan, *Pendidikan Islam dari Masa ke Masa: Tinjauan Kebijakan Publik terhadap Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Ngali Aksara, 2010).

Shaleh, Abdul Rachman, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa : Visi, Misi dan Aksi*, (Jakarta: 2004).

Subhan, Arief, *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad ke-20, Pergumulan antara Modernisasi dan Identitas* (Jakarta: Kencana, 2012).

Suwito, "Perubahan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta Menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta", bahan yang disampaikan pada acara Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI tanggal 19 Juni 2002.

UIN Syarif Hidayatullah, *Pedoman Akademik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2022.

Zakaria, Rusydi dkk. (ed.), *Membangun Perkaderan Intelektual, Setengah Abad HMI Cabang Ciputat* (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2012).

Dokumen

Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam Depag RI Nomor: Kep/D/03/1978.

Surat Keputusan Kanwil Departemen Agama DKI Jakarta, nomor: Kw.09.4/4/5/HK.005/2081/2008

Surat Keputusan Kanwil Departemen Agama Provinsi DKI Jakarta nomor: Kw.09.445HK.00520812008.

Surat Keputusan Nomor 5.13/028/Teknis-Disdikbud/X/2020

Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor : 421.1/85-DPMPTSP/OL/2021.

Tim Departemen Agama RI, Manajemen Berbasis Madrasah , 1999.

Dokumen "Tambahan Berita Negara R.I. Tanggal 5/10 - 2001 No. 80.

Kepres. No. 34 tahun 1972 dan Inpres. No. 15 tahun 74 dan SKB 3

Menteri (Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri).

Kutipan SK Rektor UIN Jakarta, No. 06 tahun 1988.

Wawancara

Wawancara dengan Dr. Sukiman AR, Kamis, 9 Februari 2023 Pukul 13.00-14.15 wib

Wawancara dengan Elman Sadri, 20 Mei 2022

Wawancara dengan Elman Sadri, 19 Februari 2023 (10.00-11.00 WIB)

Wawancara dengan Kafrawi, 5 Oktober 2016.

wawancara, dengan Elman Sadri, Direktur MP tahun 1983-1990, pada tanggal 20 Mei 2022

Wawancara dengan Kafrawi Ridwan, salah seorang pendiri MP, pada tanggal 5 Oktober 2016

Wawancara dengan Siti Muttaqinati Senin 23 Mei 2022 (08.15-09.30).

Wawancara dengan Sukiman, Kamis 9 Februari 2023

Wawancara dengan Siti Muttaqinati, salah seorang guru MI Angkatan I, Senin 23 Mei 2022 (08.15-09.30)

Wawancara dengan Sukiman AR, Kamis 09 Februari 2023, jam 13.00-14.15 WIB

Wawancara dengan Sukiman AR, Kepala MTs ke-2, Kamis 09 Februari 2023, jam 13.00-14.15 WIB

Wawancara dengan Tarmizi Tanjung, Plt. Kepala MI tahun 1973-1975, Kamis 9 Februari 2023 (09.00-09.45).

Wawancara dengan Prof. Dr. Abudin Nata, MA, 27 November 2023.

Lampiran-lampiran

1. SK Yayasan pertama
2. Surat Direktur Pendidikan Agama Islam tentang status Pengurusan Pendidikan pada Madrasah Pembangunan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta berada di Lingkungan Wilayah DKI Jakarta.
3. SK Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta pertama.
4. SK Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tentang Pelimpahan Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan Madrasah Pembangunan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.



KANTOR NOTARIS

R. SOEROJO WONGSOWIDJOJO

DJAKARTA

Djalan Bintara No. 29 Blok Q I.

KEBAJARAN - BARU

Telpon No. 72242 Ot.: Kbj.

Akte Tgl. 22 April 1964 No. 117..

= J A J A S A N =

JAJASAN KESEDJAHTERAAN DOSEN DAN

PEGAWAI I.A.I.N. (INSTITUT AGAMA ISLAM

NEGERI), berkedudukan di Djakarta..

==== smn=====

kat, baik yang berupa barang-barang yang bergerak --
maupun yang tidak bergerak ; -----

c. sokongan-sokongan tetap ; -----

d. penghasilan dari Jajasan ; -----

e. pendapatan lain-lain yang sah. -----

----- SAAT MULA DAN LAMANJA BERDIRI -----

----- Pasal 5. -----

Jajasan ini didirikan pada tanggal 9-12-1383 (sembilan
Dzulhidjah seribu tigaratus delapanpuluh tiga) - ak
bertepatan dengan tanggal 22 April 1964 (dua puluh - --
dua April seribu sembilanratus enampuluh empat) un - --
tuk waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

----- P E N G U R U S -----

----- Pasal 6. -----

1. Jajasan ini diurus dan dipimpin oleh suatu Dewan --
Pengurus yang terdiri dari sekurang-kurangnya 5 (li- --
ma) orang diantaranya seorang Ketua, seorang Wakil -
Ketua, seorang Sekretaris, seorang Bendahara dan seo- --
rang Pembantu atau lebih. -----

2. Jika ada perubahan susunan lowongan dalam Dewan --
Pengurus, maka perubahan susunan/lowongan itu dite- --
takan/diisil oleh rapat Dewan Pengawas. -----

3. Para anggota Dewan Pengurus diangkat dan diberhen- --
tikan oleh Dewan Pengawas untuk waktu dua tahun lama- --
nja. -----

Setelah diberhentikan dapat diangkat kembali untuk --
pertama kalinya diangkat sebagai para anggota Dewan --
Pengurus; sebagai berikut : -----

a. Ketua : Hndji ILJAS MOHAMAD ALI ; -----

b. Sekretaris : Doctorandus AHMAD SJADALI ; -----

- d. Anggota/Pembantu: -----
----- 1. MUHAMMAD SUJAHAR ; -----
----- 2. HAMDANI ALIM A ; -----
----- 3. Doctorandus HUSIEN ASEGAF ; -----
----- 4. CHAWAS S. -----

----- Pasal 7. -----

Koanggotaan Dewan Pengurus gugur karena : -----

- a. meninggal dunia ; -----
b. diberhentikan atas permintaan sendiri ; -----
c. diberhentikan menurut putusan rapat Dewan Pen-
was. -----

----- Pasal 8. -----

1. Sedikit-dikitnja tiga bulan sekali Dewan Peng-
mengadakan rapat untuk membitjarakan keadaan Jaje
2. Selanjutnja rapat Dewan Pengurus diadakan set
kali bila dianggap perlu oleh Ketua atau atas per-
mintaan dari sekurang-kurangnja dua orang anggota
Dewan Pengurus lainnja. -----
3. Semua rapat dipimpin oleh Ketua, bila ia tidak
ada pada rapat oleh Wakil Ketua, bila wakil Ketua
pun tidak ada pada rapat, ~~dipimpin~~ rapat dipilih
oleh para hadirin. -----
4. Untuk dapat mengambil putusan jang sjah, rapat
Dewan Pengurus harus dihadiri sekurang-kurangnja
separo dari djumlah anggotanja, ketjuali djika dai
anggaran dasar ini ada penetapan lain. -----
5. Semua putusan diambil dengan suara jang terbanyak
ketjuali djika dalam anggaran dasar ini ada peneta-
pan lain. -----

/pimpinan
Di benarkan



DIREKTORAT JENDRAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
DEPARTEMEN AGAMA RI

Jalan Moh. Husni Thamrin No. 6 Tlp. 49962 Jakarta

Nomor : D.II/K/3503.

Jakarta, 4 - Mei - 1976

Temp. : 0-0-0
Hal : Status Pengurusan Pendidikan pada Madrasah Pembangunan I.A.I.N. Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Kepada Yth.

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Agama D.K.I. Jakarta
u.p. Kepala Bidang Pendidikan -
Agama Islam, di -
Jakarta.

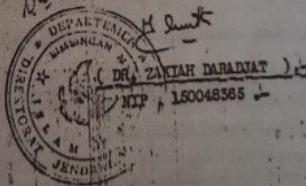
Assalamu'alaikum W.W.

Selubungan dengan tembusan surat Rektor I.A.I.N. Syarif Hidayatullah Jakarta tanggal 22 Januari 1976 - no. 050/E/K/1976 perihal termaksud pada pokok surat ini, dan aslinya ditujukan kepada Saudara, maka bersama ini kami jelaskan kepada Saudara, bahwa : status Madrasah tersebut berada di dalam lingkungan Wilayah D.K.I. Jakarta.

Demikianlah kiranya Saudara menjadi maklum.

Wassalam

DIREKTUR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM :



KEPUTUSAN REKTOR IAIN SYARIF HIDAYATULLAH
 NOMOR : 06 TAHUN 1988

TENTANG

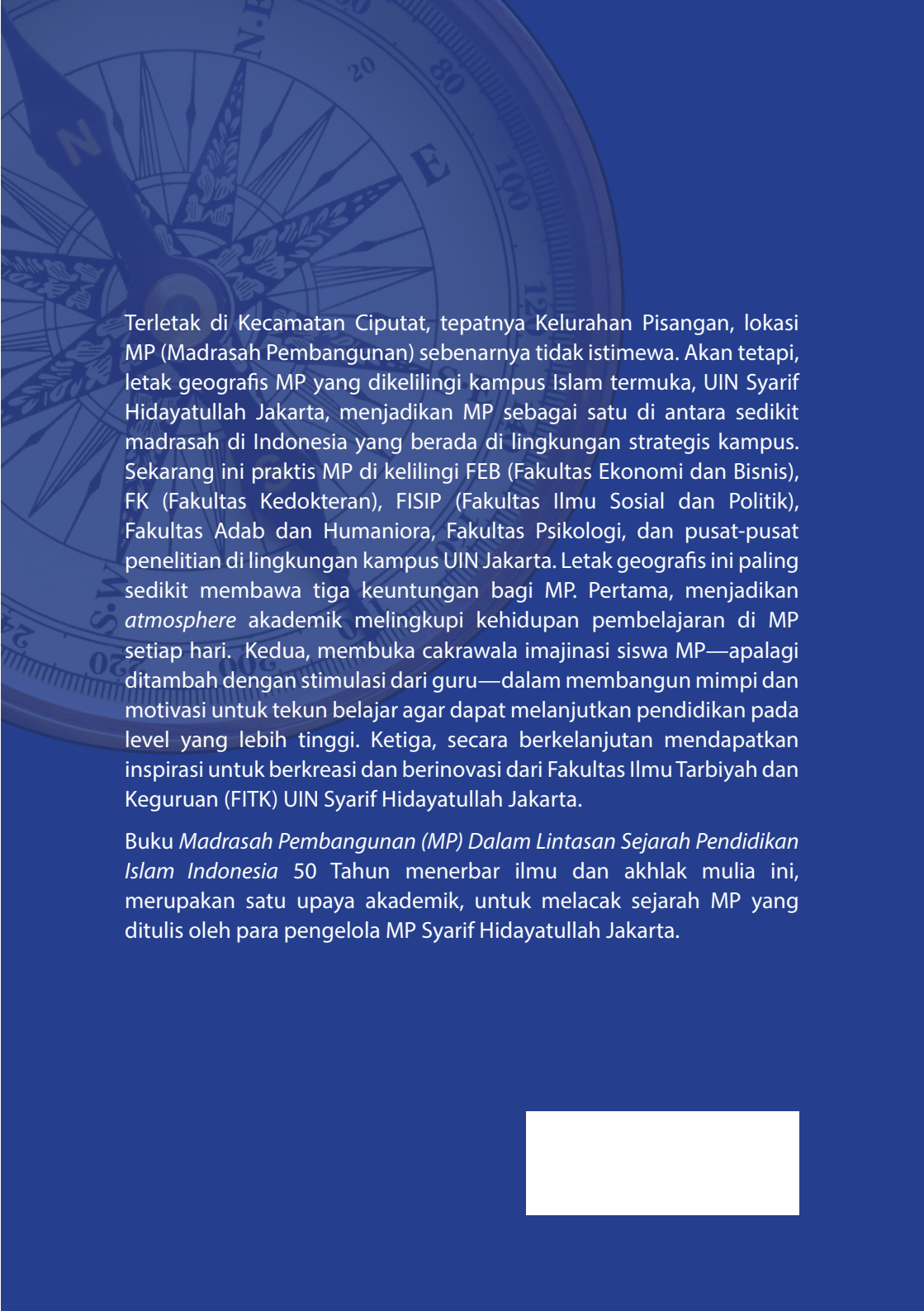
PELIMPAHAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGA-
 RAAN MADRASAH PEMBANGUNAN IAIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

REKTOR IAIN SYARIF HIDAYATULLAH :

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pemantapan organisasi, peningkatan mutu dan pengembangan Madrasah Pembangunan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang didirikan sejak tahun 1974, perlu adanya suatu lembaga khusus yang mengayomi dan menyentuhkan kegiatan Madrasah tersebut;
- b. Bahwa Yayasan Kesejahteraan IAIN Jakarta sesuai dengan maksud dan tujuannya, dipandang layak dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas dimaksud;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut pada butir a dan b, perlu adanya suatu ketetapan dalam Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1985;
 2. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1987;
 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1972;
 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 118 Tahun 1969;
 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 115 Tahun 1982.
- Memperhatikan: Keputusan rapat Senat Harian IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tanggal 31 Desember 1987.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN SYARIF HIDAYATULLAH TENTANG PELIMPAHAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARAAN MADRASAH PEMBANGUNAN IAIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.
- Pertama : Melimpahkan tugas, wewenang dan tanggung jawab penyelenggaraan Madrasah Pembangunan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta kepada Yayasan Kesejahteraan IAIN Jakarta.
- Kedua : Susunan organisasi, tata kerja dan pembinaan Madrasah Pembangunan tersebut sebagai Madrasah Laboratorium Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta diatur lebih lanjut oleh Yayasan Kesejahteraan IAIN Jakarta.



Terletak di Kecamatan Ciputat, tepatnya Kelurahan Pisangan, lokasi MP (Madrasah Pembangunan) sebenarnya tidak istimewa. Akan tetapi, letak geografis MP yang dikelilingi kampus Islam termuka, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menjadikan MP sebagai satu di antara sedikit madrasah di Indonesia yang berada di lingkungan strategis kampus. Sekarang ini praktis MP di kelilingi FEB (Fakultas Ekonomi dan Bisnis), FK (Fakultas Kedokteran), FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Politik), Fakultas Adab dan Humaniora, Fakultas Psikologi, dan pusat-pusat penelitian di lingkungan kampus UIN Jakarta. Letak geografis ini paling sedikit membawa tiga keuntungan bagi MP. Pertama, menjadikan *atmosphere* akademik melingkupi kehidupan pembelajaran di MP setiap hari. Kedua, membuka cakrawala imajinasi siswa MP—apalagi ditambah dengan stimulasi dari guru—dalam membangun mimpi dan motivasi untuk tekun belajar agar dapat melanjutkan pendidikan pada level yang lebih tinggi. Ketiga, secara berkelanjutan mendapatkan inspirasi untuk berkreasi dan berinovasi dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Buku *Madrasah Pembangunan (MP) Dalam Lintasan Sejarah Pendidikan Islam Indonesia 50 Tahun* menerbar ilmu dan akhlak mulia ini, merupakan satu upaya akademik, untuk melacak sejarah MP yang ditulis oleh para pengelola MP Syarif Hidayatullah Jakarta.

